



Pemerintah
Kota Semarang



Publikasi Media Massa **KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG**

JANUARI – AGUSTUS 2026

**Sepanjang 2025 Pemkot Semarang
Berhasil Kendalikan Stunting dan Capaian UHC 100 Persen**



SEMARANG - Pemerintah Kota atau Pemkot Semarang terus menunjukkan kinerja nyata dalam memperkuat sektor kesehatan sebagai fondasi pembangunan manusia. Melalui penguatan layanan dasar, pendekatan pencegahan, serta perlindungan kesehatan yang inklusif, Pemkot Semarang berhasil menjaga angka stunting tetap terkendali sekaligus memastikan seluruh warga terlindungi melalui sistem jaminan kesehatan.

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Semarang hingga _cut-off_ Desember 2025, prevalensi stunting di Kota Semarang tercatat sebesar 4,27 persen atau 2.593 balita. Angka ini mencerminkan hasil dari berbagai upaya berkelanjutan yang dilakukan pemerintah daerah, terutama pada penguatan layanan kesehatan ibu dan anak, pemantauan tumbuh kembang balita, serta edukasi gizi di tingkat keluarga dan masyarakat.

Selain penanganan stunting, Pemkot Semarang juga menaruh perhatian besar pada upaya pencegahan sejak dini. Penguatan intervensi preventif terus dilakukan agar anak tidak masuk ke fase stunting, melalui pendekatan terintegrasi yang melibatkan layanan kesehatan, pemenuhan gizi, serta penguatan peran keluarga dan lingkungan.

Di sisi lain, capaian penting juga ditorehkan dalam penguatan perlindungan kesehatan masyarakat. Hingga Desember 2025, cakupan Universal Health Coverage (UHC) di Kota Semarang telah mencapai 100 persen, yang berarti seluruh penduduk Kota Semarang telah terjangkau dalam sistem jaminan kesehatan. Capaian ini menegaskan komitmen Pemkot Kota Semarang untuk memastikan tidak ada warga yang tertinggal dalam akses layanan kesehatan.

Menanggapi capaian tersebut, Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng, menyampaikan bahwa penguatan sektor kesehatan merupakan investasi jangka panjang bagi kualitas hidup masyarakat.

“Menjaga kesehatan warga adalah fondasi utama pembangunan Kota Semarang. Upaya pengendalian stunting dan terwujudnya UHC

100 persen menunjukkan bahwa kebijakan kesehatan kami diarahkan agar benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat, terutama sejak usia dini,” ujar Agustina.

Agustina menambahkan, Pemerintah Kota Semarang terus memastikan agar kebijakan kesehatan tidak berhenti pada angka, tetapi benar-benar hadir dalam kehidupan sehari-hari warga. Penguatan layanan kesehatan ibu dan anak, pemenuhan gizi, serta jaminan kesehatan yang inklusif menjadi bagian dari kerja berkelanjutan pemerintah daerah.

“Kami memastikan layanan kesehatan, pencegahan, dan perlindungan jaminan kesehatan berjalan beriringan. Tujuannya jelas, agar setiap warga Kota Semarang memiliki kesempatan tumbuh sehat dan hidup lebih produktif,” tambahnya.

Capaian pengendalian stunting dan terwujudnya UHC 100 persen ini sejalan dengan prioritas pembangunan sektor kesehatan Kota Semarang yang menitikberatkan pada pencegahan, pemerataan layanan, dan perlindungan sosial. Pemerintah Kota Semarang optimistis, dengan fondasi kesehatan yang kuat, kualitas sumber daya manusia Kota Semarang dapat terus meningkat secara berkelanjutan.

Pemkot Semarang Dukung Penguatan Peran NU Lewat Peresmian Gedung PCNU



SEMARANG - Pemerintah Kota atau Pemkot Semarang meresmikan Gedung Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kota Semarang pada Sabtu (24/1). Gedung yang berlokasi di Jalan Puspogiwang I Nomor 47, Kelurahan Gisikdrono, Kecamatan Semarang Barat tersebut diharapkan menjadi pusat kegiatan organisasi, ruang pengabdian, sekaligus wadah dialog dan kebersamaan bagi masyarakat.

Peresmian gedung dilakukan oleh Wakil Wali Kota Semarang Iswar Aminuddin yang mewakili Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng, sebagai penanda resmi pemanfaatan gedung PCNU Kota Semarang.

Acara dihadiri Ketua Umum PBNU Dr. KH Yahya Cholil Staquf, jajaran PWNU Jawa Tengah, PCNU Kota Semarang, para sesepuh

dan kiai, pimpinan badan otonom serta lembaga NU se-Kota Semarang.

Dalam sambutan Wali Kota yang dibacakan Iswar Aminuddin, Pemerintah Kota Semarang menyampaikan apresiasi atas kontribusi Nahdlatul Ulama dalam menjaga harmoni sosial di Kota Semarang. “Pemerintah Kota Semarang menyampaikan apresiasi matur nuwun kepada Nahdlatul Ulama sebagai organisasi kemasyarakatan yang telah memiliki kontribusi panjang dan nyata dalam menjaga kehidupan sosial yang rukun, damai, dan harmonis,” ujar Iswar.

Ia juga menyampaikan bahwa Kota Semarang merupakan kota yang majemuk dan inklusif, di mana NU memiliki peran strategis sebagai perekat sosial. “Kota Semarang adalah kota yang majemuk serta inklusif, dan NU senantiasa hadir sebagai perekat sosial, penyejuk kehidupan bermasyarakat, serta mitra strategis dalam menjaga nilai persatuan dan kebangsaan,” lanjutnya.

Peresmian gedung yang dirangkaikan dengan peringatan Harlah NU ini, menurut wali kota, mencerminkan konsistensi NU dalam merawat nilai kebersamaan, toleransi, dan moderasi. Gedung PCNU diharapkan tidak hanya menjadi pusat aktivitas organisasi,

tetapi juga ruang dialog, ruang pengabdian, serta ruang kebersamaan yang terbuka bagi masyarakat luas.

Gedung PCNU Kota Semarang terdiri atas empat lantai dan satu lantai ground, dengan proses pembangunan dimulai sejak Februari 2025. Pembangunan fisik gedung didukung dana hibah Pemerintah Kota Semarang sebesar Rp10 miliar serta sumbangan kader NU, dan dikerjakan secara swakelola oleh kader NU yang memiliki kompetensi di bidang konstruksi.

Menutup sambutan, Iswar menyampaikan harapan Wali Kota Semarang agar sinergi antara Pemerintah Kota Semarang dan Nahdlatul Ulama terus terjalin secara positif dan saling menguatkan demi kemanfaatan bagi masyarakat luas.

Pemkot Semarang Hadir Salurkan 400 Paket Sembako dan Siapkan Solusi Lanjutan bagi Nelayan Semarang Utara Terdampak Angin Barat



SEMARANG - Pemerintah Kota atau Pemkot Semarang terus menunjukkan kinerja nyata dalam memperkuat sektor kesehatan sebagai fondasi pembangunan manusia. Melalui penguatan layanan dasar, pendekatan pencegahan, serta perlindungan kesehatan yang inklusif, Pemkot Semarang berhasil menjaga angka stunting tetap terkendali sekaligus memastikan seluruh warga terlindungi melalui sistem jaminan kesehatan.

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Semarang hingga _cut-off_ Desember 2025, prevalensi stunting di Kota Semarang tercatat sebesar 4,27 persen atau 2.593 balita. Angka ini mencerminkan hasil dari berbagai upaya berkelanjutan yang dilakukan pemerintah daerah, terutama pada penguatan layanan kesehatan ibu dan anak, pemantauan tumbuh kembang balita, serta edukasi gizi di tingkat keluarga dan masyarakat.

Selain penanganan stunting, Pemkot Semarang juga menaruh perhatian besar pada upaya pencegahan sejak dini. Penguatan intervensi preventif terus dilakukan agar anak tidak masuk ke fase stunting, melalui pendekatan terintegrasi yang melibatkan layanan kesehatan, pemenuhan gizi, serta penguatan peran keluarga dan lingkungan.

Di sisi lain, capaian penting juga ditorehkan dalam penguatan perlindungan kesehatan masyarakat. Hingga Desember 2025, cakupan Universal Health Coverage (UHC) di Kota Semarang telah mencapai 100 persen, yang berarti seluruh penduduk Kota Semarang telah terjangkau dalam sistem jaminan kesehatan. Capaian ini menegaskan komitmen Pemkot Kota Semarang untuk memastikan tidak ada warga yang tertinggal dalam akses layanan kesehatan.

Menanggapi capaian tersebut, Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng, menyampaikan bahwa penguatan sektor kesehatan merupakan investasi jangka panjang bagi kualitas hidup masyarakat.

“Menjaga kesehatan warga adalah fondasi utama pembangunan Kota Semarang. Upaya pengendalian stunting dan terwujudnya UHC 100 persen menunjukkan bahwa kebijakan

kesehatan kami diarahkan agar benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat, terutama sejak usia dini,” ujar Agustina.

Agustina menambahkan, Pemerintah Kota Semarang terus memastikan agar kebijakan kesehatan tidak berhenti pada angka, tetapi benar-benar hadir dalam kehidupan sehari-hari warga. Penguatan layanan kesehatan ibu dan anak, pemenuhan gizi, serta jaminan kesehatan yang inklusif menjadi bagian dari kerja berkelanjutan pemerintah daerah.

“Kami memastikan layanan kesehatan, pencegahan, dan perlindungan jaminan kesehatan berjalan beriringan. Tujuannya jelas, agar setiap warga Kota Semarang memiliki kesempatan tumbuh sehat dan hidup lebih produktif,” tambahnya.

Capaian pengendalian stunting dan terwujudnya UHC 100 persen ini sejalan dengan prioritas pembangunan sektor kesehatan Kota Semarang yang menitikberatkan pada pencegahan, pemerataan layanan, dan perlindungan sosial. Pemerintah Kota Semarang optimistis, dengan fondasi kesehatan yang kuat, kualitas sumber daya manusia Kota Semarang dapat terus meningkat secara berkelanjutan.

Cegah Penumpukan Sampah Terulang, Pemkot Semarang Pasang Pagar, CCTV dan Tanam Pohon Penghijauan di Area TPS Muktiharjo Kidul



SEMARANG - Pemerintah Kota atau Pemkot Semarang memastikan penanganan persoalan sampah di TPS Muktiharjo Kidul, Kecamatan Pedurungan, dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan. Setelah pengangkutan dan pembersihan intensif yang terus dilakukan terhadap tumpukan sampah yang dimulai sejak Kamis (15/1) hingga Sabtu (17/1), langkah lanjutan difokuskan pada pengamanan dan penertiban agar lokasi tersebut tidak kembali mengalami penumpukan sampah.

Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng, sebelumnya telah menegaskan bahwa penanganan TPS Muktiharjo Kidul tidak berhenti pada pengangkutan sampah, melainkan dilanjutkan dengan penataan dan pengamanan lokasi. Kebijakan tersebut mencakup pengaturan ritasi pengangkutan, penambahan kontainer, hingga sterilisasi area yang selama ini disalahgunakan sebagai titik pembuangan liar.

Sebagai tindak lanjut arahan tersebut, Pj Sekretaris Daerah Kota Semarang, Budi Prakosa memimpin langsung pembersihan lanjutan TPS Muktiharjo Kidul, pada Sabtu (17/1). Kegiatan ini melibatkan kerja bakti lintas OPD dan unsur kewilayahan untuk memastikan area benar-benar bersih dan tertata.

Dalam penanganan tersebut, Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang mengerahkan dua alat berat jenis backhoe serta 20 unit dump truck. Sedangkan Disperkim menurunkan lima unit dump truck beserta tenaga kebersihan. Dinas Lingkungan Hidup menyiapkan satu alat berat, puluhan armada pengangkut sampah, serta empat unit kontainer yang disiagakan di lokasi. Satpol PP menurunkan tiga regu personel untuk pengawasan, sementara Dishub membantu pemasangan penerangan jalan umum agar aktivitas pengelolaan berjalan aman dan tertib.

Keterlibatan wilayah juga diperkuat. Kecamatan dan kelurahan memasang dua unit CCTV untuk memantau aktivitas di TPS, khususnya mencegah pembuangan sampah sembarangan oleh kendaraan roda empat atau pick-up yang seharusnya langsung menuju TPA. Tokoh masyarakat, ketua RW, LPMK,

Babinsa, dan Bhabinkamtibmas turut bergotong royong membersihkan sisa-sisa sampah yang tercecer di sekitar lokasi.

Selain pembersihan, Pemkot Semarang mulai melakukan pengamanan fisik kawasan. Area bekas TPS liar yang berada di lahan eks bengkok dipagari untuk mencegah area kembali dimanfaatkan sebagai tempat pembuangan. Per Sabtu (17/1), material pagar telah tiba dan proses pemasangan dilakukan oleh DLH. Penataan lingkungan juga dilakukan melalui penghijauan, dengan penanaman tabebuya oleh Disperkim serta tanaman buah seperti mangga dan sukun oleh DLH. Ke depan, lahan tersebut direncanakan difungsikan sebagai taman lingkungan.

Untuk memastikan pelayanan sampah tetap berjalan optimal, pembuangan difokuskan di TPS Muktiharjo Kidul yang berada bersebelahan dengan lokasi TPS liar. Di titik tersebut telah disiapkan empat kontainer yang dilayani empat armada armroll dengan tiga ritasi per hari. Selain itu, satu unit dump truck dikerahkan khusus untuk pembilasan area agar kondisi tetap bersih dan tidak menimbulkan bau.

Langkah berlapis ini menjadi wujud komitmen Pemkot Semarang dalam menata pengelolaan sampah secara lebih tertib, disiplin, dan berkelanjutan. Pemkot

Semarang juga mengajak masyarakat untuk mematuhi aturan pembuangan sampah sesuai peruntukannya agar lingkungan tetap bersih dan nyaman.

**Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng Dorong Bank Sampah Jadi Garda Depan
Pengendalian Sampah**



SEMARANG – Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng memberikan apresiasi tinggi terhadap pola pengelolaan sampah di Bank Sampah Alamanda, RW 01 Kelurahan Mangunsari, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang. Dalam kegiatan "Temu Warga Lokal" yang digelar pada Jumat (23/1), dirinya melihat langsung bagaimana sistem pemberdayaan masyarakat mampu mengubah beban sampah menjadi tabungan bernilai ekonomis yang memberikan manfaat nyata bagi warga.

“Saya sangat bangga melihat konsistensi warga di RW 01 Mangunsari ini. Mereka tidak lagi membuang sampah secara sembarangan, melainkan sudah memilahnya sejak dari rumah. Ini adalah contoh konkret masyarakat aktif dalam menjaga kebersihan lingkungannya,” ujarnya.

Agustina membeberkan jika Bank Sampah Alamanda menerapkan pemilahan sampah

berjenjang, mulai dari tingkat rumah tangga, kemudian dikumpulkan di unit RT, hingga pengolahan lanjutan di tingkat bank sampah. Di sana, sampah anorganik dipilah kembali berdasarkan jenis dan nilai ekonomisnya, lalu dikonversi menjadi saldo tabungan warga yang dapat dicairkan pada periode tertentu.

“Di sini, sampah plastik dan kertas dipilah sesuai jenis dan nilai ekonomisnya untuk dijual ke pengepul. Hasilnya tidak langsung habis, tapi dijadikan tabungan warga yang baru dibagikan saat akhir tahun atau menjelang Lebaran. Ini pola yang luar biasa karena membantu ekonomi keluarga sekaligus mengurangi beban TPA kita,” imbuhnya.

Keberhasilan Bank Sampah Alamanda yang secara konsisten menyabet predikat Juara I Lomba Proklam Tingkat Kota Semarang tahun 2024 hingga puncaknya meraih Penghargaan Proklam 2025 Kategori Utama dari Kementerian Lingkungan Hidup, menurut Wali Kota, menjadi bukti bahwa konsistensi, gotong royong, dan kepemimpinan warga dapat melahirkan sistem pengelolaan sampah yang kuat. Ia berharap model ini tidak berhenti di Mangunsari saja, melainkan menjadi

prototipe bagi ribuan RW lainnya di Semarang. Inovasi ini dianggap sebagai solusi paling efektif untuk menekan volume sampah kota dari hulu.

"Harapan saya, apa yang sudah dilakukan oleh Ibu Tri Kayati (Ketua Bank Sampah Alamanda – red) dan warga di sini bisa direplikasi di wilayah lain. Tidak harus sama persis, tetapi semangatnya: pilah dari rumah, tertib, dan dikelola bersama. Pemkot Semarang akan terus mendampingi agar ekosistem bank sampah makin merata dan berdaya. Jika semua wilayah mampu mandiri mengelola sampah, saya yakin persoalan lingkungan di Kota Semarang akan tuntas secara berkelanjutan," pungkasnya.

Perkuat Wisata Kampung Batik Rejomulyo, Wali kota Agustina Hadirkan Workshop Kampung Batik



Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng menegaskan komitmen Pemerintah Kota Semarang dalam menjaga keberlanjutan Kampung Batik Rejomulyo sebagai sentra batik ramah lingkungan sekaligus penguat identitas Batik Semarang. Hal tersebut disampaikan saat meninjau Kampung Batik Rejomulyo dalam rangkaian kegiatan Temu Warga Lokal Semarang Timur, Minggu (25/1/2026).

Dalam kunjungannya, Agustina mengapresiasi pengelolaan kawasan produksi batik yang telah dilengkapi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), sehingga memungkinkan proses membatik dengan pewarna alam. Menurutnya, langkah tersebut menunjukkan keseriusan Kampung Batik Rejomulyo dalam menjaga lingkungan tanpa meninggalkan nilai budaya.

“Wah ini keren, di belakangnya ada IPAL, jadi ini memang diniatkan untuk produksi batik dengan pewarna alam. Bukan hanya produksi kain batik dengan pewarna-pewarna biasa, Ini dengan pewarna alam.” ujar Agustina.

Tak hanya fokus pada produksi, Wali Kota juga menaruh perhatian pada upaya pelestarian sejarah Batik Semarang. Ia menyebut adanya gagasan dari pelaku batik setempat untuk menghadirkan museum batik yang menampilkan replika batik Semarang sejak era 1800–1900-an. Menurutnya, inisiatif tersebut menjadi nilai tambah yang penting bagi Kampung Batik Rejomulyo.

“Nantinya ada produk berkualitas yang akan diproduksi di sini selain dari produk UMKM batik yang sudah ada yang dikerjakan oleh Kampung Batik. Jadi kita ada upgrade nih ya dengan pengetahuan sejarah, dengan berbagai macam keahlian yang dimiliki,” jelasnya.

Agustina menambahkan, revitalisasi Kampung Batik Rejomulyo yang dilakukan Pemkot Semarang menjadi kado 20 tahun sejak kawasan tersebut mulai dikembangkan pada 2006. Revitalisasi tersebut menghadirkan kawasan yang lebih tertata,

ruang pameran yang bersih, serta lingkungan yang lebih representatif bagi pengrajin maupun pengunjung.

“Kalau kemarin kan tempatnya agak kurang cantik. Sekarang jadi luar biasa cantik sih, terus ruang pamernya juga jadi bersih. Sebelumnya kan sudah lama banget, tahun 2006.” katanya.

Terkait penguatan ekonomi warga, Agustina menegaskan peran Pemkot Semarang adalah mendorong promosi dan kenyamanan kawasan agar wisatawan datang dan berbelanja. “Tugas pemerintah kota itu meng-endorse, supaya pelancong datang ke sini, belanja aman dan nyaman, lalu kembali lagi,” pungkasnya.

Kurangi Risiko Banjir, Pemkot Semarang Gelar Kerja Bakti Bersih Sungai



SEMARANG – Pemerintah Kota atau Pemkot Semarang terus memperkuat upaya pencegahan banjir melalui pembersihan sungai secara menyeluruh dan berkelanjutan. Salah satunya dilakukan melalui kegiatan Karya Bakti Pembersihan Sungai yang digelar di Kembang Sari (depan Hotel MG Setos) Kecamatan Semarang Tengah, Jumat (30/1).

Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng menegaskan bahwa sungai menjadi simpul penting dalam menjaga keselamatan kota, terutama di wilayah padat aktivitas. Karena itu, pembersihan dilakukan tidak parsial, melainkan menyeluruh dengan melibatkan warga dan berbagai elemen masyarakat.

“Sungainya akan dibersihkan dari ujung ke ujung yang ada di Semarang Tengah. Ini kerja bersama dengan seluruh warga. Kalau seperti ini terus, sungai bersih dan tentu akan mengurangi kemungkinan banjir,” ujarnya.

Menurutnya, keterlibatan aktif warga masyarakat menjadi kunci keberhasilan menjaga keselamatan lingkungan. Dirinya ingin pola sinergi di Semarang Tengah ini menjadi standar baru bagi wilayah lain. “Kalau warga di kecamatan lain juga bisa bekerja sama seperti ini, Kota Semarang akan jauh lebih bersih. Dengan turun langsung, persoalan lapangan seperti tanggul rusak, pinggiran sungai yang sudah brogos (keropos), pohon-pohon yang sudah rimbun, atau hambatan teknis lainnya bisa segera kelihatan dan kita bereskan tanpa menunggu lama,” katanya.

Tidak hanya fokus pada mitigasi bencana, Agustina memproyeksikan jalan inspeksi sungai tersebut sebagai ruang publik produktif. Dia berencana menyulap jalur tersebut menjadi trek sepeda yang estetik guna mendukung sektor pariwisata kota.

“Jika jalan inspeksinya rapi dan rata, ini bisa jadi trayek sepeda. Orang sekarang senang bersepeda dan berjalan-jalan. Ini bisa kita upayakan,” katanya.

Menariknya, kegiatan Karya Bakti ini turut melibatkan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sebagai bagian dari semangat Semarang Damai, menegaskan

bahwa isu lingkungan adalah tanggung jawab bersama lintas komunitas.

"Kami akan terus memastikan kegiatan pembersihan sungai terus bergulir di Kota Semarang sebagai langkah nyata menjaga lingkungan, mengurangi risiko banjir, sekaligus meningkatkan kualitas hidup warga kota," pungkas Agustina.

IPM Kota Semarang Capai 85,80, Bukti Program Pembangunan Berjalan Efektif



SEMARANG – Kota Semarang mencatatkan sejarah dengan capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2025 kategori sangat tinggi sebesar 85,80, jauh melampaui rata-rata Jawa Tengah di angka 74,77. Prestasi ini didukung oleh Angka Harapan Hidup (UHH) yang mencapai 78,72 tahun (78 tahun, 8 bulan), serta Rata-rata Lama Sekolah (RLS) di angka 11,11 tahun, Harapan Lama Sekolah (HLS) di angka 15,58 tahun, dan Pengeluaran Per Kapita (PPP) sebesar 17,40 juta/orang/tahun.

"Capaian IPM yang jauh di atas rata-rata provinsi ini membuktikan efektivitas program kesejahteraan masyarakat yang berjalan dengan baik di Kota Semarang. Kami bangga karena angka harapan hidup 78 tahun ini mencerminkan kota yang semakin sehat dan layak huni bagi semua generasi," ujar Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng pada Rabu (14/1).

Pemerintah Kota atau Pemkot Semarang juga secara konsisten memperkuat fasilitas

kesehatan gratis melalui peningkatan cakupan Universal Health Coverage (UHC) dan mengoptimalkan peran Posyandu Lansia di setiap wilayah. Langkah ini memastikan bahwa tingginya umur panjang warga Kota Semarang berbanding lurus dengan kebugaran fisik dan akses medis yang mudah dijangkau.

"Kami memastikan layanan kesehatan tidak hanya tersedia di rumah sakit, tetapi juga menjemput bola hingga ke rumah-rumah lansia. Fasilitas publik seperti taman ramah lansia juga terus kami tambah agar kualitas hidup senior tetap terjaga secara mental dan sosial," tambahnya.

Selain sektor kesehatan, pertumbuhan ekonomi yang stabil mendukung daya beli masyarakat sehingga kebutuhan gizi dan pendidikan terpenuhi dengan sangat baik. Sinergi antara infrastruktur inklusif dan jaminan sosial menjadikan kota Semarang sebagai model kota ramah lansia yang unggul di Indonesia.

"Pencapaian luar biasa pada tahun 2025 ini adalah hasil kerja keras kita bersama dalam membangun ekosistem kota yang manusiawi dan inklusif. Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan standar pelayanan agar

kesejahteraan ini dirasakan merata oleh seluruh warga hingga usia senja," tutupnya.

**Iuran ASN Lindungi Pekerja Rentan, Bu Ngatimah Rasakan Manfaat Program ASN
Peduli Pekerja Rentan Kota Semarang**



Bu Ngatimah, warga Kota Semarang yang sehari-harinya bekerja serabutan, beberapa waktu lalu mengalami kecelakaan saat membantu tetangganya yang sedang menggelar hajatan hingga harus mendapatkan perawatan medis di RSUD K.R.M.T. Wongsonegoro.

Dalam kondisi ekonomi keluarga yang terbatas dan dengan penghasilan suami yang tidak tetap, Bu Ngatimah tetap dapat menjalani perawatan hingga dinyatakan sembuh tanpa terbebani biaya. Seluruh biaya pengobatan ditanggung melalui BPJS Ketenagakerjaan, berkat kepesertaan yang diperoleh dari Program ASN Peduli Pekerja Rentan Kota Semarang.

Bu Ngatimah merupakan salah satu pekerja sektor informal yang masuk kategori pekerja rentan, yakni warga yang bekerja dengan penghasilan tidak tetap dan memiliki risiko tinggi saat mengalami kecelakaan kerja.

Iuran BPJS Ketenagakerjaan Bu Ngatimah dibayarkan melalui skema gotong royong ASN, dalam hal ini oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang.

Kisah Bu Ngatimah menunjukkan manfaat nyata perlindungan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja informal. Ketika risiko kerja terjadi, pekerja tetap memperoleh akses layanan kesehatan dan perlindungan, sehingga tidak jatuh pada beban ekonomi yang lebih berat.

Program ASN Peduli Pekerja Rentan merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kota Semarang dalam memperluas cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, sejalan dengan arahan pemerintah pusat. Di tingkat daerah, komitmen tersebut diperkuat melalui Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 26 Tahun 2025 tentang Pelindungan Sosial Pekerja Rentan, yang memungkinkan pembiayaan iuran bersumber dari APBD maupun non-APBD, termasuk partisipasi ASN.

Berdasarkan data tahun 2025, cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan di Kota Semarang telah mencapai 51,59 persen. Pemerintah Kota Semarang

menargetkan peningkatan cakupan hingga 71,59 persen, atau setara dengan perlindungan tambahan bagi sekitar 170 ribu tenaga kerja. Program ASN Peduli Pekerja Rentan menjadi salah satu langkah percepatan untuk menjangkau pekerja sektor informal yang selama ini belum terlindungi.

Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng, menegaskan bahwa perlindungan pekerja rentan merupakan bagian dari upaya menjaga ketahanan sosial masyarakat. Menurutnya, jaminan sosial ketenagakerjaan memastikan negara hadir ketika warga menghadapi risiko kerja yang tidak terduga.

“Program ini dirancang agar pekerja informal tetap memiliki rasa aman saat bekerja. Ketika risiko terjadi, mereka tidak dibiarkan menghadapi beban itu sendirian,” ujar Agustina.

Ke depan, Pemerintah Kota Semarang terus mendorong partisipasi ASN serta memperkuat kolaborasi dengan BPJS Ketenagakerjaan agar semakin banyak pekerja rentan di Kota Semarang memperoleh perlindungan sosial ketenagakerjaan secara berkelanjutan dan tepat sasaran.

**Pemkot Semarang Umumkan Peralihan Layanan PJU ke Dinas Perhubungan Kota
Semarang Mulai 2026 SEMARANG**



Pemerintah Kota Semarang resmi mengumumkan bahwa mulai Januari 2026, seluruh pelayanan dan pengaduan terkait Penerangan Jalan Umum (PJU) di Kota Semarang beralih ke Dinas Perhubungan Kota Semarang. Kebijakan tersebut berdasarkan

Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 41 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit

Pelaksana Teknis Dinas Penerangan Jalan Umum Wilayah I dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Penerangan Jalan Umum Wilayah II pada Dinas Perhubungan.

Melalui peralihan ini, Pemerintah Kota Semarang menata kembali pengelolaan PJU agar pelayanan kepada masyarakat dapat dilakukan lebih efektif. Penataan tersebut diharapkan mampu mendukung pengelolaan

penerangan jalan yang lebih efektif, terkoordinasi, dan

responsif terhadap kebutuhan masyarakat di berbagai wilayah Kota Semarang.

Penataan layanan PJU melalui Dinas Perhubungan Kota Semarang ini dilakukan untuk

mendukung keselamatan, kenyamanan, dan keamanan pengguna jalan, sekaligus

meningkatkan respons terhadap aduan masyarakat. Penerangan jalan yang berfungsi dengan baik diharapkan dapat mengurangi risiko kecelakaan lalu lintas serta meningkatkan rasa aman masyarakat, khususnya pada malam hari.

Seiring dengan kebijakan tersebut, masyarakat dapat menyampaikan laporan maupun

pengaduan PJU melalui kanal resmi Dinas Perhubungan Kota Semarang, yakni layanan

WhatsApp 0822-5000-8448, Call Center 112, serta nomor (024) 866-232-9. Selain itu, informasi terkait PJU juga dapat diakses melalui akun Instagram resmi Dinas Perhubungan

Kota Semarang, @dishubkotasmg.

Pemerintah Kota Semarang menghimbau kepada masyarakat untuk menyertakan lokasi secara jelas agar penanganan laporan dapat dilakukan secara optimal.

Selain pengaduan, Pemerintah Kota Semarang juga menginformasikan bahwa masyarakat dapat mengajukan permohonan PJU melalui proposal tertulis yang ditujukan kepada Wali Kota Semarang dengan tembusan Dinas Perhubungan Kota Semarang. Proposal tersebut wajib dilengkapi tanda tangan & stempel dari perangkat wilayah setempat, seperti RT, RW, Kelurahan, Kecamatan, serta kontak pemohon.

Melalui peralihan kewenangan dan penataan layanan ini, Pemerintah Kota

Semarang

berharap pelayanan PJU dapat berjalan lebih efektif, merata, dan berkelanjutan, sekaligus mendukung terciptanya lingkungan kota yang aman dan nyaman bagi seluruh masyarakat di Kota Semarang.

Pemkot Semarang Komitmen Dorong UMKM Bisa Ekspor Produk ke Luar Negeri



SEMARANG - Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng, menegaskan komitmen Pemerintah kota atau Pemkot Semarang untuk membawa produk kerajinan (craft) lokal Kota Semarang naik kelas ke kancah internasional. Hal tersebut disampaikan dalam acara Coffee Morning Dekranasda Kota Semarang bertajuk "Strategi Penguasaan Etsy dan Amazon Store untuk Produk Craft Lokal" yang digelar di Hotel Santika Premiere belum lama ini.

"Hari ini kita sudah mengumumkan kepada publik bahwa kita akan bekerja keras lagi untuk dapat membawa pengrajin, UMKM, pengusaha Kota Semarang ini ekspor," ungkap Agustina.

Acara ini menghadirkan narasumber berkompeten, di antaranya Ari Satria (Direktur Pengembangan Ekspor Jasa dan Produk Kreatif Kemendag RI) dan Anna Melissa Nava (CEO 1Export Manila). Agustina menjelaskan bahwa pelaku UMKM harus memahami karakteristik platform

digital global. Etsy dinilai cocok untuk produk yang mengedepankan keunikan dan sentuhan personal (handmade), sementara Amazon Store memerlukan kesiapan manajemen logistik dan volume produksi yang lebih besar.

"Setidaknya, meski belum bisa ekspor tapi kita bisa menghasilkan produk berkualitas ekspor. (Meningkatkan) kualitas dulu, belajar dulu," lanjut Agustina.

Ia menyampaikan bahwa Kota Semarang saat ini fokus pada pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berbasis kekuatan lokal. Menurutnya, produk craft bukan sekadar barang dagangan, melainkan pertemuan antara budaya, identitas kota, dan keterampilan masyarakat.

"Terima kasih atas perhatian Dekranasda. Dekranasda itu isinya para pengusaha yang memiliki komitmen untuk meningkatkan derajat ekonomi dan kehidupan pengrajin UMKM," kata Agustina.

Kegiatan ini dihadiri oleh sekitar 100 peserta, termasuk jajaran Kepala OPD, pengurus Dekranasda, perwakilan UMKM, asosiasi usaha, serta pihak Bank Indonesia dan BUMD. Melalui langkah strategis ini,

Pemerintah Kota Semarang optimis produk kreatif warga lokal dapat merambah pasar dunia dengan identitas dan tanggung jawab lingkungan yang kuat.

"Semoga Coffee Morning ini melahirkan sinergi konkret antara pemerintah, perbankan, dan pelaku UMKM untuk memperkuat daya saing produk kita," pungkas Agustina.

Beri Layanan Pemeriksaan Kesehatan Terintegrasi 1.200 Pekerja Dalam 5 Hari, Pemkot Semarang Raih Rekor MURI



SEMARANG-Pemerintah Kota atau Pemkot Semarang kembali mencatat capaian penting dalam layanan kesehatan masyarakat, khususnya bagi para pekerja. Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng menerima penghargaan Rekor MURI atas pencapaian pemeriksaan kesehatan terintegrasi melalui platform Satu Sehat pada pekerja di perusahaan terbanyak, yakni 53 perusahaan dalam kurun waktu lima hari.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh perwakilan Museum Rekor-Dunia Indonesia (MURI) kepada Agustina Wilujeng serta disaksikan Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin dalam rangkaian peringatan Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), bertempat di Aula Gedung Penunjang RSUP Dr. Kariadi, Selasa (10/2).

Kegiatan pemeriksaan kesehatan gratis bagi pekerja tersebut dilaksanakan oleh RSUP Dr. Kariadi bekerja sama dengan Dinas

Kesehatan dan Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang. Program ini menjangkau 1.200 orang pekerja dari 53 perusahaan di Kota Semarang dan dilaksanakan pada 26–30 Januari 2026. Seluruh hasil pemeriksaan tercatat dalam platform Satu Sehat sebagai bagian dari sistem informasi kesehatan nasional.

Agustina menyampaikan bahwa capaian tersebut merupakan hasil kerja cepat lintas sektor di Kota Semarang. “Ini adalah kerja cepat dari dinas yang hari ini ada di Dinas Tenaga Kerja dan Dinas Kesehatan bekerja sama dengan Rumah Sakit Kariadi. Dalam waktu lima hari, pemeriksaan kesehatan gratis dapat menjangkau 53 perusahaan dan akhirnya tembus rekor MURI,” ujar Agustina.

Dirinya juga menyampaikan apresiasi atas dukungan Kementerian Kesehatan dalam pelaksanaan pemeriksaan kesehatan gratis secara masif hingga menjangkau fasilitas layanan kesehatan di daerah.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin menegaskan pentingnya pemeriksaan kesehatan rutin sebagai langkah pencegahan

dini. Menurutnya, upaya menjaga kesehatan jauh lebih efektif dilakukan sejak awal.

“Kalau ditunggu sampai sakit, nanti lebih mahal dan kualitas hidup juga lebih jelek. Tahun ini setelah dicek, kalau tidak sehat harus diobati, dan obatnya juga gratis,” kata Menkes.

Agustina menambahkan bahwa pesan tersebut menjadi perhatian Pemkot Semarang, terutama terkait tindak lanjut setelah pemeriksaan dilakukan. “Pesan beliau, pemeriksaan gratis lebih rutin dan setelah itu follow up-nya, kalau yang bersangkutan sakit harus segera diobati,” katanya.

Momentum Bulan K3 ini sekaligus menjadi pengingat bahwa keselamatan kerja harus berjalan seiring dengan kesehatan pekerja secara menyeluruh. Pemeriksaan kesehatan terintegrasi menjadi salah satu langkah nyata dalam pencegahan dini penyakit, peningkatan produktivitas, serta perlindungan jangka panjang.

Pemkot Semarang berharap pencapaian ini bisa menjadi pemicu semangat bagi dunia usaha untuk semakin aktif memastikan kesehatan pekerja melalui sistem yang terukur, terintegrasi, dan berkelanjutan.

Kurangi Risiko Banjir, Pemkot Semarang Kembali Gelar Aksi Bersih-bersih Sungai



SEMARANG - Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng bersama berbagai elemen masyarakat dan jajaran Pemerintah Kota Semarang mengikuti pelaksanaan Aksi Bersih Sampah Serentak se-Jawa Tengah di Kota Semarang, Selasa (24/2). Pelaksanaan aksi di seluruh kabupaten/kota se-Jawa Tengah tersebut dikoordinir oleh Gubernur Jawa Tengah dari Pantai Jodo, Kabupaten Batang, yang sekaligus memimpin kegiatan tingkat provinsi.

Di Kota Semarang, aksi dipusatkan di Kali Tawang Mas, Kelurahan Tawangmas, Kecamatan Semarang Barat. Rangkaian kegiatan diawali apel yang dipimpin langsung Wali kota. Kemudian dilanjutkan pembersihan sungai, penanaman pohon, dan dialog secara daring dengan Gubernur Jawa Tengah.

Dalam laporannya kepada Gubernur, Agustina menyampaikan bahwa Kota Semarang merupakan wilayah muara berbagai aliran sungai, termasuk yang

terhubung dengan Kabupaten Demak. Karena itu, sumbatan sampah menjadi salah satu faktor risiko banjir yang harus ditangani serius.

“Habis sahur langsung bersih-bersih sungai. Kami ini (Kota Semarang - red) muara dari berbagai macam aliran air dari atas. Maka yang penting bagi kami, sampahnya harus pergi dari sungai,” ujar Agustina.

Ia menjelaskan, pada Sabtu (21/2) lalu pembersihan telah dilakukan di Sungai Jaten dengan hasil 1,4 ton sampah dan melibatkan sekitar 350 warga. Sementara pada aksi di Kali Tawang Mas hari ini, terkumpul sekitar 1,1 ton sampah serta dua dump truck material hasil pengerukan, dengan partisipasi kurang lebih 450 orang.

Agustina mengakui tantangan utama saat ini adalah keterbatasan alat berat dibanding panjang dan jumlah sungai yang harus dibersihkan. Meski demikian, ia menilai tren partisipasi masyarakat terus meningkat dari waktu ke waktu.

Untuk memperkuat sistem, Pemerintah Kota Semarang telah membentuk Satgas Berlian (Bersih Sungai dan Lingkungan) di setiap kelurahan sejak akhir 2025. Satgas ini bertugas memantau dan menangani titik

sumbatan sampah, terutama saat curah hujan tinggi.

“Begitu ada laporan di grup, titiknya langsung kita tangani. Ini membuat respons kita jauh lebih cepat,” jelasnya.

Langkah tersebut melengkapi strategi pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Saat ini, Kota Semarang memiliki 1.074 unit bank sampah dan pada tahun 2026 ditargetkan terus bertambah.

Gerakan ini sekaligus memperkuat semangat Semarang Wegah Nyampah, yang mendorong kesadaran bahwa sampah yang dihasilkan adalah tanggung jawab masing-masing. Melalui perubahan perilaku dari hulu, Pemerintah Kota Semarang berupaya memastikan sungai kembali pada fungsinya sebagai saluran air, bukan tempat pembuangan.

Selain pembersihan sampah, kegiatan juga diisi penanaman pohon di bantaran sungai sebagai langkah jangka panjang guna memperkuat kualitas lingkungan dan menjaga keseimbangan ekosistem kawasan.

Dalam dialog secara daring bersama Gubernur Jawa Tengah, Agustina juga menyampaikan bahwa Kota Semarang telah masuk dalam skema Proyek Strategis Nasional pengolahan sampah menjadi energi

(_waste to energy_). Secara administratif proses telah berjalan dan pemerintah daerah menunggu arahan lebih lanjut dari pemerintah pusat terkait investor yang akan terlibat.

Melalui aksi serentak ini, Pemerintah Kota Semarang menegaskan komitmennya menjaga fungsi sungai tetap optimal, mengurangi risiko banjir, serta membangun budaya tanggung jawab lingkungan yang kuat di tengah masyarakat.

Gerakan ini akan terus dilanjutkan secara berkala di berbagai titik sungai di Kota Semarang sebagai bagian dari upaya menjaga kota tetap aman, sehat, resik, dan indah.

**Peringati Hari Peduli Sampah Nasional, Pemkot Semarang dan Elemen Masyarakat
Kolaborasi Resik-resik Kali Jaten**



SEMARANG - Aliran Sungai Jaten di Kelurahan Pudak Payung, Kecamatan Banyumanik, kini tampak lebih bersih. Tumpukan sampah yang sebelumnya menyangkut di badan sungai berhasil diangkat melalui kerja bersama warga, Satgas Sungai, jajaran OPD, komunitas, hingga unsur pendidikan dalam kegiatan peringatan Hari Peduli Sampah Nasional atau HPSN tingkat kota Semarang di TPS Pudak Payung pada Sabtu (21/2).

Bagi warga sekitar sungai, dampaknya terasa langsung. Aliran air menjadi lebih lancar, potensi sumbatan di bawah jembatan berkurang, dan kekhawatiran luapan saat hujan deras dapat ditekan. Upaya ini menjadi langkah antisipatif di tengah musim penghujan, ketika sampah kerap memperparah risiko genangan dan banjir.

Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng yang hadir langsung dalam kegiatan resik-

resik kali tersebut, menjelaskan bahwa Sungai Jaten dipilih sebagai lokasi aksi karena kondisinya membutuhkan penanganan kolaboratif.

“Kita memilih satu lokasi yang impossible jika dikerjakan warga sendiri. Maka kita gandeng berbagai elemen, termasuk tentara, peserta Proklamasi, sekolah Adiwiyata, dan masyarakat sekitar,” ujar Agustina.

Sebelumnya, dirinya menerima laporan dan dokumentasi dari warga mengenai banyaknya sampah yang menumpuk di aliran sungai tersebut. Kondisi itu dinilai berisiko menghambat arus air, terutama saat curah hujan tinggi.

“Sebagian banjir disebabkan oleh sampah. Ketika sampah menyangkut di bawah jembatan, aliran air terhambat dan bisa meluap. Membersihkan sungai ini adalah langkah antisipasi,” lanjutnya.

Selain pembersihan fisik di badan dan bantaran sungai, Pemerintah Kota Semarang juga menyerahkan kantung pilah sampah kepada warga. Pembagian ini ditujukan untuk mendorong perubahan perilaku dari tingkat rumah tangga, agar sampah tidak lagi berakhir di sungai.

“Kalau kita memproduksi sampah, maka sejak dari tangan kita pertama kali harus dibuang di tempatnya. Di rumah, sampah sebaiknya sudah dipilah yang organik dan plastik. Maka hari ini kita bagikan kantung pilah sampah sebagai pemicu,” kata Agustina.

Kegiatan ini melibatkan berbagai unsur, antara lain OPD di Kota Semarang, camat dan lurah setempat, pengurus dan koordinator bank sampah, Saka Kalpataru, Satgas Bersih Lingkungan (Satgas Sungai), sekolah Adiwiyata, komunitas, serta warga Gedawang dan Puduk Payung.

Aksi bersih Sungai Jaten tersebut merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) yang diperingati setiap 21 Februari sebagai momentum peningkatan kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan sampah berkelanjutan.

Melalui penguatan Satgas Berlian (Bersih Lingkungan dan Sungai), Pemerintah Kota Semarang juga mendorong keterlibatan warga yang tinggal di sekitar bantaran sungai untuk aktif menjaga kebersihan lingkungan. Gerakan kurve atau kerja bakti rutin terus diperkuat guna memastikan saluran air tetap bebas dari sampah.

Pemkot Semarang menegaskan bahwa pengendalian sampah dimulai dari rumah tangga. Sungai yang bersih hari ini adalah hasil kerja bersama. Ketika warga disiplin memilah dan membuang sampah pada tempatnya, dampaknya kembali kepada masyarakat: lingkungan lebih sehat, aliran air lancar, dan risiko banjir dapat ditekan.

15 Rumah Terdampak Tanah Gerak di Jangli, Pemkot Semarang Siapkan Opsi Relokasi



SEMARANG – Wali kota Semarang, Agustina Wilujeng meninjau langsung lokasi terjadinya pergerakan tanah di wilayah RT 7 RW 1, Kelurahan Jangli, Kecamatan Tembalang pada Rabu (11/2) sore.

Sebanyak 15 rumah dilaporkan terdampak, dengan dua rumah di antaranya terpaksa dibongkar karena mengalami kerusakan parah dan berisiko roboh.

Usai tinjauan Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng mengatakan peristiwa tanah gerak ini bukan kali pertama terjadi di Kota Semarang. Sebelumnya, kejadian serupa juga pernah terjadi di wilayah Jomblang.

“Terkait relokasi, tentu harus ditemukan tempat yang cukup. Ada yang setuju relokasi, ada yang menolak. Nanti akan didata dulu, mana yang mau dan mana yang tidak,” ujar Agustina.

Menurutnya, Pemkot Semarang telah menyiapkan beberapa alternatif lokasi

relokasi. Namun, untuk jangka pendek, langkah darurat yang dilakukan adalah memastikan keselamatan warga terdampak.

“Yang paling penting anak-anak yang sekolah harus tetap bisa sekolah. Untuk sementara saya sarankan sebagian warga mengungsi dulu ke sanak saudara,” katanya.

Ia juga telah meminta camat dan lurah setempat untuk meningkatkan kewaspadaan, termasuk memasang pengeras suara sebagai sistem peringatan dini karena lokasi tidak bisa ditinggalkan begitu saja.

Terkait anggaran relokasi maupun penanganan di lokasi terdampak, Pemkot Semarang masih melakukan pembahasan lebih lanjut.

Sementara itu, Ketua RT 7 RW 1 Jangli, Joko Sudaryono, mengatakan warga saat ini melakukan gotong royong dan kerja bakti membongkar rumah yang dinilai membahayakan guna mengamankan material bangunan.

“Total ada 15 rumah terdampak. Hari ini yang dibongkar dua rumah yang kondisinya paling parah, milik Bapak Slamet Riyadi dan Bapak Budi Darminto. Sebelumnya ada satu rumah yang roboh sendiri, milik Bapak Supriadi,” jelasnya.

Ia menambahkan, satu rumah lainnya milik warga bernama Supardi mengalami pergeseran cukup parah sehingga harus dikosongkan.

Untuk sementara, warga yang rumahnya masih layak huni tetap bertahan dengan meningkatkan kewaspadaan. Setiap malam, warga memberlakukan ronda dan pemantauan guna mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan.

“Kalau yang rumahnya berisiko tinggi, kami imbau untuk waspada. Saat ini BPBD juga telah mendirikan tenda pengungsian yang diperuntukkan bagi warga terdampak,” katanya.

Pergerakan tanah di Jalan Jangli, dilaporkan terus bertambah. Sejak tadi malam hingga pagi hari, tanah bergerak sekitar dua meter, sehingga lebar retakan kini mencapai kurang lebih lima meter dan tidak bisa lagi dilalui kendaraan, termasuk sepeda motor.

“Radius terdampak kurang lebih 70 meter. Tapi masih di wilayah RT 7 RW 1,” tambah Joko.

Warga berharap adanya relokasi ke lokasi yang lebih aman, namun masih berada di sekitar tanah yang sama. Menurut Joko, masih terdapat lahan yang memungkinkan

untuk relokasi sekitar 15 rumah terdampak, meski luasnya terbatas.

Pemkot Semarang Perjuangkan Festival Dugderan Jadi Warisan Budaya Indonesia



SEMARANG – Pemerintah Kota Semarang resmi membuka Festival Pasar Rakyat Dugderan 2026 di kawasan Alun-alun Masjid Agung Semarang (Kauman), Sabtu (7/2). Mengusung tema “Bersama dalam Budaya, Toleransi dalam Tradisi,” festival tahunan ini akan berlangsung selama sepuluh hari hingga 16 Februari 2026.

Kemeriahan pembukaan semakin terasa dengan hadirnya panggung hiburan yang menampilkan kesenian lokal dan musik "Dangdut Jadoel" dari Orkes Melayu (OM) Lorenza. Tidak hanya hiburan modern, nuansa nostalgia juga dihadirkan melalui penggunaan busana tempo dulu oleh jajaran pejabat Pemerintah kota atau Pemkot Semarang serta kehadiran mainan ikonik seperti kapal otok-otok, celengan gerabah, hingga kerajinan gerabah yang menjadi memori kolektif warga lintas generasi.

“Ini adalah tradisi yang dilakukan sejak zaman Belanda masih menjajah Indonesia. Tahun ini kita buat lebih ramai. Dengan tema,

teknik, kita pakai baju-baju jadul. Mungkin tahun depan temanya apa lagi, yang menarik,” ungkap Agustina Wilujeng, Wali Kota Semarang.

Kawasan sepanjang Jalan Ki Narto Sabdo hingga Alun-alun Barat kini disulap menjadi pusat ekonomi kerakyatan dengan zonasi yang tertata rapi. Ratusan pelaku UMKM dan Pedagang Kaki Lima (PKL) binaan turut berpartisipasi menjajakan produk lokal, kuliner, hingga mainan tradisional.

“Biarlah alun-alun ini kita pakai secara maksimal untuk ruang publik. Dugderan harus menjadi panggung rakyat, semua orang yang ingin jualan biarin aja jualan. Yang penting tertib dan pelaku usaha kecil itu yang menjadi paling utama prioritas,” lanjut Agustina.

Antusiasme pedagang kuliner tampak dari ramainya lapak yang berjajar di sepanjang koridor Jalan Ki Narto Sabdo hingga area Alun-alun. Salah satu pedagang, Lis, mengaku senang karena dagangannya sempat dicicipi langsung oleh Agustina saat peninjauan lokasi.

“Senang, suka, katanya enak gitu. Ke depannya harapan saya bisa berjalan lancar, bisa langgeng. Ini kuliner bisa berjalan terus,

tambah ramai pedagangnya gitu, tambah ramai pengunjungnya,” ujar Lis.

Selain sebagai ajang hiburan, Pemerintah Kota Semarang kini tengah memperjuangkan Festival Dugderan agar mendapatkan pengakuan yang lebih kuat sebagai Warisan Budaya Indonesia. Langkah ini diambil agar nilai sejarah dan identitas kota tetap terjaga.

“Sekarang kita sedang berjuang pasar Dugderan ini menjadi bagian dari warisan budaya Indonesia. Doakan ya, kalau ini menjadi warisan budaya siapapun wali kotanya itu wajib mengadakan pasar Dugderan,” lanjut wali kota.

Agustina juga menegaskan koordinasi lintas sektor antara Disdag, Dishub, Satpol PP, hingga aparat keamanan juga telah disiapkan untuk memastikan rekayasa lalu lintas dan kebersihan kawasan tetap terjaga selama sepuluh hari ke depan.

“Mudah-mudahan ini tetap ramai sampai dengan tanggal 16 ya. Nanti kita akan akhiri dengan arak-arakan Dugderan dari Balaikota ke Masjid Kauman,” tandasnya.

TPS Bugen Diresmikan, Buka Peluang Ekonomi Pilah Sampah Warga Tlogosari Wetan



SEMARANG - Wali kota Semarang, Agustina Wilujeng Kamis (5/2) meresmikan Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Bugen yang berlokasi di Kelurahan Tlogosari Wetan, Kecamatan Pedurungan. TPS ini berbeda dari TPS - TPS lainnya di mana TPS Bugen dirancang tidak hanya sebagai lokasi penampungan sampah sementara, tetapi juga sebagai sarana edukasi dan gerakan sadar lingkungan bagi masyarakat setempat.

“TPS Tlogosari Wetan bukan sekadar fasilitas, tetapi simbol kebersamaan kita. Dengan TPS ini, warga dapat memilah sampah dari sumbernya sehingga volume sampah yang dibuang ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dapat dikurangi,” ujar Agustina.

Acara peresmian yang berlangsung di tengah antusiasme warga ini menandai komitmen Pemerintah Kota Semarang untuk memperkuat sistem pengelolaan sampah berbasis komunitas.

Agustina juga menyoroti persoalan klasik penempatan TPS yang kerap ditolak masyarakat. “Kalau TPS di pinggir jalan dibilang jelek. Di tengah permukiman juga diprotes. Tapi setiap orang menghasilkan sampah. Mau dibuang ke mana kalau tidak ada TPS?” ungkapnya.

Karena itu, TPS Bugen disebut sebagai satu dari sedikit TPS yang dibangun tanpa penolakan warga, dan akan dijadikan pilot project TPS percontohan Kota Semarang.

Agustina juga menegaskan bahwa TPS Bugen disiapkan lebih dari sekadar titik buang sampah. Lokasi ini akan dikembangkan menjadi pusat budidaya maggot (larva Black Soldier Fly) untuk mengolah sampah organik, bekerja sama dengan tokoh masyarakat dan jejaring lingkungan hidup serta akademisi.

Sebagai bagian dari ekosistem pengolahan organik, Agustina juga mendorong koordinasi dengan dapur-dapur produksi makanan seperti SPPG/MBG agar sampah organik dipilah dan disalurkan sebagai pakan maggot.

“Kalau kita ingin perubahan dalam budaya bersih kota, prosesnya memang harus dimulai dari TPS. TPS ini harus hidup secara

ekonomi, memberi manfaat bagi yang mengelola, dan berdampak bagi lingkungan,” tambahnya.

Menurut data profil pengelolaan limbah perkotaan, total timbulan sampah di Semarang mencapai lebih dari 1.200 ton per hari, dan hanya sebagian yang dikelola dengan prinsip 3R atau melalui pengumpulan formal.

Selain itu, sampah yang menyumbat saluran air dan sungai sering menjadi penyebab genangan saat musim hujan di kawasan timur kota, termasuk di wilayah sekitar Tlogosari. Kondisi ini menjadi pengingat pentingnya pengelolaan sampah yang sistematis dari tingkat RT/RW hingga kota.

Kelurahan Tlogosari Wetan, dengan luas wilayah sekitar 1,25 km² dan struktur permukiman padat, menghadapi tantangan kolektif dalam mengelola sampah rumah tangga secara efisien. Musim hujan dan dataran rendah di beberapa bagian wilayah menyebabkan bahan organik dan plastik yang dibuang sembarangan mudah terbawa oleh aliran air permukaan, memperparah permasalahan lingkungan.

Dengan diresmikannya TPS ini, diharapkan partisipasi aktif warga dalam pemilahan, pengurangan dan pemanfaatan ulang sampah

akan meningkat. Wilayah setempat bahkan telah dikenal turut menjalankan program bank sampah yang memberi nilai ekonomi terhadap sampah yang dikumpulkan, sehingga mendukung kesejahteraan masyarakat sekaligus melestarikan lingkungan.

Agustina menyampaikan bahwa pemerintah akan terus mengawal pengoperasian TPS ini dengan program pendampingan dan sosialisasi. “Program ini harus menjadi inspirasi lintas kelurahan, karena kota bersih dimulai dari rumah kita sendiri,” tambahnya.

Peresmian TPS Tlogosari Wetan disambut baik oleh tokoh masyarakat dan kader lingkungan. Sejumlah warga menyampaikan optimisme bahwa fasilitas ini akan meningkatkan kebersihan lingkungan serta membuka peluang ekonomi dari pemanfaatan sampah terpilah.

Lintas OPD Pemkot Semarang Kolaborasi Atasi Persoalan Sampah



SEMARANG - Penanganan dan pengendalian sampah di Kota Semarang tak hanya menjadi tugas Dinas Lingkungan Hidup (DLH) saja. Kolaborasi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terus dilakukan guna mewujudkan program Semarang Bersih.

Kecamatan Semarang Tengah salah satunya. Melalui inovasi pembentukan “Tim Oren” di masing-masing Kelurahan dan Kecamatan, dinilai mampu menangani penumpukan sampah liar yang bertebaran di tepi jalan protokol.

Camat Semarang Tengah Aniceto Magno Da Silva menyebut Tim Oren sudah ia bentuk sejak 4 tahun silam. Pembentukan Tim Oren ini bermula atas keprihatinannya karena masih banyak masyarakat yang membuang sampah di tepi jalan protokol sehingga merusak estetika kota.

“Itu sejak saya masuk (menjadi camat) Semarang Tengah lalu bentuk Tim Oren.

Saya lihat banyak sampah dibuang hampir di jalan protokol, kita membantu tugas dari DLH jadi tidak hanya menunggu DLH angkutin jadi kita inisiatif,” kata camat yang biasa disapa pak Moy, Senin (2/2).

Dalam membentuk Tim Oren, dirinya menggandeng Kelurahan dan LPMK untuk menjadi relawan atau bagian dari Tim Oren ini. “Mereka bertugas mengambil sampah di jalan protokol, jalan kampung yang tidak terjangkau DLH. Mereka cukup ambil lalu buang ke TPS yang ada di Semarang Tengah lalu dari TPS diangkut DLH sampai ke TPA,” bebernya.

Tim Oren Kecamatan Semarang Tengah ini beranggotakan 32 orang dari 15 kelurahan dan 1 kecamatan.

Menurutnya Tim Oren mulai bergerak untuk mengambil sampah liar sejak pukul 04.00 pagi. Tak hanya mengambil sampah liar, Tim Oren juga membantu memotong rumput liar hingga membantu membersihkan saluran air dari sampah.

“Mereka dari jam 4 pagi sudah bergerak pungut sampah, mereka juga potong rumput liar seperti di Jalan Pemuda, Gajahmada, Simpang Lima,” kata dia.

Tak hanya berinisiatif untuk membersihkan sampah, ia mengatakan jika ada warga Semarang Tengah yang membutuhkan bantuan dalam pembuangan sampah juga bisa langsung meminta bantuan pada Tim Oren.

“Kalau warga mau minta tolong ada sampah di saluran, atau rumput liar tinggi bisa kontak kami,” pungkasnya.

Pemkot Semarang Gercep Tangani Banjir di Rowosari dan Meteseh, Tembalang



SEMARANG - Pemerintah Kota atau Pemkot Semarang bergerak cepat menangani banjir yang terjadi di sejumlah wilayah di Kecamatan Tembalang pada Senin (16/2) dini hari. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Semarang langsung melakukan evakuasi warga, *_assessment_* lapangan, serta menyiapkan dukungan logistik untuk memastikan keselamatan masyarakat yang terdampak.

Sebagaimana diketahui hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi mengguyur wilayah Kota Semarang dan daerah hulu sekitar pukul 02.00 dini hari, sehingga Kali Babon tidak mampu menampung debit air. Akibatnya, genangan muncul di beberapa titik di Kelurahan Rowosari dan Meteseh, di antaranya Perumahan Argo Residence dan Grand Permata Tembalang di Rowosari, serta Grand Batik Semarang di Meteseh.

Berdasarkan data BPBD Kota Semarang, total ratusan warga terdampak, termasuk 110

kepala keluarga di Grand Permata Tembalang. Sebanyak 18 jiwa, terdiri dari 12 orang dewasa dan enam balita, mengungsi di Masjid Iktifal Al Barokah untuk sementara waktu.

Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Semarang, Riyanto, mengatakan pihaknya langsung merespons cepat sejak awal kejadian dengan menurunkan personel ke lokasi terdampak. “Kita dari BPBD tim yang malam itu bertugas langsung terjun ke lapangan. Jadi kita *_full time_*. Jadi kita 24 jam terbagi 3 shift. Pada malam kejadian jam 2 kita meluncur,” ujarnya.

Menurut Riyanto, banjir dipicu tingginya curah hujan di wilayah hulu, khususnya di Kabupaten Semarang, yang menyebabkan peningkatan debit air hingga meluap ke wilayah Kota Semarang. “Permasalahannya ini di Kali Babon memang curah hujannya dari Kabupaten Semarang sudah sangat tinggi sehingga debit airnya itu kencang sehingga terjadi peluapan di Kali Babon,” jelasnya.

Selain evakuasi, BPBD juga mendirikan dapur umum dan dukungan logistik bagi warga terdampak. “Kami juga menyiapkan

dapur umum, nanti bidang logistik, kebiasaan kita pakai dapur umum,” tambahnya.

Riyanto menambahkan, BPBD juga terus melakukan monitoring wilayah terdampak, pembersihan pasca banjir, serta memastikan kebutuhan dasar warga terpenuhi, termasuk air bersih. Ia menambahkan, penanganan dilakukan secara terpadu dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah kelurahan, dunia usaha, serta masyarakat melalui program kelurahan siaga bencana dan kelurahan tangguh bencana.

Selain itu, BPBD Kota Semarang terus berkoordinasi dengan BPBD Provinsi Jawa Tengah, BNPB, serta BMKG untuk memantau perkembangan cuaca dan potensi banjir susulan. Riyanto memastikan hingga saat ini tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut, dan kondisi genangan di sejumlah titik mulai berangsur surut.

Tak hanya BPBD, Dinas Sosial Kota Semarang juga dengan sigap langsung memberikan bantuan logistik bagi warga di Perumahan Dinar Mas dan Rowosari. Bantuan yang diberikan tersebut antara lain selimut, kasur, makanan ringan/roti, pakaian bayi, sandang, perlengkapan mandi, air mineral, terpal hingga nasi bungkus sebanyak 1.200 bungkus per hari.

Hingga berita ini diturunkan, tim BPBD, Dinas Sosial dan pihak-pihak lainnya terus melakukan upaya penanganan pasca banjir dan membantu warga terdampak.

Pemerintah Kota Semarang mengimbau masyarakat supaya tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrem serta segera melapor kepada petugas apabila terjadi kondisi darurat, agar penanganan dapat dilakukan secara cepat dan tepat.

Ciptakan Kekhusyukan Bulan Ramadan, Pemkot Semarang Berlakukan Pengaturan Jam Operasional Tempat Hiburan



SEMARANG - Pemerintah Kota atau Pemkot Semarang resmi menerbitkan Surat Edaran terkait pengaturan jam operasional usaha hiburan selama Bulan Suci Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah/Tahun 2026. Kebijakan ini diterapkan sebagai upaya menjaga suasana kondusif, saling menghormati, serta mendukung kekhusyukan umat Islam dalam menjalankan ibadah puasa.

Surat Edaran Wali Kota Semarang Nomor B/306/100.3.4.3/11/2026 mengatur operasional sejumlah jenis usaha hiburan, seperti diskotik, klub malam, pub, karaoke, billiard, panti pijat, bar/bottle shop, serta SPA. Aturan ini berlaku sejak awal Ramadan hingga masa Lebaran.

Pada awal Ramadan, seluruh usaha diskotik/klub malam/pub, karaoke, billiard, panti pijat, SPA sehat, panti pijat refleksi, serta bar/bottle shop (baik di dalam maupun

luar hotel) ditutup selama dua hari, mulai tanggal 18 hingga 19 Februari 2026.

Selama Bulan Ramadan, usaha hiburan dapat beroperasi dengan pembatasan jam operasional. Diskotik/klub malam/pub, karaoke, serta bar/bottle shop diperbolehkan buka pukul 18.00 hingga 01.00 WIB. Family karaoke atau karaoke keluarga buka pukul 15.00 hingga 24.00 WIB, panti pijat refleksi buka pukul 10.00 hingga 22.00 WIB, SPA sehat buka pukul 10.00 hingga 22.00 WIB, panti pijat buka pukul 15.00 hingga 22.00 WIB, serta billiard buka pukul 10.00 hingga 24.00 WIB.

Sementara itu, pada masa Hari Raya Idul Fitri, seluruh usaha hiburan ditutup mulai tanggal 18 hingga 24 Maret 2026.

Pemerintah Kota Semarang mengimbau seluruh pelaku usaha hiburan agar mematuhi ketentuan tersebut serta menjaga pelaksanaan ibadah Ramadan. Pelanggaran terhadap ketentuan jam operasional akan dikenakan sanksi sesuai Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2010 tentang kepariwisataan.

Ketentuan jam operasional ini juga telah disiapkan melalui proses koordinasi yang

melibatkan berbagai pihak. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang sebelumnya telah menyelenggarakan rapat bersama stakeholder pemerintah, seperti Kementerian Agama, Kesbangpol, Satpol PP, serta perwakilan pelaku usaha hiburan melalui paguyuban entertainment Kota Semarang. Dalam forum tersebut hadir pula ketua bidang usaha karaoke, panti pijat, spa, klub malam, hingga billiard.

Hasil rapat koordinasi kemudian diajukan kepada Sekretaris Daerah dan Wali Kota Semarang sebagai dasar penetapan Surat Edaran. Setelah disetujui dan ditandatangani, ketentuan ini selanjutnya disosialisasikan melalui paguyuban/asosiasi usaha hiburan serta kanal informasi resmi yang dikelola Disbudpar Kota Semarang.

Pemkot Semarang berharap aturan ini dapat menjadi pedoman bersama dalam menciptakan suasana Ramadan yang aman, nyaman, serta penuh rasa saling menghargai di tengah masyarakat.

Informasi lengkap mengenai Surat Edaran ini dapat diakses melalui tautan: smg.city/sehiburan2026.

Revisi Perwal Musrenbang, Dari Alokatif Jadi Aspiratif, Kecamatan di Kota Semarang Kembali Fokus Pelayanan



SEMARANG – Wali kota Semarang, Agustina Wilujeng menegaskan draf perubahan Peraturan Walikota (Perwal) terkait mekanisme pengusulan pembangunan atau Musrenbang kini disusun dengan pendekatan lebih aspiratif dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Menurut Agustina, perbedaan mendasar dalam draf terbaru terletak pada perubahan pola dari sebelumnya yang bersifat alokatif angka menjadi lebih aspiratif.

Dengan demikian, pemerintah kota Semarang tidak lagi sekedar membagi alokasi berdasarkan angka tertentu, melainkan bertanggung jawab penuh terhadap seluruh aspirasi masyarakat yang masuk.

“Kalau dulu kita merasa sudah dikasih aspirasi, ya sudah selesai. Sekarang tidak bisa

lagi begitu. Pemerintah kota Semarang bertanggung jawab penuh terhadap seluruh aspirasi yang disampaikan masyarakat,” ujarnya, Senin (2/3).

Dirinya mengaku, skema baru tersebut memperluas ruang tanggung jawab pemerintah sekaligus menambah beban kerja. Akan tetapi, hal itu dinilai sebagai konsekuensi untuk membawa Kota Semarang menjadi lebih baik.

“Ini memang lebih luas dan bebannya lebih berat bagi pemerintah kota. Tapi kita harus lakukan karena kita ingin sesuatu yang sudah hebat menjadi semakin hebat,” tegasnya.

Dalam perubahan Perwal tersebut, mekanisme teknis juga mengalami penyesuaian. Berdasarkan rekomendasi yang ada, alokasi teknis tidak lagi ditempatkan di tingkat kecamatan. Sehingga nantinya kecamatan akan difokuskan kembali pada fungsi pelayanan masyarakat.

“Sudah tidak boleh lagi ada alokasi teknis di kecamatan. Kecamatan kembali pada pelayanan. Semua urusan pembangunan dan lainnya kembali ke dinas teknis,” jelasnya.

Meski demikian, usulan dari kecamatan tetap dapat diajukan melalui mekanisme yang telah

diatur. Bahkan, di tengah tahun anggaran, pengajuan tetap dimungkinkan tanpa harus menunggu akhir proses perencanaan.

Untuk kebutuhan kecil, dinas terkait dapat memanfaatkan biaya operasional guna menyelesaikan persoalan yang mendesak.

Sementara itu, untuk program berskala besar, tetap diperlukan perencanaan matang melalui road map yang jelas agar selaras dengan arah pembangunan daerah.

Agustina menambahkan, pembahasan draft Perwal tersebut juga telah melalui proses bersama DPRD karena berkaitan erat dengan kinerja pemerintah daerah secara utuh, baik eksekutif maupun legislatif.

“Ini memang cukup rumit, tapi saya yakin pemerintah kota dan masyarakat Kota Semarang siap menghadapi tantangan ini,” tuturnya.

**Revisi Sistem Musrenbang, Wali kota Semarang, Agustina Wilujeng Kedepankan
Pembangunan Aspiratif yang Bebas Risiko Hukum**



SEMARANG -Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng, menegaskan komitmen Pemerintah Kota Semarang untuk membangun fondasi baru perencanaan pembangunan yang aspiratif, akuntabel, dan aman secara hukum melalui perubahan sistem Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Hal tersebut disampaikan wali kota saat membuka Forum Group Discussion (FGD) Raperwal Musrenbang dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 di Ruang Lokakrida, Gedung Moch. Ichsan, Senin (2/3).

“Kita bergeser ke sistem yang sekedar memberi angka-anggaran menjadi sebuah sistem yang sepenuhnya aspirasi, melalui metode jemput bola guna menyusun daftar belanja masalah, dan menelaah kebutuhan wilayah secara riil,” tegas Agustina.

FGD yang diikuti 417 peserta dari perangkat daerah, kecamatan, kelurahan, LPMK, aparat penegak hukum, serta pemangku kepentingan lainnya tersebut menjadi bagian penting dalam memperkuat kualitas perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif dan terintegrasi.

Agustina menjelaskan, perubahan mekanisme Musrenbang dilakukan sebagai tindak lanjut rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Aparat Penegak Hukum (APH) guna memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan melindungi aparatur dari risiko hukum.

Dirinya menyebut pendampingan tersebut menjadi momentum untuk membangun kembali kepercayaan publik sekaligus memastikan setiap rupiah APBD memberi manfaat nyata bagi masyarakat.

“Bagi kami pemerintah Kota Semarang, pendampingan itu sangat menguntungkan, dan kami berterima kasih atas pendampingan itu. Dibuatnya kegiatan FGD ini kami ingin membuktikan komitmen dalam menjalankan rencana aksi untuk pencegahan korupsi kita juga ingin memastikan bahwa APBD direncanakan benar-benar memberi manfaat,” ujarnya.

Salah satu perubahan utama dalam Raperwal tersebut adalah relokasi pelaksanaan pembangunan fisik dari kecamatan ke dinas teknis. Menurut Agustina, kebijakan ini bukan untuk mengurangi peran kecamatan, melainkan sebagai langkah perlindungan agar aparaturnya dapat bekerja secara optimal sesuai kewenangannya.

Agustina menambahkan, camat dan lurah tetap memiliki peran strategis sebagai jembatan aspirasi masyarakat. “Saya ingin bapak dan bu camat lurah kembali pada marwah tugas utama: fokus pada pelayanan masyarakat dan menjadi jembatan aspirasi yang kuat. Biarkan urusan teknis pembangunan, standarisasi material, hingga urusan lelang dikerjakan oleh mereka yang memang ahli di bidangnya,” kata Agustina.

Meskipun eksekusi pembangunan dilakukan oleh dinas teknis, Agustina memastikan aspirasi masyarakat tetap menjadi dasar utama perencanaan pembangunan. “Saya tegaskan bahwa suara warga tidak akan hilang. Aspirasi yang muncul dari Rembug Warga tetap menjadi nakhoda pembangunan. Melalui mekanisme sintesis aspirasi yang kita atur dalam Raperwal ini, suara dari tingkat RW akan diproses secara transparan hingga menjadi prioritas pembangunan kota,” tegasnya.

Melalui mekanisme baru ini, aspirasi warga akan diverifikasi dan diselaraskan dengan perencanaan teknis agar menghasilkan pembangunan yang tepat sasaran, terintegrasi, dan berkelanjutan. Agustina optimistis, reformasi sistem Musrenbang ini akan memperkuat fondasi tata kelola pemerintahan yang bersih sekaligus memastikan pembangunan Kota Semarang benar-benar menjawab kebutuhan riil masyarakat.

Pemkot Semarang Berencana Masifkan Bus Listrik Sebagai Transportasi Publik



SEMARANG - Pemerintah Kota atau Pemkot Semarang berencana akan memasifkan bus listrik sebagai transportasi publik yang dikelola BLU Trans Semarang. Namun, Kota Semarang yang memiliki wilayah atas dan bawah menilai perlu adanya uji coba kemampuan bus listrik di medan-medan tersebut.

Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng mengatakan saat ini uji coba masih dilakukan di wilayah bawah dengan jalur rata atau flat. Saat uji coba masih dilakukan di koridor 1 trayek Mangkang – Penggaron.

“Kota Semarang ini kan wilayahnya ada yang lembah, bukit maka kita pilih jalur yang flat dulu untuk uji coba. Tapi memang kami niatkan untuk mengurangi emisi gas buang yakni memasifkan operasional bus listrik,” kata Agustina, Selasa (3/3).

Namun disisi lain, bus listrik yang ramah disabilitas harus menggunakan low deck.

Padahal jika bus listrik low deck digunakan di Semarang bawah yang kerap banjir, maka juga akan menjadi kendala. “Ada berbagai macam usulan salah satunya karena Semarang mengalami banjir maka minta _high deck_ supaya kalau lewat banjir tidak masuk airnya tapi tidak ramah disabilitas, harus low deck sekitar 30 cm untuk ramah disabilitas,” jelasnya.

Untuk itu, Pemkot Semarang akan melakukan proses revitalisasi saluran terutama di wilayah yang kerap dilalui bus listrik. Agustina menyebut wilayah tengah kota yang paling parah jika banjir terjadi adalah kawasan Simpang Lima, Jalan Gajahmada, Jalan Ahmad Yani, hingga Jalan Ahmad Dahlan.

“Jika ada genangan banjir maka kita akan lakukan proses revitalisasi saluran di manapun berada terutama wilayah yang beririsan dari Mangkang sampai Pedurungan. Yang paling parah di mana air surut susah itu Simpang Lima tahun ini kita selesaikan, lalu sepanjang Ahmad Yani, Ahmad Dahlan, Gajahmada kita bereskan,” tuturnya.

Ia meyakini jika semua saluran sudah direvitalisasi dan mampu diselesaikan maka banjir di kota Semarang mampu dikendalikan

dan bus listrik akan bisa berjalan dengan lancar.

“Saya mohon maaf kepada masyarakat ketika akan memperbaiki saluran itu pasti ada pihak yang terganggu karena kadang saluran di atasnya ada bangunan permanen tapi ini untuk menyelesaikan proses pengendalian banjir. Jika Simpang Lima bisa dikendalikan maka bis listrik akan lancar,” pungkasnya.

Jaga Stabilitas Harga Kebutuhan Pokok Jelang Lebaran, Pemkot Semarang Siap Gelar Pasar Murah Keliling



SEMARANG – Jelang Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriyah, Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng bersama jajaran Pemerintah Kota Semarang melakukan tinjauan lapangan guna memastikan ketersediaan pasokan dan stabilitas harga Barang Kebutuhan Pokok dan Penting (Bapokting) di sejumlah titik strategis.

Tinjauan yang dilakukan pada Rabu (4/3) ini menyasar Pasar Peterongan, Superindo Sriwijaya, hingga Pasar Karangayu guna melihat langsung dinamika harga di tingkat pedagang maupun ritel.

“Dua pusat perbelanjaan ya. Satu di pasar Peterongan, dan sekarang kita di Superindo. Kalau harga beras, rata-rata masih normal ya,” ujar Agustina saat memberikan keterangan kepada awak media di sela-sela pantauan.

Meski komoditas beras terpantau stabil, Agustina menyoroti adanya lonjakan

signifikan pada komoditas hortikultura, khususnya cabai, serta fluktuasi pada harga telur. Tingginya permintaan masyarakat menjelang lebaran disinyalir menjadi faktor utama yang mendorong kenaikan harga tersebut di pasar.

“Yang masih tinggi sekali adalah cabai. Cabai, ini tadi ada Kepala Dinas Ketahanan Pangan. Saya minta supaya melakukan hal yang diperlukan untuk intervensi menurunkan harga cabai,” ungkapnya.

Pemerintah Kota Semarang menyadari bahwa tingginya harga di pasar tradisional dapat mempengaruhi daya beli masyarakat. Oleh karena itu, Agustina menginstruksikan jajaran dinas terkait untuk memperkuat intervensi melalui program pasar murah keliling guna memberikan alternatif belanja dengan harga yang lebih terjangkau bagi warga.

“Pasar murah keliling kita lakukan dengan berbagai stakeholder yang ada di Kota Semarang. Tujuannya adalah untuk menekan lonjakan harga dan memberikan ketersediaan bahan kebutuhan pokok yang terjangkau bagi masyarakat. Siap-siap ya dengan panggilan pasar murah dan intervensi,” pungkasnya.

Naikkan Daya Tampung Sekolah 15% Lewat Swasta, Semarang Sabet Penghargaan BBPMP Jateng



SEMARANG – Pemerintah Kota atau Pemkot Semarang sukses memborong dua penghargaan bergengsi dari Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Provinsi Jawa Tengah. Apresiasi ini diberikan atas capaian kinerja terbaik dalam pelibatan sekolah swasta serta kepatuhan terhadap sistem rombongan belajar (rombel) pada Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB).

Penghargaan tersebut diterima oleh Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng, yang diwakili oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang, Muhammad Ahsan, dari Kepala BBPMP Jawa Tengah, Nugraheni Triastuti, pada Kamis (5/3) lalu. Capaian ini menjadi pengakuan atas tata kelola pendidikan di Ibu Kota Jawa Tengah yang dinilai semakin inklusif dan transparan.

“Pemkot Semarang sangat mengapresiasi penghargaan ini. Capaian tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh pemangku kepentingan untuk mewujudkan visi Semarang Cerdas melalui pemerataan akses pendidikan bagi seluruh warga,” ujar Agustina.

Penghargaan pertama yang diraih adalah kategori Kinerja Terbaik Pelibatan Sekolah Swasta dan Kepatuhan Rombel SPMB. Melalui kebijakan optimalisasi peran sekolah swasta, Kota Semarang tercatat berhasil meningkatkan daya tampung siswa hingga 15 persen dibandingkan tahun sebelumnya, sekaligus memastikan proses penerimaan siswa baru berjalan sesuai aturan tanpa adanya pelanggaran kuota rombel.

“Pelibatan sekolah swasta adalah langkah strategis kami untuk memastikan tidak ada anak yang tertinggal dalam mendapatkan akses pendidikan. Melalui skema ini, kami berhasil meningkatkan daya tampung hingga 15 persen, sehingga distribusi calon peserta didik menjadi lebih merata dan tidak hanya bertumpu pada sekolah negeri,” ungkapnya.

Selain itu, kota Semarang juga dianugerahi penghargaan Sinergi dan Kolaborasi Program Prioritas Kemendikdasmen. Penghargaan

kedua ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas kepatuhan dan kecepatan Pemerintah Kota Semarang dalam mengimplementasikan kebijakan-kebijakan pusat di tingkat daerah, mulai dari peningkatan mutu pembelajaran hingga aksesibilitas pendidikan.

“Kami berkomitmen penuh menjadikan sektor pendidikan sebagai prioritas utama. Sinergi dengan program-program prioritas Kemendikdasmen terus kami pertajam agar kualitas pengajaran di Semarang selaras dengan standar nasional, bahkan melampauinya melalui berbagai inovasi lokal,” imbuhnya.

Agustina juga menegaskan bahwa kepatuhan terhadap jumlah rombongan belajar dalam SPMB adalah kunci untuk menjaga kualitas layanan pendidikan yang adil dan tanpa diskriminasi. Dengan tidak adanya pemaksaan jumlah siswa di luar kuota resmi, proses belajar mengajar di kelas dipastikan dapat berjalan lebih efektif dan kondusif.

“Ke depan, capaian ini akan menjadi motivasi bagi kami untuk terus menjaga integritas di setiap sekolah. Kami ingin semangat Semarang Cerdas ini benar-benar dirasakan manfaatnya melalui akses pendidikan yang berkualitas dan merata bagi

setiap anak, tanpa ada lagi praktik-praktik yang menyalahi aturan,” pungkasnya.

**Gelar 240 Operasi Pasar Hingga Lebaran, Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng
Pastikan Stok Pangan Aman dan Terjangkau**



SEMARANG – Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng, menginstruksikan penguatan intervensi pasar guna menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok menjelang Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Melalui kegiatan Gerakan Pangan Murah (GPM) Serentak yang dipusatkan di Kantor Kecamatan Semarang Barat dan pasar pangan murah 'Pak Rahman' di Kecamatan Mijen, Jumat (6/3), Pemerintah Kota Semarang menargetkan pelaksanaan 240 operasi pasar hingga akhir Ramadan.

Menurut Agustina, langkah masif ini dijalankan Pemerintah Kota atau Pemkot Semarang bersama Satgas Pangan Kota Semarang dengan mengoptimalkan moda keliling "Pak Rahman atau Pasar Pangan Rakyat Murah dan Aman" dan "Kempling Semar".

“Atas hasil koordinasi dengan Satgas Pangan, kami sepakat menambah jumlah

operasi pasar yang selama ini dilakukan. Targetnya mencapai 240 titik hingga akhir bulan puasa ini. Armada kami bergerak setiap hari menysar 3 sampai 4 lokasi untuk memastikan suplai bahan pangan langsung menjangkau masyarakat di tingkat bawah,” ujarnya.

Dalam pelaksanaan GPM Serentak tersebut, data penyaluran menunjukkan pergerakan logistik yang sangat besar. Di Kecamatan Semarang Barat, sebanyak 1,5 ton beras SPHP, 3 ton beras medium, 300 kg bawang putih, serta ratusan kilogram komoditas seperti gula pasir, minyak goreng, dan telur ayam ras disalurkan dengan dukungan 23 mitra strategis. Sementara di Kecamatan Mijen, pasokan serupa digelontorkan dengan tambahan stok protein yang lebih komplit.

“Tim Kempling Semar ini bekerja sangat presisi. Di Mijen stoknya lebih lengkap karena permintaan warga akan daging dan ayam cukup tinggi. Berbeda dengan di Semarang Barat yang lebih fokus ke kebutuhan pokok dasar. Jarang sekali mereka membawa pulang barang sisa, semuanya habis terserap karena tim kami paham betul karakteristik kebutuhan warga di tiap titik,” ungkapnya.

Intervensi yang konsisten ini mulai menunjukkan dampak nyata pada harga komoditas hortikultura di pasar tradisional. Wali Kota memaparkan bahwa harga cabai yang sempat melambung di angka Rp95.000 hingga Rp100.000 per kilogram, kini berhasil ditekan ke level Rp75.000 per kilogram melalui strategi potong jalur distribusi langsung ke produsen.

“Harapan kami ini terus dilakukan sehingga harga sembakonya stabil. Fluktuasi harga yang mempengaruhi inflasi di kota Semarang itu terjadi sepanjang tahun, bukan hanya jelang Lebaran. Maka dari itu, Satgas Pangan tidak pernah berhenti bergerak. Kami ingin masyarakat merasa tenang karena pemerintah hadir mengawal ketersediaan barang di pasar,” imbuhnya.

Agustina menegaskan bahwa keberhasilan menekan angka inflasi hingga 2,1 persen di akhir tahun lalu menjadi motivasi untuk terus menjaga daya beli masyarakat. Dia berharap ekosistem pangan yang sehat ini dapat terus terjaga sehingga warga dapat merayakan hari raya dengan penuh kenyamanan tanpa terbebani lonjakan harga.

“Masa depan kesejahteraan warga salah satunya ditentukan dari keterjangkauan pangan. Tugas kami adalah memastikan akses pangan terbuka lebar dan harganya

terukur bagi seluruh lapisan masyarakat Semarang,” pungkas Agustina.

Pemkot Semarang Fasilitasi Mudik Gratis Bagi Warganya dari Jakarta ke Kota Semarang



SEMARANG - Pemerintah Kota atau Pemkot Semarang kembali memfasilitasi program mudik gratis bagi warganya yang merantau di Jakarta melalui program Mudik dan Balik Rantau Gratis Tahun 2026. Sebanyak 350 pemudik asal Kota Semarang diberangkatkan dari Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta, Senin (16/3), menuju Terminal Mangkang, Kota Semarang.

Program ini merupakan bagian dari kegiatan mudik gratis tingkat Provinsi Jawa Tengah yang melibatkan pemerintah kabupaten/kota se-Jawa Tengah serta dukungan dari berbagai pihak swasta. Total sebanyak 325 armada bus dilepas oleh Gubernur Jawa Tengah untuk mengangkut pemudik menuju berbagai daerah di Jawa Tengah.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Semarang, Danang Kurniawan, mengatakan Pemerintah Kota Semarang secara konsisten berpartisipasi dalam program ini setiap tahun

sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat yang merantau.

“Jadi itu kan kegiatan rutin setiap tahun tingkat provinsi. Jadi seluruh kabupaten, kota itu dengan provinsi, kemudian ada juga bantuan-bantuan dari swasta itu menyelenggarakan program mudik gratis. Kumpulnya di Jakarta, di Taman Mini, tujuannya ke Jawa Tengah. Dalam hal ini, kita Pemerintah Kota Semarang juga berpartisipasi aktif setiap tahun itu,” ujar Danang.

Pada tahun ini, Pemkot Semarang menyediakan total 12 armada bus yang terdiri dari tujuh armada untuk arus mudik dan lima armada untuk arus balik. Tujuh bus yang membawa pemudik menuju Kota Semarang dilepas sekitar pukul 09.45 WIB bersama rombongan bus lain menuju berbagai kota di Jawa Tengah.

Danang menjelaskan, para peserta mudik gratis merupakan warga Kota Semarang yang tergabung dalam Paguyuban Wong Semarang (PawonSemar), yakni komunitas warga Semarang yang tinggal dan bekerja di Jakarta. Pemerintah kota memfasilitasi transportasi mereka agar dapat pulang ke kampung halaman dengan aman dan nyaman.

Ia menambahkan, sebelum keberangkatan, seluruh sopir menjalani pemeriksaan kesehatan dan armada bus juga dilakukan pengecekan kelayakan kendaraan untuk memastikan keselamatan perjalanan para pemudik.

Menurut Danang, antusiasme warga terhadap program ini sangat tinggi. Bahkan banyak peserta menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Semarang atas fasilitas yang diberikan.

“Itu tadi pada senang menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bu Wali Kota, pada bikin video juga tadi,” kata dia.

Lebih lanjut, Pemkot Semarang tidak hanya memfasilitasi keberangkatan, tetapi juga arus balik bagi para perantau setelah Lebaran. Lima armada bus disiapkan untuk arus balik yang dijadwalkan berangkat dari Semarang menuju Jakarta pada 26 Maret 2026 malam.

Pendanaan program tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Semarang sebagai bentuk dukungan pemerintah terhadap warganya yang merantau.

“Kalau untuk pendanaan sendiri, diambil dari APBD. Jadi Pemkot Semarang memang men-support, menjemput kemudian

memberikan kemudahan layanan kepada warganya yang merantau,” pungkas Danang.

Tanda Tangan Perjanjian Kerja Sama Penyelenggaraan PSEL, Pertegas Upaya Pemkot Semarang dalam Penanganan Sampah



SEMARANG - Keseriusan Pemerintah kota atau Pemkot Semarang dalam upaya penanganan sampah memasuki tahap yang lebih konkret melalui Penandatanganan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Penyelenggaraan Pengolah Sampah Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan menjadi Energi Listrik (PSEL) Wilayah Semarang Raya, pada Sabtu (28/3) di Ruang Rapat Gedung B Lantai 5 Kantor Gubernur Jawa Tengah.

Penandatanganan yang dilakukan antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kota Semarang, dan Pemerintah Kabupaten Kendal, serta disaksikan oleh Menteri Lingkungan Hidup, menjadi penanda bahwa pengelolaan sampah berbasis teknologi ramah lingkungan di wilayah Semarang Raya mulai dijalankan secara terstruktur.

Penandatanganan tersebut juga menjadi bagian dari rangkaian kegiatan yang dilanjutkan dengan pembahasan tindak lanjut PSEL di wilayah lain di Jawa Tengah sebagai upaya percepatan penanganan sampah secara regional.

Dalam kerja sama tersebut, para pihak menyepakati arah kebijakan pengelolaan sampah berbasis teknologi ramah lingkungan melalui pembangunan PSEL sebagai solusi atas peningkatan timbunan sampah yang belum dapat tertangani optimal dengan sistem eksisting. Pendekatan ini diarahkan untuk mengurangi volume sampah secara signifikan sekaligus menghasilkan energi listrik sebagai nilai tambah.

Kesepakatan ini juga menetapkan skema kolaborasi lintas daerah, di mana Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berperan dalam koordinasi dan pengawasan, sementara Pemerintah Kota Semarang dan Pemerintah Kabupaten Kendal bertanggung jawab pada aspek teknis seperti penanganan sampah, penyediaan sarana prasarana, serta pemenuhan pasokan sampah sebagai bahan baku PSEL.

Melalui Perjanjian Kerja Sama, pengaturan tersebut diturunkan ke dalam langkah

operasional yang mencakup seluruh tahapan penyelenggaraan PSEL, mulai dari perencanaan, pembangunan, hingga operasional dan pemeliharaan, termasuk pengelolaan risiko, penguatan kelembagaan, serta pengalokasian anggaran.

Bagi Kota Semarang, langkah ini bukan sekadar proses administratif. Ini adalah jawaban atas kebutuhan pengelolaan sampah di kota dengan timbulan harian yang besar. Melalui kerja sama regional bersama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten Kendal, sistem pengolahan sampah diarahkan lebih modern, terintegrasi, dan memberi dampak jangka panjang bagi lingkungan.

Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng menegaskan bahwa Pemerintah Kota Semarang telah menyiapkan langkah paralel selama masa pembangunan yang diperkirakan berlangsung sekitar tiga tahun. Selain memastikan kesiapan teknis, Pemkot Semarang juga tetap menggerakkan pengurangan sampah dari sumbernya.

“Masyarakat Kota Semarang menunggu pembangunan PSEL ini. Kami siap memenuhi kebutuhan _feeding_ sebesar 1.100 ton sampah per hari sesuai perjanjian. Sambil menunggu proses pembangunan, kami akan menguatkan gerakan Semarang

Wegah Nyampah dan memperbanyak bank sampah agar pengurangan dari hulu tetap berjalan,” ujar Agustina.

Menurutnya, pendekatan ini penting agar pengelolaan sampah berjalan seimbang antara kesiapan teknologi dan partisipasi masyarakat.

Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, menilai penandatanganan kerja sama ini sebagai langkah fundamental dalam menjawab persoalan sampah yang telah menjadi isu nasional. Ia menekankan bahwa kota-kota besar membutuhkan pendekatan berbasis teknologi untuk menangani volume sampah dalam skala besar.

“Pengelolaan sampah menjadi energi listrik merupakan langkah efektif untuk mereduksi timbulan sampah secara signifikan. Ini bagian dari upaya percepatan penanganan sampah secara nasional,” ujarnya.

Di tingkat provinsi, Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, memastikan bahwa langkah ini merupakan bagian dari strategi besar pengelolaan sampah di Jawa Tengah, termasuk melalui pembentukan satuan tugas percepatan penanganan sampah serta pengembangan teknologi alternatif seperti _refuse derived fuel_(RDF).

Ia juga menekankan bahwa tantangan pengelolaan sampah di Jawa Tengah masih cukup besar. Dari 35 kabupaten/kota, sebanyak 29 daerah masih menerapkan praktik *_open dumping_* yang secara regulasi telah dilarang sejak Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008.

Saat ini, tingkat pengelolaan sampah di Jawa Tengah baru mencapai sekitar 30 persen, sedikit di atas rata-rata nasional yang berada di kisaran 24,9 persen. Secara nasional, sekitar 66 persen pengelolaan sampah masih dilakukan dengan metode *_open dumping_*.

Apabila praktik tersebut dapat diakhiri dan beralih ke sistem yang lebih terkelola seperti *_sanitary landfill_* dan teknologi pengolahan modern, tingkat pengelolaan sampah secara nasional berpotensi meningkat hingga 58 persen. Sementara itu, untuk Jawa Tengah, penghentian praktik *_open dumping_* yang saat ini masih mencapai sekitar 83 persen berpotensi mendorong lonjakan tingkat pengelolaan sampah hingga mendekati 78 persen.

Kerja sama ini juga sejalan dengan arah pembangunan Kota Semarang melalui program “Semarang Bersih”, serta mendukung program strategis nasional pengembangan PSEL yang ditargetkan mulai beroperasi dalam beberapa tahun ke depan.

Penandatanganan kerja sama PSEL Semarang Raya ini menjadi titik penting peralihan dari tahap perencanaan menuju implementasi nyata pengelolaan sampah berbasis teknologi di Jawa Tengah. Pemerintah Kota Semarang memastikan proses ini akan terus dikawal agar berjalan sesuai target dan memberikan dampak nyata bagi kualitas lingkungan serta pelayanan publik.

Hadir Untuk Masyarakat, Pemkot Semarang Siapkan Tujuh Armada Bus Angkut Pemudik Asal Semarang di Jakarta



SEMARANG - Pemerintah Kota atau Pemkot Semarang menyiapkan tujuh armada bus yang akan mengangkut pemudik yang berasal dari Kota Semarang yang berada di Jakarta.

Tujuh bus telah diberangkatkan pada Rabu (11/3) pagi di depan halaman Balaikota Semarang menuju TMII Jakarta yang akan membawa pemudik kembali ke Ibu Kota Jawa Tengah. Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng melepas secara langsung tujuh armada bus yang masih kosong tersebut.

“Hari ini kita berangkatkan tujuh armada bus untuk mudik saudara kita yang ada di Jakarta untuk kembali ke Semarang. Jadi kita kirim bus kosong untuk menjemput pemudik yang khusus ber-KTP Semarang,” kata Agustina.

Ia memastikan tujuh armada yang mengangkut pemudik kembali ke Semarang sudah terisi penuh. Nantinya saat arus balik,

Pemkot Semarang juga menyediakan lima armada untuk kembali ke Ibu kota.

"Kita berupaya bagaimana caranya masyarakat Semarang ini merasa nyaman dan sejahtera dalam menghadapi lebaran. Intinya kita bantu masyarakat menjalani tahapan dalam proses menghadapi lebaran dengan baik,” terangnya.

Tidak hanya menyiapkan armada untuk mudik dan balik, jajaran Pemerintah Kota Semarang juga berjaga di pos masing-masing saat hari Raya Idul Fitri. Hal ini sesuai dengan perintah dari pemerintah pusat untuk memastikan kondusifitas di masing-masing wilayah tetap aman dan nyaman.

Sementara Kepala Dinas Perhubungan Kota Semarang, Danang Kurniawan mengatakan total armada yang disediakan untuk arus mudik dan balik adalah 12 bus.

Pada tanggal 16 Maret 2026 armada bus siap mengangkut warga Semarang yang berada di Jakarta untuk kembali ke Semarang. Nantinya mereka akan turun di Terminal Mangkang atau Balai Kota Semarang.

Sedangkan pada tanggal 26 Maret 2026, lima bus siap membawa warga Semarang kembali

ke Jakarta dengan titik kumpul di Balai Kota atau Terminal Mangkang.

“Nanti dari Jakarta akan dilepas oleh Pak Gubernur Jateng. Dan tahun depan rencananya kita tambah jadi berangkat ke Jakarta akan ada 10 bus kalau sekarang kan baru 7,” kata Danang.

Bersama Stakeholders, Pemkot Semarang Perkuat Kesiapsiagaan Jelang Idul Fitri 1447 Hijriyah



SEMARANG – Pemerintah Kota atau Pemkot Semarang memperkuat kesiapsiagaan menghadapi arus mudik dan perayaan Idul Fitri 1447 Hijriah melalui Rapat Koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang digelar di Ruang Lokakrida, Gedung Balai Kota Semarang, Kamis (12/3).

Rapat yang dipimpin langsung oleh Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng tersebut dihadiri unsur Forkopimda, pimpinan instansi vertikal, kepala OPD, camat, hingga pemangku kepentingan strategis seperti Bank Indonesia, Pertamina, PT. KAI, Pelindo, BMKG, Bulog, dan berbagai lembaga terkait. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan seluruh komponen pemerintah dan pemangku kepentingan siap menghadapi

lonjakan aktivitas masyarakat menjelang Lebaran.

Agustina menegaskan bahwa Kota Semarang sebagai salah satu simpul penting arus mudik di Pulau Jawa harus memastikan seluruh sistem pelayanan publik berjalan optimal selama periode Lebaran.

“Koordinasi lintas sektor ini sangat penting untuk memastikan keamanan, kelancaran transportasi, stabilitas harga pangan, serta kesiapan layanan publik selama masa mudik dan libur Idul Fitri,” ujar Agustina.

Dalam rapat tersebut dibahas berbagai langkah strategis untuk menghadapi arus mudik dan arus balik Lebaran 2026. Berdasarkan proyeksi, puncak arus mudik diperkirakan terjadi pada 14–15 Maret 2026 dan 18–20 Maret 2026, sementara puncak arus balik diprediksi berlangsung pada 23–24 Maret 2026 dan 28–29 Maret 2026.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, Pemkot Semarang bersama Forkopimda telah menyiapkan berbagai langkah kesiapsiagaan, antara lain memastikan kelancaran lalu lintas, kesiapan fasilitas transportasi, hingga penguatan layanan kesehatan dan penanggulangan bencana.

Beberapa titik di Kota Semarang juga dipetakan sebagai potensi kemacetan, di antaranya Gerbang Tol Kalikangkung, Krapyak, Banyumanik, Jatingaleh, Gayamsari, serta Kaligawe yang menjadi jalur utama perlintasan kendaraan selama arus mudik.

Selain itu, dalam forum HLM TPID juga dibahas langkah-langkah pengendalian inflasi menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional. Berdasarkan data terakhir, inflasi Kota Semarang pada Februari 2026 tercatat sebesar 4,65 persen (year on year) sehingga diperlukan penguatan koordinasi untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok menjelang Lebaran.

Pemerintah Kota Semarang juga memastikan kesiapan berbagai sektor layanan publik, mulai dari layanan kesehatan, transportasi, keamanan, kebersihan kota, hingga ketersediaan pangan. Seluruh perangkat daerah diminta meningkatkan kesiapsiagaan, termasuk mendirikan pos kesehatan, menyiapkan sarana transportasi, menjaga ketertiban umum, serta memastikan jaringan komunikasi dan CCTV berfungsi optimal selama periode Lebaran.

Di sisi lain, Pemkot Semarang juga menyiapkan berbagai program pendukung bagi masyarakat, salah satunya program

Mudik Gratis 2026 dengan menyediakan 12 armada bus untuk memfasilitasi perjalanan warga Semarang dari Jakarta menuju Semarang dan sebaliknya. Program ini diharapkan dapat membantu masyarakat melakukan perjalanan mudik dengan lebih aman dan nyaman.

Agustina menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah daerah, Forkopimda, instansi vertikal, serta berbagai pemangku kepentingan menjadi kunci utama dalam memastikan perayaan Idul Fitri di Kota Semarang berjalan aman dan kondusif.

“Kami ingin memastikan masyarakat dapat merayakan Idul Fitri dengan aman, nyaman, dan penuh kebahagiaan. Karena itu, seluruh unsur pemerintah dan stakeholder harus bergerak bersama memastikan kesiapan Kota Semarang dalam menghadapi arus mudik maupun aktivitas masyarakat selama Lebaran,” pungkasnya.

Pemkot Semarang Dorong Peran Guru Hadapi Tantangan Digital



SEMARANG — Wakil Wali Kota Semarang, Iswar Aminuddin menghadiri kegiatan Halal Bi Halal Keluarga Besar Koordinator Satuan Pendidikan (Korsatpen) Kecamatan Ngaliyan yang diselenggarakan di Auditorium Kampus 3 UIN Walisongo, Kamis (2/4).

Dalam sambutannya, Iswar menyampaikan rasa syukur atas terselenggaranya kegiatan tersebut sebagai momentum silaturahmi pasca Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriyah. Ia menekankan bahwa Halal Bi Halal bukan hanya tradisi, tetapi juga sarana memperkuat hubungan antar manusia (*hablum minannas*) setelah menjalankan ibadah Ramadhan (*hablum minallah*).

“Atas nama pribadi dan Pemerintah Kota Semarang, saya mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriyah, mohon maaf lahir dan batin. Semoga seluruh amal ibadah kita selama bulan Ramadhan diterima oleh Allah SWT,” ujarnya.

Lebih lanjut, Iswar menyoroti tantangan dunia pendidikan yang kian kompleks, terutama akibat pesatnya perkembangan teknologi dan pengaruh media sosial terhadap perilaku generasi muda.

Ia mengingatkan, peran guru saat ini tidak lagi sebatas pengajar, melainkan juga sebagai pembentuk karakter.

“Pengaruh media sosial sangat besar. Ini menjadi tanggung jawab bersama, khususnya para pendidik, untuk memastikan anak-anak kita tidak kehilangan nilai-nilai budaya dan jati diri sebagai bangsa Indonesia,” tegasnya.

Ia juga mendorong para pendidik untuk lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi, sekaligus tetap menjaga keseimbangan antara kecakapan digital dan pendidikan karakter.

Kegiatan ini dinilai menjadi momentum strategis untuk memperkuat sinergi antar pendidik di wilayah Kecamatan Ngaliyan, sekaligus memperkuat fondasi kebersamaan dalam mendukung pembangunan Kota Semarang.

“Fondasi yang kuat adalah kebersamaan. Dari sinilah kita bisa melangkah bersama membangun Semarang yang semakin hebat,” pungkasnya.

Halal Bi Halal ini berlangsung dengan penuh kehangatan dan diikuti oleh para kepala sekolah, guru, serta tenaga kependidikan di wilayah Kecamatan Ngaliyan. Acara ini diharapkan dapat mempererat tali silaturahmi sekaligus memperkuat komitmen bersama dalam memajukan dunia pendidikan di Kota Semarang.

Pemkot Semarang Segera Lakukan Perbaikan Rumah Terdampak Puting Beliung Melalui Program RTLH



SEMARANG - Usai meninjau langsung kondisi rumah warga yang terdampak bencana angin puting beliung di RT 5 RW 3 Kelurahan Gedawang, Kecamatan Banyumanik, Wali kota Semarang, Agustina Wilujeng

memastikan bantuan darurat serta proses renovasi rumah melalui program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dapat segera dilaksanakan oleh dinas terkait.

Bencana yang terjadi pada Senin (30/3) tersebut mengakibatkan puluhan rumah warga mengalami kerusakan mulai dari taraf ringan hingga berat.

"Saya berterima kasih kepada warga masyarakat karena gercep. Jadi sore itu saya dapat kabar, setelah sampai di sini ternyata warga masyarakat sudah langsung bergotong-royong, teman-teman BPBD dan Disperkim juga langsung memetakan

bantuan darurat," ujar Agustina di sela-sela tinjauannya, Rabu (8/4).

Berdasarkan data sementara, terdapat 65 rumah yang terdampak di wilayah tersebut, dengan 29 rumah diantaranya mengalami kerusakan yang cukup parah.

Guna meringankan beban keluarga yang terdampak, Pemerintah Kota Semarang telah mendistribusikan berbagai bantuan logistik mulai dari sembako, terpal, hingga tempat tidur sementara.

"Ada juga bantuan uang tunai. Nah, yang harus direnovasi akan masuk dalam daftarnya Disperkim untuk RTLH, mudah-mudahan tim surveinya itu tidak lama karena ini memang sebuah kebutuhan," lanjutnya.

Agustina juga memberikan apresiasi khusus terhadap kearifan lokal warga Gedawang yang menunjukkan sikap guyub rukun dalam membantu sesama saat terjadi bencana. Kerja bakti massal terlihat masih berlangsung di lokasi untuk memperbaiki atap-atap rumah warga yang rusak akibat hempasan angin kencang.

"Sekali lagi saya terima kasih, nomor satu kepada warga masyarakat yang guyub rukun, yang kedua kepada tim Pemkot yang terjun,

dan kepada keluarga yang tertimpa bencana
kami sampaikan keprihatinan," pungkasnya.

Pemkot Semarang Siapkan 1 Juta Liter Air Hadapi El Nino, Distribusi Difokuskan ke Wilayah Rawan Kekeringan



SEMARANG — Menghadapi potensi dampak musim kemarau panjang akibat fenomena El Nino, langkah antisipatif telah dipersiapkan oleh Pemerintah Kota Semarang melalui penyediaan cadangan air bersih dalam jumlah besar. Sebanyak 1 juta liter air telah disiapkan untuk didistribusikan kepada warga yang terdampak kekeringan.

Kesiapsiagaan tersebut ditegaskan sebagai bagian dari mitigasi bencana kekeringan di Kota Semarang, yang diperkirakan akan mencapai puncaknya hingga September 2026. Warga diminta untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap perubahan cuaca yang dinilai semakin tidak menentu.

Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng menyampaikan, dalam upaya penanganan tersebut, kolaborasi lintas instansi akan dilakukan, termasuk dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).

“Mudah-mudahan begitu kita mendengar ada kekurangan air, kita bisa siapkan airnya,” ujarnya, Rabu (8/4).

Perubahan cuaca ekstrem telah mulai dirasakan masyarakat, di mana suhu panas meningkat signifikan. Kondisi ini diperkirakan akan terus berlangsung hingga memasuki puncak musim kemarau.

Agustina menyampaikan bahwa masyarakat perlu lebih sadar terhadap potensi risiko, termasuk bahaya kebakaran akibat daun kering dan angin kencang yang dapat mempercepat penyebaran api.

“Jadi masyarakat harus aware ya. Walaupun kadang-kadang orang berasumsi ini cuaca tidak menentu, tapi ini sudah jelas bahwa kita harus menjaga,” tutur Agustina.

Kota Semarang yang memiliki kombinasi wilayah perbukitan, lembah, sungai, hingga pesisir laut disebut turut memperbesar potensi risiko bencana jika tidak diantisipasi secara matang.

Sementara itu, Kepala BPBD Kota Semarang, Endro Pudyo Martantono, menyampaikan bahwa pola cuaca pada tahun 2026 dinilai lebih ekstrim dibandingkan tahun sebelumnya. Perubahan suhu yang

drastis hingga hujan tiba-tiba disertai angin kencang disebut menjadi fenomena yang perlu diwaspadai.

“Kalau kita bandingkan dengan 2025, 2026 ini relatif fenomenal sekali. Ini cuaca panas, tiba-tiba nanti menjelang siang atau sore hujan deras disertai dengan angin kencang,” jelasnya.

Berdasarkan notifikasi dari BMKG, disebutkan bahwa awal musim kemarau diperkirakan mulai terjadi pada Mei, meskipun hingga April masih berpotensi terjadi hujan dan angin kencang.

Sebagai langkah konkret, BPBD Kota Semarang telah menyiapkan cadangan air bersih sebanyak 1 juta liter yang akan didistribusikan sesuai permintaan warga di wilayah terdampak.

“Kapanpun permintaan warga, di manapun nanti akan kita kirim sesuai permintaan warga,” kata Endro.

Fenomena meningkatnya suhu panas dijelaskan terjadi karena posisi matahari yang mendekati garis khatulistiwa serta berkurangnya tutupan awan, sehingga paparan panas menjadi lebih intens di wilayah Semarang.

Berdasarkan pemetaan kawasan rawan bencana (KRB), wilayah Rowosari disebut

masih menjadi prioritas utama dalam penanganan kekeringan. Kondisi geografis yang sulit dijangkau jaringan air bersih menjadi kendala utama.

Disebutkan bahwa upaya pengeboran sumur dalam di wilayah tersebut tidak menghasilkan air bersih, melainkan gas, sehingga distribusi air tangki menjadi solusi utama. “Rowosari masih menjadi prioritas pertama. Kendalanya di sana PDAM belum bisa masuk,” ungkap Endro.

Selain Rowosari, beberapa wilayah lain seperti Wonosari (Ngaliyan) dan sebagian daerah di Gunungpati juga masuk dalam kategori rawan, meskipun sebagian telah mulai terjangkau jaringan pipanisasi PDAM.

Upaya mitigasi disebut terus dilakukan guna meminimalkan dampak bencana kekeringan agar tidak berulang dan meluas. Pemerintah daerah mengimbau masyarakat untuk turut berperan aktif dalam menjaga lingkungan serta menghemat penggunaan air.

Dengan kesiapan logistik dan koordinasi lintas sektor, diharapkan dampak El Nino di Kota Semarang dapat ditekan seminimal mungkin, terutama bagi warga di wilayah yang selama ini mengalami kesulitan akses air bersih.

Gandeng KPK, Pemkot Semarang Gelar Peningkatan Integritas Aparaturnya



SEMARANG - Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang berkolaborasi dengan KPK RI resmi memulai langkah besar untuk memulihkan kepercayaan diri birokrasi melalui acara "Peningkatan Integritas Aparatur Pemerintah Kota Semarang dalam Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan". Agenda tersebut berlangsung di Ruang Lokakrida, Gedung Moch Ichsan Semarang, Jumat 10 April 2026.

Acara ini ditandai dengan penandatanganan Pakta Integritas oleh 512 aparatur, termasuk pejabat struktural dan anggota DPRD Kota Semarang. Hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Ketua KPK Republik Indonesia, Dr. Fitroh Rohcahyanto, SH MH, dan Kapolrestabes Semarang yang saat ini promosi jabatan menjadi Dirpamobvit Korsabhara Baharkam Polri, Brigjen Pol. M Syahduddi.

Turut hadir, Kepala Kejari Semarang, Dr. Andhie Fajararianto, SH, MH serta Ketua DP2K Kota Semarang, Prof. Soedharto P. Hadi MES PhD. Fitroh dalam sesi tausiyahnya membedah esensi integritas melalui konsep IDOLA sebagai standar karakter baru bagi ASN Kota Semarang.

Akronim ini menekankan lima nilai utama: Integritas, Dedikasi, Objektif, Loyalitas, dan Adil. Integritas itu sederhana, yakni sinkronisasi antara apa yang ada di hati, pikiran, ucapan, dan perbuatan. Sistem digital secanggih apapun hanya alat bantu yang objektif, tetapi manusianya harus memiliki 'rem' internal.

"Caranya adalah melatih diri untuk sabar, syukur, dan ikhlas agar kita tidak mudah terjebak pada ego jabatan maupun harta," ungkap Fitroh. Di sisi lain, Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng, secara terbuka menyoroti angka Survei Penilaian Integritas (SPI) kota yang menyentuh level rawan di angka 70,29.

Dia menegaskan perlunya evaluasi total mengingat skor tersebut mencerminkan kondisi kerentanan yang sebagian besar dipicu oleh persepsi internal yang merasa belum sepenuhnya mampu melawan praktik korupsi. Nilai dari internal memberikan

kontribusi sangat tinggi terhadap kerentanan saat ini.

"Harus jujur melihat data bahwa dalam empat tahun terakhir skor kita cenderung turun. Publik dan media menilai kita sudah bagus, tetapi justru dari internal yang belum percaya diri menghadapi bayang-bayang korupsi. Melalui komitmen hari ini, kita harus membalikkan tren tersebut supaya pada penilaian mendatang skor kita bisa melonjak melewati angka 75," ujarnya.

Menurut dia, upaya memperkuat integritas ini dilakukan guna memutus trauma kolektif yang menghinggap di tubuh birokrasi sejak tahun 2011 hingga rangkaian peristiwa hukum pada periode 2023-2024. Rentetan sejarah kelam tersebut dinilainya meninggalkan dampak psikologis berkepanjangan bagi ASN.

Ia menuturkan, mereka seringkali merasa tidak tenang dalam menjalankan tugas pelayanan publik. Proses hukum yang mengemuka di masa lalu itu dampaknya sangat lama, bahkan bisa terasa sampai tiga tahun kemudian.

"Saya merasakan adanya tekanan moral luar biasa di kalangan ASN yang membuat mereka tidak bisa bekerja dengan maksimal. Kita ingin menghentikan siklus itu sekarang juga. Kita ingin bekerja dengan tenang, tanpa

hambatan ketakutan yang mengganggu pelayanan kepada masyarakat," lanjutnya.

Sebagai strategi pemulihan, Agustina mengajak seluruh jajarannya untuk "hijrah" dari pola kerja yang dihantui ketakutan menjadi budaya kerja yang menjadikan integritas sebagai gaya hidup. Pembekalan hari ini memberikan semacam pedoman yang membawa ketenangan dalam bekerja.

"Kami ingin berhijrah dari cara kerja yang kaku karena takut melanggar undang-undang, menuju pribadi yang berbudaya anti korupsi secara alami. Jika integritas sudah menjadi gaya hidup, maka kita akan berani mengatakan tidak pada praktik KKN bukan karena takut pasal, tapi karena itu sudah menjadi prinsip diri," tegas Agustina.

Pihaknya menuturkan, sinergi kolektif ini juga melibatkan 50 anggota DPRD Kota Semarang sebagai mitra strategis dalam mengawal transparansi pemerintahan daerah. Melalui pondasi kesejahteraan ASN Semarang yang merupakan tertinggi di Jawa Tengah, harapannya, aparatur dapat lebih profesional dan objektif dalam melayani masyarakat.

"Hari ini kita memulai suasana baru untuk meningkatkan indeks integritas kita. Saya ingin ASN Kota Semarang berani bersikap jujur dan profesional tanpa harus merasa

tertekan oleh bayang-bayang masa lalu. Mari kita jadikan integritas ini sebagai budaya yang membuat kita nyaman melayani warga, sehingga Kota Semarang benar-benar bersih dari praktik korupsi, kolusi, maupun nepotisme," ujarnya.

**Pemkot Semarang Perkuat Pengawasan dan Kolaborasi Lintas Sektor Atasi Risiko
Kecelakaan Silayur**



SEMARANG - Pemerintah Kota atau Pemkot Semarang menegaskan komitmennya untuk memperkuat pengawasan serta mempercepat penanganan risiko kecelakaan di kawasan tanjakan Silayur, Jalan Prof. Hamka, Kecamatan Ngaliyan, menyusul insiden yang kembali terjadi pada Jumat (10/4) lalu.

Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng, menyampaikan bahwa langkah penanganan dilakukan melalui koordinasi lintas sektor bersama kepolisian, Dinas Perhubungan, serta pelaku usaha yang beraktivitas di kawasan tersebut. Upaya ini difokuskan pada penertiban kendaraan berat dan penguatan sistem pengawasan di lapangan.

“Tata ruang kita itu memang keliru, ini harus diakui. Dan dulu itu pembuatan lajur kemiringannya itu menurut saya memang tidak layak untuk mobil-mobil besar. Mobil-mobil dengan tonase yang berat,” ujar Agustina, Sabtu (11/4).

Dirinya menjelaskan, jalur tersebut merupakan akses penting bagi aktivitas industri di wilayah sekitar, sehingga penanganannya memerlukan pendekatan komprehensif dan kolaboratif. Pemerintah kota, kata dia, terus berkoordinasi untuk memastikan kendaraan berat dapat lebih tertib sesuai ketentuan yang berlaku.

“Maka kami tadi berkoordinasi dan mudah-mudahan nanti dari kepolisian dan Dinas Perhubungan lebih bisa menertibkan. Karena kalau berat itu pasti meluncur, pasti,” tegasnya.

Lebih lanjut, Agustina mengungkapkan bahwa perbaikan infrastruktur secara menyeluruh membutuhkan anggaran besar, sehingga saat ini Pemkot memprioritaskan langkah-langkah penguatan pengawasan dan kolaborasi sebagai solusi yang dapat segera dilakukan.

Menurut dia, sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan pelaku usaha menjadi kunci untuk meminimalisir risiko kecelakaan berulang. Ia juga menekankan pentingnya kesadaran bersama dalam menjaga keselamatan di jalan.

“Satu-satunya cara bagaimana? Kita kolaborasi Dinas Perhubungan, kepolisian dengan para pengusaha yang truknya lewat situ. Ini harus dikoordinasikan kembali. Sudah dikolaborasikan terus-terus tapi tetap saja terjadi kecelakaan,” katanya.

Sebagai langkah lanjutan, Pemerintah Kota Semarang terus mendorong penguatan koordinasi lintas pihak serta peningkatan kesadaran bersama dalam mematuhi aturan yang berlaku, khususnya bagi kendaraan angkutan barang yang melintas di jalur tersebut.

Agustina menegaskan, penanganan kawasan Silayur membutuhkan komitmen kolektif agar keselamatan pengguna jalan dapat terjaga secara berkelanjutan.

Bersama Bea Cukai, Pemkot Semarang Musnahkan Jutaan Rokok Ilegal dan Ribuan Minuman Beralkohol



SEMARANG – Pemerintah Kota atau Pemkot Semarang bersama Bea Cukai Semarang menggelar kegiatan pemusnahan Barang Kena Cukai (BKC) ilegal berupa jutaan batang rokok dan ribuan liter minuman beralkohol di halaman Balai Kota Semarang pada Rabu (15/4). Pemusnahan ini merupakan hasil sinergi intensif periode Juni hingga Desember 2025 untuk melindungi masyarakat dari peredaran barang ilegal serta mengamankan penerimaan negara dari sektor cukai.

"Terima kasih kawan-kawan ini kami bersama-sama dengan berbagai macam stakeholder menjaga supaya peredaran rokok non cukai itu bisa kita kurangi. Walaupun tadi disampaikan dalam diskusi bahwa Kota Semarang ini menjadi daerah lintasan saja, tetapi dengan adanya seremoni hari ini membuat para pedagang rokok non cukai berpikir untuk mengedarkan rokoknya di

Kota Semarang," ujar Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng.

Dalam sambutannya, Agustina menekankan pentingnya menjaga iklim perdagangan yang sehat di wilayah karesidenan Semarang agar tidak dirusak oleh persaingan tidak sehat dari produk ilegal. Selain itu, ia juga menyoroti peran penting Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) yang di Kota Semarang mencapai sekitar Rp29 miliar per tahun untuk mendukung kesejahteraan buruh pabrik rokok dan layanan kesehatan.

"29 miliar naik turun kan tergantung pendapatan cukai tahun lalu terus kita dapat bagiannya. Bagian-bagiannya itu ada persentasenya, misalnya 10% digunakan untuk kesehatan. Kesehatan bagi para buruh pabrik rokok dan keluarganya ini. Kemudian ada 20% untuk pendidikan, ada berapa persen lagi untuk ketenagakerjaan. Semuanya ada persentasenya," tambah Agustina.

Barang bukti yang dimusnahkan mencakup 7.397.830 batang rokok ilegal jenis sigaret dan 3.318 liter Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA). Total nilai barang tersebut ditaksir mencapai Rp11.487.708.690,00, dengan potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan dari sektor cukai, PPN Hasil

Tembakau, dan pajak rokok sebesar lebih dari Rp7,6 miliar.

"Penindakan ini merupakan periode Juni sampai dengan Desember tahun 2025. Total yang kita musnahkan hari ini sekitar 7,3 juta batang. Nilai barang yang kita musnahkan tersebut adalah sekitar 11,4 miliar. Jadi potensi kerugian di sana yang bisa kita selamatkan itu sekitar 7,6 miliar," jelas Kepala Kantor Bea Cukai Semarang, Mochamad Syuhadak.

Petugas di lapangan mengungkap berbagai modus operandi pengiriman barang ilegal yang kian canggih untuk mengelabui pemeriksaan, mulai dari penggunaan mobil pribadi yang dimodifikasi hingga penyamaran melalui jasa pengiriman barang. Penindakan banyak dilakukan di titik-titik strategis seperti gerbang tol utama di wilayah Semarang.

"Modusnya salah satunya mereka menggunakan mobil pribadi. Itu dipakai dengan memodifikasi suspensinya. Bahkan juga ada yang ditaruh di atasnya itu kelapa-kelapa sehingga mengelabui petugas yang ada di lapangan sana. Ada juga melalui jasa pengiriman, mereka itu misdeclaration. Menyebutnya dengan sarung, peci, parfum, buku, segala macam untuk mengelabui petugas," ungkap Mochamad Syuhadak.

Proses pemusnahan dilakukan secara simbolis di Balai Kota sebelum nantinya seluruh barang bukti rokok dibakar secara termal menggunakan teknologi insinerasi di fasilitas yang tersertifikasi guna memastikan barang tidak lagi memiliki nilai ekonomis dan aman bagi lingkungan.

Agustina mengajak seluruh elemen masyarakat untuk aktif melapor jika menemukan indikasi peredaran barang ilegal di lingkungannya demi mewujudkan Semarang yang bersih.

"Proses pemusnahan ini memberikan stempel resmi kepada publik bahwa apapun yang disita itu diteruskan, dimusnahkan, harus musnah. Kita sepakat akan terus menjaga perdagangan rokok ilegal supaya tidak masuk di wilayah kita," pungkas Agustina.

MBG Jadi Sorotan Nasional, Wali Kota Agustina Ajak Daerah Perkuat Sinergi



SEMARANG – Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng, secara resmi membuka Dialog Nasional Praktik Baik Makan Bergizi Gratis (MBG) di Gumaya Hotel Semarang, Rabu (29/4). Kegiatan ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat sinergi lintas sektor dalam mendukung keberhasilan program pemenuhan gizi masyarakat.

Dalam sambutannya, Agustina menegaskan bahwa MBG bukan sekadar program jangka pendek, melainkan investasi besar dalam pembangunan sumber daya manusia menuju Indonesia yang lebih maju.

“Program ini adalah gerakan bersama untuk menyiapkan generasi masa depan yang sehat, kuat, dan produktif. Pembangunan bangsa harus dimulai dari pemenuhan kebutuhan dasar, termasuk kecukupan gizi masyarakat,” ujarnya.

Dialog nasional ini dihadiri oleh perwakilan Badan Gizi Nasional, akademisi, pemerintah daerah, serta mitra pembangunan, termasuk perwakilan internasional dari Milan Urban Food Policy Pact atau MUFPP. Forum ini menjadi ruang berbagi pengalaman dan praktik baik sekaligus merumuskan solusi atas berbagai tantangan implementasi MBG di daerah-daerah.

Sejumlah isu strategis menjadi fokus pembahasan, antara lain penguatan rantai pasok pangan, pemerataan distribusi, serta standarisasi menu sesuai kebutuhan tiap jenjang pendidikan.

Agustina menambahkan, kolaborasi multi pihak menjadi kunci dalam mengoptimalkan pelaksanaan program. Melalui forum ini, diharapkan lahir formulasi kebijakan yang lebih adaptif dan aplikatif di lapangan.

“Kita memanfaatkan forum ini untuk bertukar pengalaman, mengidentifikasi tantangan, serta mengadopsi praktik terbaik dari daerah lain, sehingga pelaksanaan MBG ke depan semakin efektif dan tepat sasaran,” imbuhnya.

Sementara itu, Deputy Bidang Penyediaan dan Penyaluran Badan Gizi Nasional RI, Suardi Samiran, menekankan pentingnya

peran aktif pemerintah daerah dalam memastikan kualitas pelaksanaan program, khususnya melalui pengawasan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

“Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam memastikan keamanan dan kualitas pangan. Diperlukan pengawasan rutin agar layanan yang diberikan benar-benar memenuhi standar,” tegasnya.

Sebagai bentuk komitmen, Pemerintah Kota Semarang hingga tahun 2026 telah mengoperasikan 174 SPPG yang menjangkau lebih dari 281 ribu penerima manfaat. Capaian ini terus diperkuat melalui penyempurnaan sistem pengelolaan dapur dan distribusi layanan agar semakin efisien dan merata.

Agustina menegaskan, partisipasi Kota Semarang dalam forum ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas layanan.

“Kami terus berbenah dan terbuka untuk belajar. Forum ini menjadi kesempatan penting untuk memperkuat sistem, sekaligus memastikan layanan MBG dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat,” pungkasnya.

Indeks Pemberdayaan Gender Kota Semarang Tembus 78,71, Peran Perempuan Kian Kuat



SEMARANG - Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) di Kota Semarang menunjukkan capaian yang mengembirakan. Pada tahun 2025, IPG Kota Semarang tercatat mencapai 78,71, mencerminkan semakin kuatnya peran perempuan dalam berbagai sektor pembangunan.

Hal ini disampaikan wali kota Semarang, Agustina Wilujeng dalam upacara peringatan Hari Kartini ke-147 yang digelar Pemerintah Kota Semarang di Halaman Balai Kota, Selasa (21/4).

Agustina menegaskan bahwa tingginya capaian tersebut tidak lepas dari kontribusi nyata perempuan di berbagai bidang, mulai dari kesehatan, lingkungan, hingga ekonomi berbasis masyarakat.

Salah satu pilar utama adalah peran sekitar 16.000 kader posyandu yang secara sukarela berkontribusi dalam menjaga kesehatan masyarakat. Praktik ini bahkan mendapat apresiasi dari California State University sebagai contoh penguatan peran masyarakat berbasis komunitas.

“Ketika saya diundang di California State University, mereka sangat mengapresiasi bagaimana para kader Posyandu mampu menjaga kesehatan masyarakat di sekitarnya. Ini menjadi contoh bagaimana rasa tanggung jawab sosial bisa tumbuh dari masyarakat,” ujar Agustina.

Selain sektor kesehatan, kontribusi perempuan juga terlihat dalam gerakan pengelolaan lingkungan Semarang Wegah Nyampah melalui bank sampah. Dengan keterlibatan aktif kader PKK dan komunitas, aktivitas ini turut mendorong perputaran ekonomi masyarakat hingga mencapai Rp2,2 miliar.

Komitmen tersebut juga diperkuat melalui pembentukan 177 Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak yang tersebar di seluruh wilayah Kota Semarang. Kelurahan menjadi garda terdepan dalam memastikan perempuan dan anak mendapatkan

perlindungan sekaligus ruang untuk berkembang.

Capaian Indeks Pemberdayaan Gender ini menjadi indikator bahwa perempuan di Kota Semarang tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga telah berperan sebagai subjek utama perubahan.

“Ketika perempuan berdaya, keluarga menjadi kuat, masyarakat menjadi tangguh, dan Kota Semarang akan semakin hebat,” tegas Agustina.

Melalui momentum ini, Pemerintah Kota Semarang terus mendorong perempuan untuk meningkatkan kapasitas, berani mengambil peran, serta memperluas kontribusi di berbagai bidang guna menjaga tren positif pemberdayaan gender di masa mendatang.

TMMD Sengkuyung Tahap II Wujud Kebersamaan TNI, Rakyat dan Pemkot Semarang



SEMARANG - Mewakili Wali kota Semarang, Agustina Wilujeng, Wakil Wali Kota Semarang, Iswar Aminuddin, secara resmi membuka program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Sengkuyung Tahap II Tahun Anggaran 2026 yang dipusatkan di Kelurahan Wates, Kecamatan Ngaliyan, pada Rabu (22/4). Pembukaan ini ditandai dengan penandatanganan serta penyerahan Berita Acara Serah Terima Program TMMD kepada Dansatgas TMMD/Dandim 0733 Kota Semarang. Momentum ini menjadi sangat istimewa karena bertepatan dengan rangkaian peringatan Hari Jadi ke-479 Kota Semarang yang mengusung tema "Semarang Bergerak, Semarang Semakin Hebat".

"Alhamdulillah, pada pagi hari ini, mewakili Ibu Wali Kota, kita melakukan seremoni pembukaan TNI Manunggal Membangun Desa Sengkuyung Tahap 2 Tahun 2026. Ini adalah bentuk wujud dari pada

kebersamaan," ujar Iswar usai memimpin upacara pembukaan pada Rabu (22/4).

Program TMMD kali ini mencakup berbagai rencana pembangunan fisik, mulai dari pembuatan saluran air sepanjang 110 meter, pembangunan tiga unit toilet lapangan, rehabilitasi 10 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bersama BAZNAS, hingga penyediaan tandon air bersih dari PDAM. Tak hanya infrastruktur, kegiatan non fisik juga gencar dilakukan melalui berbagai sosialisasi, seperti edukasi ketahanan pangan, pelayanan KB, hingga pelatihan pemasaran digital bagi remaja di Kelurahan Wates guna memperkuat kemandirian ekonomi warga.

"Jadi program-program dari TNI, setiap tahunnya ada, ini bersamaan menjelang hari ulang tahun atau hari jadi Kota Semarang," imbuh Iswar menekankan keselarasan program ini dengan hari penting bagi warga Semarang.

Dalam pelaksanaannya, TMMD Sengkuyung Tahap II ini melibatkan sinergi berbagai pihak, mulai dari Forkopimda, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), instansi pendukung, hingga masyarakat setempat. Sinergi ini juga dibarengi dengan pencanangan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) untuk memastikan

bahwa derap pembangunan dirasakan secara nyata hingga tingkat kelurahan melalui kerja bakti dan kepedulian sosial.

"Mudah-mudahan kegiatan kita ini mampu semakin mempererat hubungan terhadap pemerintah-pemerintah. Baiklah, kita harus berpindah ke masyarakat. Alhamdulillah, hari ini TNI, Polri bersama-sama dengan masyarakat, organisasi masyarakat, semuanya bareng-bareng hadir," tuturnya.

Program yang direncanakan berlangsung hingga 21 Mei 2026 ini diharapkan dapat menjaga aset pembangunan yang telah diberikan serta terus memupuk energi positif di seluruh penjuru kota. Pemerintah Kota Semarang berharap manunggalnya TNI dan rakyat melalui TMMD ini mampu menjadi pilar utama dalam mewujudkan kesejahteraan warga dan memastikan tidak ada satupun masyarakat yang tertinggal dalam proses pembangunan menuju Semarang yang semakin hebat.

Dari Rusak ke Mulus: Sentuhan Wali kota Agustina Bersama DPR RI Sulap Jalan Pramuka Jadi Nadi Baru Mobilitas Kota



SEMARANG - Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng, mempercepat penanganan infrastruktur di berbagai wilayah, mulai dari peningkatan jalan strategis, perbaikan ruas lingkungan, hingga pengerukan saluran air.

Langkah ini dilakukan guna memastikan mobilitas warga tetap lancar, meningkatkan keselamatan pengguna jalan, sekaligus mengurangi risiko genangan dan banjir.

Salah satu capaian utama terlihat pada Jalan Pramuka, Kelurahan Pudakpayung yang telah selesai diperbaiki dan diresmikan bersama dengan Anggota Komisi V DPR RI, Mochamad Herviano Widyatama pada Selasa (28/4). Jalan tersebut kini dapat dimanfaatkan masyarakat sebagai salah satu akses penting di kawasan atas Kota Semarang.

Proyek perbaikan Jalan Pramuka merupakan bagian dari program Inpres Jalan Daerah (IJD) dengan nilai kontrak mencapai Rp18,9 miliar, mencakup pelebaran jalan dari 4,5 meter menjadi 5,5 meter serta pembangunan drainase sepanjang 2,3 kilometer.

Agustina menyampaikan bahwa Jalan Pramuka memiliki peran strategis sebagai penghubung kawasan pendidikan dan permukiman di wilayah atas Kota Semarang.

“Jalan Pramuka ini adalah ikon Kota Semarang bagian atas yang menghubungkan dua pusat pendidikan besar, UNDIP dan UNNES. Jalan ini menjadi jalur utama yang banyak dilalui mahasiswa dan masyarakat setiap hari,” ujar Agustina.

Menurutnya, perbaikan ini membawa dampak langsung bagi masyarakat, mulai dari perjalanan yang lebih cepat, berkurangnya risiko kecelakaan akibat jalan rusak, hingga meningkatnya kenyamanan aktivitas harian warga.

“Peresmian ini bukan sekadar perbaikan jalan, tetapi jalur penghubung harapan yang membuka akses, memperkuat konektivitas, dan mendorong aktivitas ekonomi masyarakat,” lanjutnya.

Pembangunan Jalan Pramuka tersebut merupakan hasil kolaborasi antara pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Jawa Tengah–DIY, serta dukungan DPR RI Komisi V.

Anggota DPR RI Komisi V, Mochamad Herviano Widyatama, menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kebutuhan infrastruktur di Kota Semarang agar dapat terealisasi secara optimal.

“Program pembangunan ini merupakan bagian dari kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah yang terus kami dorong. Harapannya, infrastruktur yang dibangun dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta mendukung konektivitas wilayah,” ujar Herviano.

Menegaskan kembali pentingnya sinergi tersebut, Agustina menyampaikan bahwa percepatan pembangunan di Kota Semarang sangat bergantung pada kolaborasi lintas pihak.

“Wali Kota Semarang tidak bisa berjalan sendiri. Dukungan pemerintah pusat melalui Kementerian PU, peran DPR RI, serta sinergi berbagai pihak menjadi kunci agar pembangunan bisa berjalan lebih cepat dan manfaatnya langsung dirasakan masyarakat,” tegas Agustina.

Agustina Luncurkan Aplikasi SDGs, Dari Kependudukan hingga Transportasi, Semua Layanan Kini Satu Aplikasi



SEMARANG - Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng resmi meluncurkan aplikasi “SDGs atau Semarang dalam Genggaman saya” pada puncak Resepsi Hari Jadi ke-479 Kota Semarang, Minggu (3/5) malam di lapangan Pancasila Simpang Lima Semarang. Peluncuran ini menjadi langkah konkret Pemerintah Kota Semarang dalam menghadirkan layanan publik berbasis digital yang terintegrasi dalam satu platform.

Di bawah kepemimpinan Agustina Wilujeng, Pemkot Semarang terus mendorong transformasi layanan agar lebih sederhana, terhubung, dan mudah diakses masyarakat. Melalui aplikasi ini, berbagai layanan mulai dari kependudukan, kesehatan, transportasi, hingga pengaduan dapat diakses dalam satu sistem terpadu.

Peluncuran dilakukan secara simbolis oleh Wali kota Agustina bersama Wakil Wali

Kota, Iswar Aminuddin jajaran Forkopimda Kota Semarang, serta mitra internasional.

Salah satu inovasi utama dalam aplikasi ini adalah identitas digital berbasis blockchain melalui SDGs ID. Dengan sistem ini, masyarakat cukup memiliki satu identitas untuk berbagai kebutuhan layanan, seperti kartu Puskesmas, kartu siswa, hingga akses transportasi publik.

“Dengan satu identitas digital, masyarakat bisa mengakses berbagai layanan. Ini bagian dari upaya kita membangun sistem yang lebih modern dan terintegrasi,” ujar Agustina.

Selain itu, aplikasi ini juga menghadirkan fitur Semarang Virtual Tour, yang memungkinkan masyarakat menjelajahi berbagai sudut Kota Semarang secara digital.

Melalui peluncuran ini, Agustina menegaskan arah pembangunan Kota Semarang yang semakin adaptif terhadap teknologi, dengan layanan publik yang lebih efisien dan terhubung dalam satu genggaman.

Pengembangan platform ini juga mendapat dukungan dari Korea Internet & Security

Agency (KISA) sebagai otoritas keamanan siber Korea.

Dalam peluncuran tersebut, turut hadir perwakilan KISA, Ms. Kwon Hyuno, sebagai bentuk dukungan terhadap kerja sama internasional di bidang transformasi digital.

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian atau Diskominfo Kota Semarang, Didik Dwi Hartono menegaskan, kehadiran SDG's menjadi bagian dari komitmen Pemkot Semarang dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi.

Dengan peluncuran ini, Kota Semarang semakin menegaskan langkahnya sebagai salah satu daerah yang aktif mendorong inovasi digital dalam tata kelola pemerintahan.

"Aplikasi ini sudah bisa diunduh masyarakat melalui App Store dan Play Store. Harapannya, masyarakat bisa lebih mudah mengakses layanan tanpa harus datang langsung ke kantor," pungkasnya.

Kurangi Cumi-Cumi Darat, 41 Armada BRT Trans Semarang Diremajakan



SEMARANG - Wali kota Semarang, Agustina Wilujeng mulai melakukan peremajaan terhadap puluhan armada BRT Trans Semarang. Upaya ini dilakukan untuk menekan persoalan klasik seperti 'cumi-cumi darat' atau asap hitam pekat yang dikeluarkan kendaraan tersebut.

Agustina mengatakan peremajaan armada menjadi bagian dari komitmennya untuk meningkatkan kualitas layanan transportasi umum di Kota Semarang.

"Dari target 130 baru terealisasi 41 armada yang telah diremajakan. Ini salah satu komitmen kami memperbaiki layanan transportasi umum di Semarang," ucap Agustina di Balai Kota Semarang, Sabtu (2/5).

Ia menjelaskan peremajaan armada itu mencakup berbagai jenis armada, mulai dari bus besar di koridor utama hingga bus feeder yang menjangkau kawasan permukiman. Pada tahap awal, armada baru telah

dioperasikan di empat koridor, yakni Koridor 4, Koridor 8, serta Feeder 1 dan Feeder 3.

Lebih lanjut, Agustina membeberkan armada baru yang telah siap, baik secara fisik maupun administrasi langsung dioperasikan. Pihaknya melalui Dishub Kota Semarang menargetkan seluruh proses peremajaan rampung pada September 2026, termasuk pengadaan bus listrik.

"Targetnya September selesai sebagai batas akhir. Nanti ada sekitar 130 armada baru termasuk bus listrik," paparnya.

Peremajaan armada menjadi langkah penting untuk mengatasi persoalan operasional yang kerap terjadi akibat usia kendaraan yang sudah tua. Dengan armada baru, diharapkan gangguan seperti mogok di jalan dapat ditekan.

"Kasus di lapangan memang banyak karena usia bus sudah tua. Harapannya dengan bus baru ini lebih siap kerja dan bisa mengantisipasi kasus-kasus seperti mogok," terangnya.

Agustina memaparkan bahwa peremajaan armada BRT Trans menjadi bukti keseriusan Pemkot Semarang menghadirkan moda transportasi umum yang nyaman. Dia berharap langkah ini dapat mengakhiri

persoalan bus mogok yang selama ini dikeluhkan masyarakat.

"Nanti sampai September kita ada 130 bus yang diremajakan. Selamat tinggal cumi-cumi darat," ungkap Agustina.

Selain itu, Pemkot Semarang juga bakal mengoperasikan bus listrik sebagai bagian dari peremajaan armada. Ke depan, jumlah bus listrik diharapkan terus bertambah untuk mengurangi polusi dan emisi gas buang di perkotaan.

"Doakan kekuatan fiskal Pemkot Semarang agar bisa menambah jumlah armada, termasuk pembiayaan operasionalnya. Walaupun armada ini dari pihak ketiga, biaya operasional tetap harus ditanggung pemerintah kota," tandasnya.

Walikota Agustina Sulap Sampah Jadi Berkah di Lumpia Vaganza, Ribuan Warga Serbu Simpang Lima



SEMARANG – Kawasan Simpang Lima berubah jadi lautan antusiasme, Minggu (3/5), saat ribuan warga tumpah ruah mengikuti Lumpia Vaganza, inovasi kreatif dalam rangka Hari Jadi ke-479 Kota Semarang yang sukses memadukan gerakan peduli lingkungan dengan pelestarian kuliner khas.

Melalui skema sederhana namun berdampak, warga cukup menukarkan 5 botol plastik bekas untuk mendapatkan 1 voucher lumpia, dengan maksimal dua voucher per orang. Program ini bukan sekadar gimmick perayaan, tetapi strategi cerdas Pemerintah Kota Semarang dalam membangun budaya baru: sampah bernilai, lingkungan lebih bersih.

Penukaran botol plastik telah dimulai sejak 26–30 April 2026 melalui jaringan bank sampah di tingkat kelurahan, dan memuncak di Lapangan Simpang Lima pada hari

pelaksanaan. Hasilnya, ribuan botol plastik berhasil dikumpulkan sekaligus mengedukasi masyarakat secara langsung.

Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng, menegaskan bahwa perubahan besar berawal dari langkah sederhana yang dilakukan bersama.

“Kebersihan lingkungan adalah tanggung jawab kita bersama. Mari mulai dari diri sendiri. Buang sampah pada tempatnya, dan botol plastik bisa kita tukar jadi lumpia,” tegasnya.

Tak hanya berdampak pada lingkungan, Lumpia Vaganza juga menjadi panggung pemberdayaan ekonomi lokal. Sebanyak 33 UMKM klaster lumpia di ibu kota Jawa Tengah dilibatkan untuk memenuhi penukaran voucher, memastikan perputaran ekonomi tetap hidup sekaligus menguatkan identitas lumpia sebagai ikon kuliner Semarang.

Antusiasme warga terlihat dari antrean panjang di titik-titik penukaran. Banyak peserta bahkan telah menyiapkan botol plastik sejak beberapa hari sebelumnya—bukti bahwa gerakan ini diterima dan dijalankan dengan penuh kesadaran.

Melalui Lumpia Vaganza, Pemerintah Kota Semarang di bawah kepemimpinan Agustina menghadirkan perayaan yang bukan hanya meriah, tetapi juga bermakna—menggerakkan, memberdayakan, dan menanamkan kepedulian lingkungan dalam kehidupan sehari-hari warga.

Lewat Satpol PP Goes to School, Pemkot Semarang Hadir Ciptakan Generasi Sehat dan Berkarakter



SEMARANG - Wakil Wali Kota Semarang, Iswar Aminuddin menegaskan komitmen Pemerintah Kota atau Pemkot Semarang dalam menciptakan generasi muda yang sehat dan berkarakter melalui penguatan edukasi langsung ke sekolah-sekolah. Hal ini disampaikan Iswar saat menghadiri kegiatan Satpol PP Goes to School dalam rangka Sosialisasi Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di SMP Negeri 11 Semarang, Selasa (5/5).

Dalam arahannya, Iswar menekankan bahwa kehadiran jajaran Pemkot Semarang, khususnya Satpol PP, berperan sebagai pamong yang membimbing masyarakat. Program edukasi ke sekolah-sekolah ini bertujuan memastikan anak-anak Kota Semarang siap menghadapi tantangan masa depan dengan kondisi fisik dan mental yang prima.

“Saya melihat anak-anak SMP 11 memiliki komitmen tinggi untuk menjadi generasi

Kota Semarang yang berkarakter. Hari ini tema kita adalah bebas rokok, karena kita ingin memastikan kalian semua sehat untuk menerima estafet kepemimpinan bangsa,” ujar Iswar di hadapan para siswa.

Dalam kesempatan tersebut, Iswar juga mengajak para siswa untuk berani tampil berbeda dengan tidak mengikuti kebiasaan merokok, serta fokus mengejar cita-cita menuju Indonesia Emas 2045.

“Siapa yang ingin membawa Indonesia menjadi negara maju pada tahun 2045? Jika kalian semangat hari ini, besok kalian akan sukses. Saya berdoa, semoga di antara kalian ada yang menjadi Menteri di masa depan,” tambahnya menyemangati para siswa.

Selain sebagai bentuk edukasi karakter, kegiatan ini merupakan implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok, yang mewajibkan tempat belajar-mengajar seperti sekolah menjadi area bebas asap rokok. Pemkot Semarang berkomitmen untuk terus memperluas jangkauan sosialisasi ini ke sekolah lainnya.

Kegiatan yang berlangsung interaktif ini juga dihadiri Kepala Satpol PP Kota Semarang

beserta jajaran Forkopimcam Gajah Mungkur, termasuk unsur kecamatan dan kelurahan, guna memperkuat sinergi dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia di wilayah.

Perkuat Transparansi dan Cegah Kebocoran, Retribusi Sampah Kini Dibayar Non Tunai



SEMARANG — Pemerintah kota atau Pemkot Semarang melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) meluruskan informasi terkait isu kebocoran retribusi persampahan sebesar Rp20 miliar yang ramai diberitakan.

Kepala DLH, Glory Nasarani menegaskan, persoalan tersebut merupakan kejadian lama saat sistem pembayaran retribusi masih dilakukan secara tunai atau cash. Saat ini, di bawah kepemimpinan Wali kota Agustina Wilujeng, Pemerintah Kota Semarang sudah menerapkan sistem pembayaran non tunai atau cashless untuk meminimalisir potensi kebocoran.

“Yang perlu dipahami masyarakat, kebocoran itu terjadi pada sistem lama ketika pembayaran masih tunai. Sekarang sistemnya sudah non tunai,” ujar Glory.

Menurutnya, pada sistem lama pembayaran dilakukan secara manual sehingga ada potensi penerimaan yang tidak seluruhnya

masuk ke Kas Daerah. Kondisi itu kemudian menjadi bahan evaluasi bagi Pemkot Semarang untuk memperbaiki tata kelola retribusi persampahan.

Saat ini pembayaran retribusi sampah sudah dilakukan secara digital melalui Virtual Account, ID Billing, dan Tap Cash. Dengan sistem tersebut, pembayaran dari masyarakat maupun pelaku usaha langsung masuk ke Kas Daerah.

“Semua pembayaran sekarang tercatat secara digital sehingga lebih transparan dan akuntabel,” jelasnya.

Glory juga menerangkan, retribusi persampahan merupakan pembayaran atas layanan pengangkutan dan pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Semarang, termasuk pelayanan di TPA Jatibarang. Besaran tarifnya telah diatur dalam Perda Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2025.

Di bawah kepemimpinan Wali kota Agustina Wilujeng, Pemkot Semarang memastikan pembenahan sistem retribusi akan terus dilakukan untuk meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan daerah sekaligus mengoptimalkan pendapatan daerah dari sektor persampahan.

Wali kota Semarang, Agustina Wilujeng juga terus berkomitmen untuk mewujudkan visi "Semarang Bersih" yang diantaranya dilakukan melalui gerakan zero waste berbasis masyarakat, pembentukan Satgas Berlian (Satuan Petugas Bersih Sungai dan Lingkungan) di setiap kelurahan hingga optimalisasi bank sampah di seluruh wilayah Kota Semarang guna mereduksi volume buangan ke TPA.

Kolaborasi Bersama Pemerintah Pusat, Walikota Agustina Siapkan Penanganan Konkret Banjir di Mangkang Kulon



SEMARANG - Penanganan banjir akibat jebolnya tanggul Sungai Plumbon di Kelurahan Mangkang Kulon, Kecamatan Tugu, Kota Semarang memasuki tahap penanganan darurat hingga rencana jangka panjang.

Pemerintah pusat dan daerah kini berkolaborasi mempercepat normalisasi sungai, pembangunan hunian sementara (Huntara) hingga pembebasan lahan untuk pelebaran sungai.

Langkah tersebut melibatkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kota Semarang, serta Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali-Juana.

Kepala BNPB, Suharyanto, mengatakan banjir yang sempat merendam sejumlah wilayah di Semarang kini mulai tertangani.

Penutupan sementara titik tanggul jebol telah dilakukan sebagai langkah darurat agar aliran air tidak kembali meluap ke pemukiman warga.

“BBWS sudah mengambil langkah darurat untuk menutup sumber banjir. Setelah ini akan dilakukan penanganan permanen agar kejadian serupa tidak kembali terulang,” ujar Suharyanto saat meninjau lokasi banjir di Semarang, Selasa (19/5).

Menurutnya, pemerintah juga telah menyiapkan langkah besar berupa normalisasi dan pelebaran Sungai Plumbon. Upaya tersebut akan dilakukan bersamaan dengan pembebasan lahan di sepanjang bantaran sungai.

“Pemprov Jawa Tengah dan Pemkot Semarang bekerja sama dengan BBWS akan membebaskan lahan agar sungai bisa dilebarkan sehingga risiko banjir ke depan bisa diminimalisir,” katanya.

Selain penanganan infrastruktur, pemerintah juga memastikan kebutuhan dasar warga terdampak tetap terpenuhi.

Bantuan makanan, air bersih, pakaian, dan kebutuhan harian lain terus disalurkan

kepada warga yang mengungsi maupun bertahan di rumah keluarga.

“Kebutuhan masyarakat terdampak menjadi prioritas. Kalau masih kurang nanti akan kami tambah,” tegas Suharyanto.

BNPB juga menyiapkan pembangunan hunian sementara atau hunian bagi warga yang rumahnya tidak lagi aman dihuni.

Sementara bagi warga yang memilih tinggal di rumah saudara atau kerabat, pemerintah akan memberikan bantuan dana hunian sebesar Rp600 ribu per bulan per kepala keluarga hingga hunian tetap selesai dibangun.

“Nanti warga yang tidak memilih hunian akan mendapat bantuan Rp600 ribu per bulan sampai hunian tetap selesai,” jelasnya.

Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng Pramestuti, menyebut total terdapat 333 kepala keluarga atau sekitar 1.252 jiwa terdampak banjir di wilayah Kecamatan Tugu, Ngaliyan, dan Semarang Barat.

Ia mengapresiasi kerja cepat petugas gabungan mulai dari BPBD, DPU, Damkar, hingga BBWS yang langsung melakukan pembersihan pasca banjir.

“Proses pembersihan berjalan cepat. Lumpur di sebagian besar wilayah sudah mulai

teratasi dan warga perlahan mulai kembali ke rumah,” ujarnya.

Namun demikian, Agustina menegaskan pemerintah masih fokus memastikan kondisi rumah warga benar-benar layak huni kembali, termasuk memastikan peralatan rumah tangga yang sempat terendam masih dapat digunakan.

Selain itu, Pemerintah Kota Semarang juga mulai mendata kebutuhan hunian sementara maupun relokasi permanen bagi warga yang tinggal di kawasan rawan banjir.

“Kami akan rapat koordinasi untuk memastikan berapa rumah yang benar-benar harus direlokasi dan bagaimana penanganannya,” katanya.

Di sisi lain, Kepala BBWS Pemali-Juana, Sudarto, mengungkapkan Sungai Plumbon saat ini sudah tidak mampu menampung debit air karena kapasitas sungai yang semakin sempit dan kerusakan di wilayah hulu.

Menurutnya, solusi yang dilakukan bukan sekadar normalisasi, melainkan pelebaran sungai dari sekitar 10 meter menjadi 25 meter.

“Tidak cukup hanya normalisasi, sungai harus dilebarkan agar kapasitas aliran air meningkat,” ujarnya.

BBWS mencatat sejak 2024 sudah dilakukan pembebasan 92 bidang lahan dari total sekitar 318 bidang yang dibutuhkan untuk proyek pelebaran sungai. Sisanya akan kembali diusulkan melalui anggaran pemerintah pusat.

Sudarto juga menyebut Sungai Plumbon telah mengalami tujuh kali kejadian banjir besar dengan total 18 titik tanggul jebol dalam beberapa tahun terakhir.

“Ini menjadi bukti bahwa penanganan permanen harus segera dilakukan,” tegasnya.

Panjang Sungai Plumbon yang direncanakan untuk dinormalisasi mencapai sekitar 22 kilometer dengan fokus pada titik-titik rawan limpasan air di 18 titik tanggul yang sering jebol.

**Wali kota Agustina Jajaki Kolaborasi Seni dan Budaya dengan Spanyol, Kota Semarang
Disiapkan Jadi Tuan Rumah Event Internasional 2027**



SEMARANG - Walikota Semarang,

Agustina Wilujeng mulai menjajaki kerjasama seni dan budaya dengan Pemerintah Spanyol. Salah satu rencana yang mengemuka yakni penyelenggaraan event budaya kolaboratif antara Kedutaan Besar Spanyol dan Pemerintah Kota Semarang pada semester pertama tahun 2027.

Rencana tersebut dibahas dalam kunjungan kehormatan Duta Besar Spanyol untuk Indonesia, H.E. Mr. Bernardo de Sicart Escoda, yang diterima langsung Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng di Kantor Wali Kota Semarang, pada Selasa (19/5).

Duta Besar Spanyol menyampaikan ketertarikannya menghadirkan kegiatan budaya bersama di Kota Semarang sebagai bagian penguatan hubungan antara Indonesia dan Spanyol.

“Kami berharap tahun depan dapat menyelenggarakan acara budaya bersama di

Kota Semarang. Kami sangat terbuka menerima ide dan gagasan dari Pemerintah Kota Semarang untuk dipersiapkan bersama,” ujar Bernardo.

Tak hanya itu, Kedutaan Besar Spanyol juga menawarkan kemungkinan menghadirkan pameran budaya bertema warisan Muslim di Spanyol, termasuk pameran tentang Alhambra yang sebelumnya digelar di Kota Tua Jakarta.

Agustina menyambut positif tawaran tersebut. Menurutnya, kolaborasi budaya internasional menjadi peluang besar untuk memperkuat posisi Kota Semarang sebagai kota kreatif dan kota bersejarah yang terbuka terhadap jejaring global.

“Kota Semarang memiliki karakter yang sangat dekat dengan kota-kota bersejarah di Spanyol. Kami sama-sama kota pesisir yang hidup dari perjumpaan budaya, perdagangan, dan sejarah panjang,” kata Agustina dalam sambutannya.

Ia menggambarkan hubungan Kota Semarang dan Spanyol layaknya sebuah gramofon klasik yang menyimpan rekaman panjang peradaban dunia. Kota Lama Semarang dan kota-kota tua di Spanyol

disebutnya sebagai “piringan hitam sejarah” yang terus dijaga agar tetap hidup dan relevan.

Selain budaya, pertemuan tersebut juga membahas peluang kerja sama di sektor pariwisata, pengembangan kota bersejarah, teknologi lingkungan, hingga smart city. Pemerintah Kota Semarang tertarik mempelajari pengelolaan kota dan teknologi lingkungan dari sejumlah kota di Spanyol seperti Barcelona dan Valencia.

Agustina juga membuka peluang pengembangan wisata kapal pesiar internasional melalui Pelabuhan Tanjung Emas agar wisatawan mancanegara, termasuk dari Spanyol, dapat menikmati destinasi sejarah dan budaya di Kota Semarang.

“Kami terbuka terhadap peluang investasi dan transfer teknologi, terutama terkait pengelolaan lingkungan dan ketahanan air bersih di wilayah pesisir,” tambahnya.

Dalam kesempatan tersebut, Duta Besar Spanyol turut memperkenalkan Camino de Santiago, jalur ziarah berusia lebih dari 1.200 tahun di Spanyol yang menjadi salah satu simbol persatuan budaya Eropa. Ia menyebut, sejarah panjang dan kekayaan budaya menjadi salah satu alasan kuat wisatawan Indonesia tertarik datang ke Spanyol.

Pertemuan itu menjadi langkah awal penguatan hubungan Kota Semarang dengan Spanyol, sekaligus membuka peluang hadirnya event budaya internasional yang dapat mendorong sektor pariwisata, ekonomi kreatif, dan diplomasi budaya Kota Semarang ke depan.

Wali kota Semarang, Agustina Wilujeng Segera Lakukan Rehabilitasi GOR Tri Lomba Juang Secara Menyeluruh



SEMARANG – Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng menginstruksikan Dinas Penataan Ruang (Distaru) akan melakukan pekerjaan rehabilitasi GOR Tri Lomba Juang.

Agustina mengatakan pekerjaan tersebut telah diusulkan pada tahun 2025, dan akan dilaksanakan pada pertengahan tahun 2026 ini. “Rehabilitasi GOR Tri Lomba Juang ini sudah kami usulkan sejak 2025, sehingga menggunakan APBD 2026 dan akan dikerjakan pertengahan tahun ini,” kata Agustina, Minggu (24/5).

Ia mengatakan rehabilitasi yang dilakukan meliputi perbaikan lintasan lari atletik, lapangan tenis, bangunan ruko dan sarana prasarana yang ada di dalam GOR Tri Lomba Juang.

“Jadi tidak hanya lintasan lari atletik saja yang memang sudah ada kerusakan di

beberapa titik ya, jadi semua fasilitas kita lakukan rehabilitasi secara menyeluruh,” jelasnya.

Sementara Kepala Distaru, Ferry Kuntoaji menjelaskan untuk perbaikan lintasan lari atletik akan dilakukan pada titik-titik kerusakan yang ada. Sementara material yang akan digunakan akan sama dengan material eksisting lintasan lari atletik yang memang memiliki sertifikasi lintasan sesuai standar World Athletics Certification System.

“Lintasan lari atletik ini kita perbaiki sesuai yang mengalami kerusakan dan material kita gunakan sesuai dengan yang sebelumnya karena itu sudah sesuai standar World Athletics Certification System,” kata dia.

Lebih lanjut, Ferry menjelaskan urutan metode pengerjaan yang akan dilakukan dimulai dengan persiapan dan marking area lintasan yang rusak, pembongkaran komponen dan struktur landasan lintasan yang rusak, pemasangan lapisan sintetis atletik baik lapisan primer, bawah, Tengah dan lapisan atas.

Kemudian dilakukan pembuatan garis lintasan atletik dengan bahan pitlane.

Sementara untuk pengerjaan pada lapangan tenis, akan dilakukan pengecatan dasar baselayer untuk memperbaiki retak rambut, pengecatan dengan bahan softbase WS, pengecatan lapisan tektur dan top bahan supersoft WS, serta membuat garis permainan ukuran standar dengan bahan pitlinea.

“Kami juga lakukan perbaikan atas kerusakan lain pada bangunan ruko dan sarana prasarana yang ada,” imbuhnya.

Ia mengatakan untuk pelaksanaan pekerjaan rehabilitasi GOR Tri Lomba Juang menggunakan anggaran 2026 dari Distaru, sedangkan untuk pengelolaan dan pemeliharaan berada pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Kota Semarang.

“Perbaikan rehabilitasi ini anggarannya ada di kami (Distaru), tapi untuk pengelolaan dan pemeliharaan ada di Dispora,” ujarnya.

Selama masa rehabilitasi, GOR Tri Lomba Juang termasuk lintasan lari atletik akan ditutup untuk sementara. “Kami memohon maaf apabila mengganggu kenyamanan masyarakat Kota Semarang dan mohon untuk dapat bersabar menunggu proses perbaikan GOR selesai. Kami mohon dukungan untuk kelancaran pelaksanaan seluruh rangkaian pekerjaan,” pungkasnya.

Momentum HUT ke-479, Agustina Tegaskan Kota Semarang Rumah Besar yang Maju dan Inklusif



SEMARANG — Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng menegaskan komitmennya untuk selalu menghadirkan pembangunan yang berdampak nyata bagi masyarakat. Hal itu ia sampaikan saat memberikan amanat dalam upacara peringatan Hari Jadi ke-479 Kota Semarang yang digelar di Halaman Balai Kota, Sabtu (2/5) pagi.

Upacara berlangsung khidmat dan penuh semangat kebersamaan, dihadiri oleh Wakil Wali Kota, jajaran ASN, akademisi serta berbagai unsur masyarakat. Tampak hadir pula Kapolrestabes, Dandim, Dandenpom, perwakilan TNI AU, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, Kementerian Agama, hingga tokoh masyarakat dan ahli waris KH Sholeh Darat.

Agustina menegaskan bahwa kekuatan Kota Semarang terletak pada soliditas dan gotong royong lintas generasi. “Semarang adalah rumah besar. Rumah yang lahir dari gotong

royong lintas generasi, lintas latar belakang, dan lintas cerita,” tegasnya.

Mengusung tema **“Semarang Bergerak, Semarang Semakin Hebat”**, Wali kota Semarang terus mendorong percepatan pembangunan yang inklusif dan merata. Hal ini diwujudkan melalui lima pilar utama, yakni Semarang Bersih, Semarang Sehat, Semarang Cerdas, Semarang Makmur, dan Semarang Tangguh.

Berbagai capaian strategis turut disampaikan, di antaranya pengelolaan 1.449 bank sampah dengan nilai ekonomi mencapai Rp1,99 miliar, cakupan jaminan kesehatan 100 persen, penurunan stunting hingga 4,99 persen, angka putus sekolah nol persen, serta pertumbuhan ekonomi sebesar 6,42 persen.

Sebagai bentuk nyata kehadiran pemerintah di tengah masyarakat, dalam momentum ulang tahun ke-479 Kota Semarang ini, Agustina menghadirkan 14 “Kado Hebat” bagi warga Kota Semarang.

“Masyarakat akan mendapatkan banyak kado. Ada 14 program, mulai dari pajak, transportasi, hingga layanan untuk kelompok disabilitas,” ujar Agustina.

Rangkaian upacara turut diisi dengan peluncuran logo HUT, filateli, penghargaan kota toleran, penampilan karya budaya, hingga penyerahan santunan dan hadiah lomba.

Menutup amanatnya, Agustina mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus menjaga kebersamaan dalam membangun kota.

“Semarang adalah rumah kita bersama. Rumah yang kita jaga agar nyaman bagi setiap penghuninya,” pungkasnya.

Peringatan Hari Jadi ke-479 ini semakin menegaskan arah pembangunan Kota Semarang yang berorientasi pada manfaat nyata, memperkuat solidaritas sosial, serta membuka ruang seluas-luasnya bagi pertumbuhan ekonomi dan kreativitas masyarakat.

Agustina Dorong Denok Kenang Jadi Wajah Baru Semarang, Penggerak Budaya dan Pariwisata di Era Digital



SEMARANG – Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng, menegaskan Denok Kenang harus naik kelas menjadi storyteller yang mampu menghidupkan cerita dan identitas Kota Semarang melalui kreativitas generasi muda. Pesan tersebut disampaikan saat Grand Final Pemilihan Denok Kenang Kota Semarang 2026 yang dirangkai dengan pengundian program IJOLKE di Balai Kota Semarang, Minggu (24/5) malam.

Mengusung tema “Menyinari Budaya, Memperkuat Pariwisata”, ajang Denok Kenang tahun ini tidak hanya menjadi panggung pemilihan duta wisata, tetapi juga momentum memperkuat peran anak muda dalam mendukung visi Pemerintah Kota Semarang membangun kota yang berbudaya, kreatif, dan berdaya saing di era digital.

Dalam sambutannya, Agustina menekankan bahwa Denok Kenang harus mampu menjadi wajah baru Kota Semarang yang tidak sekadar tampil menarik, tetapi juga mampu membangun kedekatan emosional publik dengan kota melalui narasi positif dan kreatif.

“Denok Kenang tidak lagi cukup hanya menjadi ikon pariwisata. Denok Kenang harus menjadi narator kota. Di era digital ini, kota dibangun dengan cerita yang dipercaya publik,” tegasnya.

Menurut Agustina, budaya merupakan kekuatan utama Kota Semarang yang harus terus dihidupkan dan dikembangkan agar memberikan dampak nyata bagi masyarakat, mulai dari penguatan ekonomi kreatif, pelestarian kuliner, hingga peningkatan daya tarik destinasi wisata seperti Kawasan Kota Lama.

“Budaya akan menjadi kekuatan ketika dikemas secara kreatif dan dekat dengan masyarakat. Budaya yang menghasilkan ekonomi dan berkaitan dengan pemberdayaan akan hidup dan dilestarikan sendiri oleh masyarakatnya,” ujarnya.

Di hadapan 15 pasang finalis, Agustina juga menegaskan bahwa Pemerintah Kota

Semarang ingin melahirkan generasi muda yang mampu menjadi mitra strategis pemerintah dalam menyampaikan pesan-pesan pembangunan kepada masyarakat.

“Malam ini kita tidak hanya memilih siapa yang paling rupawan atau paling fasih berbicara. Kita sedang memilih wajah masa depan Kota Semarang,” katanya.

Ia pun mendorong para finalis untuk aktif mengangkat isu lingkungan hidup, penguatan sistem pangan berkelanjutan, hingga promosi budaya lokal melalui konten kreatif yang dekat dengan generasi muda.

Selain malam grand final, acara juga dirangkaikan dengan pengundian program IJOLKE sebagai bentuk apresiasi kepada masyarakat yang taat pajak sekaligus upaya Pemkot Semarang memperkuat digitalisasi transaksi di sektor hotel, restoran, parkir, dan hiburan.

Program tersebut mencatat lebih dari 31 ribu struk transaksi terverifikasi selama periode 1 Maret–24 Mei 2026. Beragam hadiah diundi, mulai dari iPhone 17 Pro, Samsung Galaxy Z Flip 7, hingga puluhan smartphone lainnya.

Pada malam puncak tersebut, Farah Azra Bramantya terpilih sebagai Denok Semarang 2026 dan Bima Surya Wandana sebagai Kenang Semarang 2026. Keduanya

diharapkan menjadi representasi generasi muda Kota Semarang yang kreatif, adaptif, serta mampu menjaga nyala budaya sekaligus memperkuat promosi pariwisata Kota Semarang di tingkat nasional maupun internasional.

Wali kota Agustina Tegaskan Kerukunan Jadi Kekuatan Utama Membangun Kota Semarang



SEMARANG – Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng, menegaskan bahwa kerukunan dan keharmonisan yang selama ini terjaga di tengah masyarakat merupakan kekuatan terbesar Kota Semarang. Di tengah keberagaman suku, agama, budaya, dan latar belakang warganya, Semarang mampu tumbuh menjadi kota yang aman, nyaman, dan terus berkembang karena seluruh elemen masyarakat memilih untuk menjaga persatuan.

Hal tersebut disampaikan Agustina saat menghadiri Malam Tirakatan, Doa Bersama, dan Pagelaran Wayang Kulit dalam rangka memperingati Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah di halaman Balai Kota Semarang, Senin (15/6) malam.

Menurut Agustina, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari

infrastruktur yang berdiri atau investasi yang masuk, tetapi juga dari kemampuan masyarakat dalam merawat rasa saling menghormati dan hidup berdampingan dalam suasana yang damai.

“Semarang adalah rumah bersama. Kekuatan kota ini bukan hanya pada pembangunan fisiknya, tetapi pada warganya yang mampu menjaga kerukunan di tengah keberagaman. Inilah modal sosial yang membuat Semarang terus bergerak maju dan menjadi kota yang nyaman bagi semua,” ujar Agustina.

Ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh unsur masyarakat yang selama ini ikut menjaga iklim kehidupan yang harmonis, mulai dari tokoh agama, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forkopimda, ASN, organisasi masyarakat, komunitas, hingga warga yang setiap hari menebarkan semangat gotong royong dan toleransi.

Bagi Agustina, kedewasaan masyarakat kota Semarang terlihat dari kemampuannya menyikapi perbedaan secara bijaksana. Bahkan pada hari yang sama ketika sejumlah mahasiswa menyampaikan aspirasi, seluruh proses berlangsung tertib dan damai.

“Perbedaan pandangan adalah bagian dari kehidupan demokrasi. Yang membanggakan, masyarakat kota Semarang mampu menyampaikan pendapat dengan santun dan tetap menjaga suasana yang kondusif. Ini menunjukkan bahwa budaya dialog dan saling menghargai tumbuh kuat di kota kita,” katanya.

Momentum Tahun Baru Hijriah yang juga bertepatan dengan Malam Satu Suro, lanjut Agustina, menjadi pengingat bahwa kemajuan sebuah kota harus dibangun tidak hanya dengan kerja keras, tetapi juga dengan kebersamaan dan keteduhan hati.

“Tahun Baru Hijriah mengajarkan semangat hijrah menuju kebaikan, sementara Satu Suro mengajak kita melakukan refleksi. Keduanya mengingatkan pentingnya memperbaiki diri, memperkuat persaudaraan, dan menata masa depan bersama,” tuturnya.

Agustina menegaskan bahwa Pemerintah Kota Semarang akan terus menjaga ruang kebersamaan yang memungkinkan seluruh warga hidup berdampingan secara harmonis. Sebab menurutnya, kerukunan adalah pondasi penting untuk menghadirkan pembangunan yang inklusif dan dirasakan manfaatnya oleh semua kalangan.

“Kota yang maju bukan hanya kota yang infrastrukturnya baik, tetapi juga kota yang

masyarakatnya rukun. Kerukunan, toleransi, gotong royong, dan kepedulian sosial adalah energi yang membuat Semarang semakin hebat, semakin membahagiakan, dan semakin terbuka bagi siapa saja,” tegasnya.

Pada akhir acara, masyarakat disuguhi pagelaran wayang kulit dengan lakon *Ngamarta Binangun*. Agustina menilai nilai-nilai yang terkandung dalam cerita tersebut sangat relevan dengan semangat pembangunan Kota Semarang saat ini.

“Lakon ini mengajarkan bahwa kemajuan hanya dapat dicapai melalui kebersamaan, kolaborasi, dan kesediaan menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Semangat itulah yang terus kita bangun di Kota Semarang,” ujarnya.

Melalui momentum pergantian tahun ini, Agustina mengajak seluruh warga untuk terus merawat kerukunan, menjaga kebersihan dan keindahan kota, serta memperkuat rasa memiliki terhadap Semarang sebagai rumah bersama yang aman, harmonis, dan semakin maju.

Wali kota Agustina Dukung Sensus Ekonomi 2026, Data Akurat untuk Hadirkan Program yang Lebih Tepat bagi Masyarakat



SEMARANG – Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng mendukung penuh pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) 2026 sebagai langkah penting guna memastikan setiap kebijakan dan program pembangunan ekonomi benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dukungan tersebut disampaikan dalam kegiatan Pencanangan Sensus Ekonomi 2026 tingkat Provinsi Jawa Tengah yang digelar di Kota Semarang, Kamis (18/6).

Agustina menegaskan bahwa manfaat terbesar dari Sensus Ekonomi adalah tersedianya data yang akurat untuk membantu pemerintah menghadirkan program yang lebih tepat sasaran, mulai dari penguatan UMKM, penciptaan lapangan kerja, hingga peningkatan kesejahteraan warga.

“Ketika data ekonomi masyarakat tercatat dengan baik, pemerintah bisa melihat kebutuhan yang sesungguhnya di lapangan.

Dengan begitu, program bantuan usaha, pelatihan, akses permodalan, hingga penciptaan peluang kerja dapat diberikan kepada pihak yang benar-benar membutuhkan,” ujar Agustina.

Sensus Ekonomi yang dilaksanakan setiap sepuluh tahun sekali ini akan mendata seluruh aktivitas usaha di Indonesia, mulai dari usaha rumahan, pedagang kecil, UMKM, hingga perusahaan besar. Pendataan tersebut akan menghasilkan gambaran nyata mengenai kondisi perekonomian masyarakat, sektor usaha yang berkembang, serta potensi ekonomi yang masih perlu didorong.

Bagi masyarakat Kota Semarang, hasil sensus nantinya akan menjadi dasar bagi pemerintah dalam merancang kebijakan yang lebih responsif. Pelaku UMKM dapat memperoleh dukungan yang lebih sesuai dengan kebutuhan usahanya, investor dapat melihat potensi ekonomi daerah dengan lebih jelas, sementara pemerintah memiliki pijakan yang kuat untuk menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang merata.

“Setiap data yang diberikan masyarakat akan menjadi dasar dalam merancang kebijakan yang berdampak langsung pada kehidupan

warga. Karena itu, semakin lengkap data yang diperoleh, semakin tepat pula program yang bisa disiapkan pemerintah,” jelasnya.

Sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah, Kota Semarang memiliki peran strategis dalam menyukseskan pelaksanaan sensus ekonomi. Data yang dihasilkan dari Kota Semarang tidak hanya bermanfaat bagi pemerintah daerah, tetapi juga menjadi bagian penting dalam penyusunan kebijakan ekonomi tingkat provinsi maupun nasional.

Agustina menambahkan, Sensus Ekonomi juga menjadi peluang untuk memastikan keberadaan usaha-usaha kecil yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat dapat terpetakan dengan lebih baik. Dengan data tersebut, pemerintah dapat menyusun program pemberdayaan yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Pemerintah Kota atau Pemkot Semarang siap bersinergi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam mensosialisasikan pelaksanaan Sensus Ekonomi kepada masyarakat dan pelaku usaha. Kolaborasi ini penting agar seluruh pelaku usaha memahami bahwa partisipasi mereka akan memberikan manfaat bagi pembangunan ekonomi daerah di masa depan.

“Kami mengajak seluruh pelaku usaha, mulai dari usaha mikro hingga perusahaan besar, untuk berpartisipasi aktif dalam Sensus Ekonomi 2026. Data yang diberikan hari ini akan membantu pemerintah menghadirkan kebijakan yang lebih tepat, sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat,” tegas Agustina.

Masyarakat juga tidak perlu khawatir mengenai keamanan informasi yang disampaikan. Seluruh data yang dikumpulkan oleh BPS dijamin kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan statistik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Melalui Sensus Ekonomi 2026, Pemkot Semarang berharap tersedianya data ekonomi yang semakin berkualitas sehingga pembangunan dapat berjalan lebih tepat sasaran, kesempatan usaha dan kerja semakin terbuka, serta kesejahteraan masyarakat Kota Semarang terus meningkat dari waktu ke waktu.

Tegaskan Ketahanan Pangan Jadi Prioritas, Walikota Agustina Perkuat Ekosistem Pangan Aman dari Hulu hingga Hilir



SEMARANG – Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng menegaskan bahwa ketahanan pangan menjadi salah satu prioritas utama pembangunan Kota Semarang. Menurutnya, ketersediaan pangan yang aman, sehat, terjangkau, dan berkelanjutan merupakan pondasi penting untuk mewujudkan masyarakat yang sehat, produktif, dan sejahtera.

Komitmen tersebut disampaikan Agustina saat menghadiri Peringatan Hari Keamanan Pangan Sedunia Tingkat Kota Semarang Tahun 2026 di Hall Balai Kota Semarang, Selasa (23/6). Kegiatan yang mengusung tema **“Optimalkan Kolaborasi, Kita Wujudkan Keamanan Pangan yang Tangguh Menuju Solusi Pangan Aman untuk Indonesia Sehat, Semarang Bersatu, Semarang Semakin Hebat”** tersebut menjadi momentum memperkuat sinergi seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga ketahanan pangan daerah.

"Bagi saya, ketahanan pangan bukan sekadar memastikan makanan tersedia. Ketahanan pangan adalah memastikan masyarakat memperoleh pangan yang aman, sehat, berkualitas, dan terjangkau setiap saat. Karena itu, isu pangan menjadi salah satu prioritas yang terus kami perkuat di Kota Semarang," tegas Agustina.

Ia menilai, ketahanan pangan dan keamanan pangan merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Ketersediaan pangan yang melimpah tidak akan berarti apabila kualitas dan keamanannya tidak terjamin.

Sebaliknya, pangan yang aman akan menjadi investasi jangka panjang dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan daya saing daerah.

Dalam kesempatan tersebut, Agustina mengajak seluruh elemen masyarakat, mulai dari pemerintah, akademisi, pelaku usaha, komunitas, hingga warga untuk membangun budaya pangan aman sebagai bagian dari penguatan ketahanan pangan Kota Semarang.

Menurutnya, tantangan pangan saat ini semakin kompleks, mulai dari perubahan iklim, distribusi pangan, fluktuasi harga, hingga potensi cemaran pangan. Oleh karena

itu, dibutuhkan kolaborasi lintas sektor agar masyarakat tidak hanya memperoleh pangan yang cukup, tetapi juga aman untuk dikonsumsi.

Sebagai bentuk komitmen nyata, Pemkot Semarang terus mengembangkan berbagai program inovatif yang mendukung ketahanan pangan masyarakat.

Program seperti Pak Rahman, Kempling Semar, hingga layanan pengujian pangan keliling menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk memastikan rantai pangan berjalan dengan baik, aman, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

"Ketahanan pangan harus dibangun dari hulu hingga hilir. Kita menjaga kualitas pangan, memperkuat pengawasan, memastikan distribusi berjalan lancar, sekaligus menjaga harga tetap stabil agar masyarakat tidak terbebani. Inilah bentuk kehadiran pemerintah dalam melindungi kebutuhan dasar warga," ujar Agustina.

Berbagai langkah tersebut juga berkontribusi terhadap pengendalian inflasi daerah sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat. Agustina menegaskan bahwa pangan yang aman dan terjangkau merupakan salah satu indikator penting keberhasilan pembangunan yang langsung dirasakan manfaatnya oleh warga.

Komitmen Kota Semarang dalam membangun sistem pangan yang tangguh itu pun mendapat pengakuan nasional melalui raihan Juara 1 Nasional Kota Pangan Aman Tahun 2025.

Prestasi tersebut menjadi bukti keberhasilan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, pelaku usaha, pasar rakyat, kader keamanan pangan, dan masyarakat dalam membangun ekosistem pangan yang kuat dan berkelanjutan.

"Penghargaan ini menunjukkan bahwa Kota Semarang tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, tetapi juga serius membangun ketahanan pangan untuk melindungi kesehatan masyarakat dan masa depan generasi penerus," kata Agustina.

Pada kesempatan tersebut, Pemerintah Kota Semarang juga menyerahkan SK Penetapan Zona KHAS (Kuliner Halal, Aman dan Sehat) di empat lokasi baru, yakni Bundaran Klipang, SMP Negeri 12 Semarang, SMP Negeri 22 Semarang, dan MAN 1 Kota Semarang. Dengan penambahan tersebut, hingga Juni 2026 Kota Semarang telah memiliki enam lokasi Zona KHAS yang mendukung terwujudnya ekosistem pangan aman sekaligus memperkuat sektor ekonomi dan pariwisata daerah.

Penguatan ketahanan pangan juga dilakukan melalui keberadaan 34 Pasar Pangan Rakyat Murah dan Aman (Pak Rahman), Tim Internal Control System (ICS), 531 kader DERMAWAN di 177 kelurahan, serta 160 kader DERMAWAN di 32 pasar rakyat yang menjadi garda terdepan edukasi dan pengawasan keamanan pangan di tingkat masyarakat.

Menutup sambutannya, Agustina menegaskan bahwa membangun ketahanan pangan bukan hanya tugas pemerintah, melainkan tanggung jawab bersama untuk menjaga kesehatan masyarakat dan masa depan Kota Semarang.

"Ketahanan pangan adalah pondasi kesejahteraan. Ketika pangan aman, sehat, tersedia, dan terjangkau bagi seluruh masyarakat, maka kita sedang membangun generasi yang lebih kuat dan masa depan Kota Semarang yang semakin hebat," pungkasnya.

Wali kota Agustina Kawal Dana Rp25 Juta per RT Agar Tepat Manfaat, Pengurus Lingkungan Didampingi dari Perencanaan hingga Pelaporan



SEMARANG – Komitmen Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng untuk memperkuat pembangunan dari tingkat lingkungan terus diwujudkan melalui program Bantuan Operasional (BOP) sebesar Rp25 juta per RT per tahun. Tidak hanya mengalokasikan anggaran, Agustina juga memastikan setiap pengurus RT mendapatkan pendampingan agar dana tersebut dapat dimanfaatkan secara tepat, transparan, dan memberikan dampak nyata bagi warga.

Melalui sosialisasi dan pendampingan yang dilakukan Pemerintah Kota Semarang, para pengurus RT dan RW dibekali pemahaman mulai dari penyusunan Rencana Anggaran Penggunaan (RAP), pengajuan dokumen, pelaksanaan kegiatan, hingga pertanggungjawaban anggaran. Langkah ini menjadi bagian dari upaya Agustina memastikan setiap rupiah yang diberikan

benar-benar kembali kepada masyarakat dalam bentuk program dan fasilitas yang dibutuhkan lingkungan.

"Kami optimistis dengan pendampingan yang intensif, para pengurus RT dan RW dapat menyelesaikan seluruh dokumen persyaratan melalui aplikasi Ruang Warga sebelum batas akhir 31 Juli 2026," ujar Agustina Senin (15/6).

Agustina ingin menghadirkan tata kelola bantuan yang mudah diakses masyarakat namun tetap akuntabel. Karena itu, kelengkapan dokumen seperti Surat Permohonan, SK Kepengurusan, RAP, Berita Acara Kesepakatan Warga, hingga SPTJM menjadi instrumen penting untuk menjaga transparansi sejak tahap perencanaan.

Program BOP RT sebesar Rp25 juta per tahun merupakan salah satu bentuk keberpihakan Pemerintah Kota Semarang terhadap pembangunan berbasis partisipasi warga. Agustina meyakini bahwa kebutuhan lingkungan paling dipahami oleh masyarakat di tingkat RT, sehingga pemerintah hadir sebagai fasilitator yang memberikan dukungan anggaran sekaligus pendampingan agar program berjalan optimal.

Dalam pelaksanaannya, proses verifikasi dilakukan secara berjenjang mulai dari Kelurahan hingga Kecamatan. Lurah sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) bertugas memastikan seluruh dokumen memenuhi ketentuan sebelum diteruskan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

"Mekanisme penyaluran dana ke rekening masing-masing lembaga dilakukan sesuai tata kelola keuangan daerah. Karena itu, partisipasi aktif pengurus RT dalam memenuhi persyaratan menjadi faktor penting agar dana dapat segera dimanfaatkan untuk kepentingan warga," jelas Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3A) Kota Semarang, Eko Krisnarto.

Melalui program ini, dana BOP dapat digunakan untuk mendukung berbagai kegiatan kemasyarakatan seperti ronda malam, kerja bakti, penataan fasilitas umum, kebersihan lingkungan, serta berbagai kegiatan yang memperkuat keguyuban warga. Pemerintah Kota Semarang juga memberikan ruang fleksibilitas bagi pengurus lingkungan untuk menyesuaikan program sesuai kebutuhan riil masyarakat

melalui mekanisme perubahan RAP yang terukur dan terverifikasi.

Eko menegaskan bahwa sesuai arahan Wali Kota Agustina, dana BOP harus digunakan sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat dan penguatan lingkungan.

"Program ini dirancang untuk menggerakkan gotong royong warga. Karena itu dana tidak diperuntukkan bagi honorarium atau kepentingan pribadi pengurus, melainkan untuk kegiatan kemasyarakatan dan fasilitas publik yang manfaatnya dapat dirasakan bersama," tegasnya.

Sebagai bagian dari komitmen mewujudkan pemerintahan yang transparan dan melayani, Pemkot Semarang juga terus mendampingi pengurus RT dan RW dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban. Pendampingan tersebut dilakukan agar para pengurus lingkungan dapat fokus menghadirkan manfaat bagi warga tanpa terkendala persoalan administratif.

Melalui program BOP RT Rp25 juta per tahun yang disertai pendampingan menyeluruh, Agustina ingin memastikan pembangunan Kota Semarang tidak hanya berjalan dari atas ke bawah, tetapi tumbuh dari lingkungan terkecil, dari gagasan, partisipasi, dan kebutuhan nyata masyarakat di setiap RT.

Wali Kota Agustina Ajak Seluruh Warga Jadi Tuan Rumah Terbaik, Sukseskan MTQ Nasional XXXI 2026 di Semarang



SEMARANG – Semangat menyambut Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Nasional XXXI Tahun 2026 semakin menggelora di Kota Semarang. Peluncuran maskot, logo, dan tema resmi MTQ Nasional XXXI di kawasan Masjid Agung Jawa Tengah (MAJT), Kamis (25/6), menjadi penanda dimulainya gerakan bersama menuju penyelenggaraan ajang keagamaan terbesar di Indonesia tersebut.

Sebagai tuan rumah utama, Kota Semarang tidak hanya mempersiapkan sarana dan prasarana, tetapi juga mengajak seluruh masyarakat untuk menjadi bagian dari kesuksesan MTQ Nasional yang akan digelar pada September 2026.

Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng, mengajak seluruh warga masyarakat untuk menjadikan MTQ Nasional XXXI sebagai kebanggaan bersama sekaligus momentum guna menunjukkan wajah kota Semarang

yang religius, ramah, dan penuh semangat gotong royong.

"MTQ Nasional bukan hanya milik pemerintah atau peserta yang akan berlomba. Ini adalah hajatan seluruh masyarakat Kota Semarang. Saya mengajak seluruh warga supaya menjadi tuan rumah yang baik, menjaga kebersihan kota, memberikan pelayanan yang ramah, serta ikut menyambut para tamu dari seluruh Indonesia dengan penuh kehangatan," ujar Agustina Kamis (25/6).

Menurutnya, peluncuran maskot, logo, dan tema menjadi simbol dimulainya perjalanan besar menuju MTQ Nasional XXXI pada bulan September mendatang. Lebih dari sekadar identitas visual, ketiganya merepresentasikan semangat kebersamaan, syiar Islam yang moderat, serta optimisme Jawa Tengah dan Kota Semarang dalam menyelenggarakan event nasional yang berkualitas.

Agustina menegaskan, Pemkot Semarang berkomitmen memberikan dukungan penuh terhadap seluruh tahapan persiapan penyelenggaraan, mulai dari peningkatan infrastruktur, kesiapan venue, pelayanan bagi

kafilah dan tamu, hingga penguatan partisipasi masyarakat.

"Kami ingin seluruh masyarakat ikut merasakan semangat MTQ Nasional. Mari kita sukseskan bersama agar para tamu membawa pulang kesan bahwa Semarang adalah kota yang nyaman, toleran, bersih, dan selalu menyambut siapapun dengan hati yang terbuka," katanya.

Selain menjadi syiar keagamaan, MTQ Nasional XXXI juga diyakini akan memberikan manfaat luas bagi masyarakat. Kehadiran ribuan peserta, pendamping, dan tamu dari seluruh provinsi diperkirakan akan menggerakkan sektor UMKM, perhotelan, kuliner, transportasi, pariwisata, hingga ekonomi kreatif.

"Kesuksesan MTQ bukan hanya diukur dari lancarnya perlombaan, tetapi juga dari manfaat yang dirasakan masyarakat. Karena itu, mari kita jadikan momentum ini sebagai kesempatan bersama untuk menggerakkan ekonomi daerah sekaligus memperkenalkan potensi terbaik Kota Semarang kepada Indonesia," tambah Agustina.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memperkirakan sekitar 8.000 kafilah akan hadir pada MTQ Nasional XXXI. Jumlah tersebut menjadi peluang besar bagi Kota

Semarang untuk memperkuat citranya sebagai kota tujuan kegiatan nasional yang aman, nyaman, dan berdaya saing.

Sementara itu, Menteri Agama Republik Indonesia, Nasaruddin Umar, menegaskan bahwa MTQ Nasional merupakan sarana membangun peradaban Qurani sehingga nilai-nilai Al-Qur'an dapat diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ia juga mengapresiasi kesiapan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kota Semarang yang telah mempersiapkan penyelenggaraan MTQ Nasional XXXI secara serius dan kolaboratif.

Peluncuran logo, maskot, dan tema resmi MTQ Nasional XXXI menjadi awal dari rangkaian panjang menuju penyelenggaraan MTQ Nasional 2026. Pemkot Semarang berharap semangat tersebut terus bergema di tengah masyarakat sehingga seluruh elemen dapat bersatu menyukseskan perhelatan nasional ini.

Melalui kolaborasi pemerintah, lembaga keagamaan, pelaku usaha, komunitas, serta seluruh warga, Kota Semarang optimistis mampu menghadirkan MTQ Nasional XXXI yang sukses penyelenggaraan, sukses syiar, sukses pelayanan, sekaligus meninggalkan kesan mendalam bagi seluruh tamu yang datang ke Ibu Kota Jawa Tengah.

Wali kota Agustina Perkuat Pembangunan Keluarga sebagai Fondasi Mewujudkan Generasi Unggul



SEMARANG – Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng terus memperkuat pembangunan keluarga sebagai salah satu prioritas pembangunan sumber daya manusia. Baginya, keluarga merupakan ruang pertama dalam membentuk karakter, kesehatan, dan ketahanan mental anak, sehingga penguatan keluarga menjadi investasi jangka panjang untuk mewujudkan generasi yang unggul dan berdaya saing.

Komitmen tersebut kembali ditegaskan dalam momentum Hari Keluarga Nasional (Harganas) Ke-33 Tahun 2026 yang diperingati di Kantor Kecamatan Banyumanik, Senin (29/6). Peringatan ini dimaknai bukan sekadar agenda tahunan, tetapi sebagai pengingat bahwa pembangunan kota harus berjalan seiring dengan pembangunan kualitas keluarga.

Sekretaris Daerah Kota Semarang, Handi Priyanto, yang hadir mewakili wali kota saat

membacakan sambutan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN, menegaskan bahwa keluarga menjadi titik awal dalam menyiapkan generasi yang mampu menjawab tantangan masa depan.

"Hari Keluarga Nasional bukan sekadar seremoni. Ini menjadi momentum untuk memastikan bahwa setiap keluarga mampu menjadi tempat yang aman, penuh kasih sayang, dan mendukung tumbuh kembang anak agar siap menghadapi berbagai tantangan di masa depan," ujarnya.

Menurutnya, keberhasilan memanfaatkan bonus demografi menuju Indonesia Emas 2045 sangat bergantung pada kualitas keluarga. Karena itu, pembangunan manusia perlu dimulai dari rumah melalui pemenuhan gizi yang baik, penguatan pendidikan karakter, serta pembentukan ketahanan mental anak sejak usia dini.

Ia juga menekankan pentingnya keterlibatan kedua orang tua dalam pengasuhan. Peran ayah dan ibu yang berjalan seimbang diyakini mampu menciptakan lingkungan keluarga yang sehat secara emosional sekaligus memperkuat karakter anak.

"Perbaiki kualitas sumber daya manusia tidak bisa dibebankan kepada satu pihak saja. Kehadiran dan keterlibatan kedua orang tua dalam proses pengasuhan menjadi faktor penting dalam membangun kepribadian anak yang kuat," katanya.

Wali kota Semarang juga mengajak seluruh keluarga untuk lebih adaptif menghadapi tantangan era digital. Pendampingan terhadap anak dalam penggunaan gawai, membangun komunikasi yang hangat di rumah, serta menciptakan lingkungan keluarga yang saling mendukung dinilai menjadi langkah penting untuk mencegah berbagai persoalan sosial, seperti perundungan, kekerasan, penyalahgunaan narkoba, maupun pengaruh negatif media digital.

Bagi Agustina, pembangunan keluarga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan kota. Karena itu, berbagai program yang berkaitan dengan kesehatan keluarga, percepatan penurunan stunting, perlindungan perempuan dan anak, pendidikan, hingga pemberdayaan masyarakat akan terus diperkuat melalui kolaborasi lintas perangkat daerah dan seluruh elemen masyarakat.

Menutup kegiatan tersebut, Handi mengajak seluruh masyarakat menjadikan keluarga

sebagai pusat pendidikan karakter sekaligus ruang yang paling nyaman bagi setiap anggota keluarga.

"Keluarga yang kuat tidak hanya dibangun melalui program pemerintah, tetapi juga melalui kepedulian, komunikasi, dan kebersamaan yang tumbuh setiap hari di dalam rumah. Pemerintah Kota Semarang akan terus menghadirkan berbagai kebijakan yang mendukung terwujudnya keluarga yang sehat, harmonis, dan tangguh sebagai fondasi kemajuan Kota

Semarang," pungkasnya.

WTP 10 kali Berturut-turut, Wali kota Agustina Tegaskan Setiap Rupiah APBD Harus Kembali untuk Warga Kota Semarang



SEMARANG – Pemerintah Kota atau Pemkot Semarang kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Capaian ini menjadi bukti bahwa tata kelola keuangan Kota Semarang berjalan secara akuntabel, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Bagi Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng, raihan WTP bukan sekadar penghargaan atas tertib administrasi keuangan. Lebih dari itu, WTP merupakan bukti bahwa Pemerintah Kota Semarang serius menjaga amanah masyarakat dengan memastikan setiap rupiah APBD dikelola secara hati-hati, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi warga.

"Capaian ini adalah hasil kerja bersama seluruh jajaran Pemerintah Kota Semarang, DPRD, dan berbagai pihak yang terus

mengawal jalannya pemerintahan. Namun bagi saya, yang paling penting bukan sekadar mendapatkan WTP, melainkan memastikan bahwa uang rakyat benar-benar kembali kepada rakyat dalam bentuk pelayanan yang lebih baik dan pembangunan yang dirasakan manfaatnya," ujar Agustina usai menerima LHP BPK, Rabu (11/6).

Agustina menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dipahami sebagai instrumen untuk menghadirkan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, sepanjang tahun 2025 Pemkot Semarang mengarahkan anggaran pada program-program prioritas yang menyentuh kebutuhan warga secara langsung, mulai dari pembangunan jalan dan drainase, penanganan banjir, peningkatan kualitas permukiman, layanan kesehatan dan pendidikan, penguatan ekonomi kerakyatan, hingga berbagai program perlindungan sosial.

Menurutnya, keberhasilan tata kelola keuangan tidak diukur dari tebalnya laporan atau banyaknya penghargaan yang diterima pemerintah. Ukuran sesungguhnya adalah seberapa besar manfaat yang dirasakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

"Warga ingin melihat jalan yang lebih baik, lingkungan yang lebih nyaman, pelayanan yang semakin cepat, serta kesempatan ekonomi yang semakin terbuka. Karena itu saya selalu menekankan bahwa setiap rupiah APBD harus bekerja untuk rakyat dan hasilnya harus bisa dirasakan masyarakat," tegasnya.

Ia menambahkan, pengelolaan keuangan yang sehat menjadi pondasi penting bagi pembangunan Kota Semarang. Dengan tata kelola yang baik, pemerintah memiliki kemampuan fiskal yang lebih kuat untuk menjawab berbagai kebutuhan masyarakat sekaligus menjaga keberlanjutan pembangunan kota.

Agustina juga mengingatkan seluruh perangkat daerah agar capaian WTP tidak membuat jajaran pemerintah berpuas diri. Sebaliknya, penghargaan tersebut harus menjadi pemacu untuk terus meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan anggaran agar semakin efektif, efisien, dan tepat sasaran.

"Saya ingin budaya pengelolaan keuangan yang bersih, transparan, dan bertanggung jawab terus menjadi nafas pemerintahan di Kota Semarang. Kepercayaan masyarakat harus dijaga melalui kinerja yang nyata dan pengelolaan anggaran yang memberikan

manfaat sebesar-besarnya bagi warga," katanya.

Raihan opini WTP atas LKPD Tahun Anggaran 2025 sekaligus memperkuat komitmen Pemerintah Kota Semarang di bawah kepemimpinan Agustina Wilujeng untuk menghadirkan pemerintahan yang bersih, profesional, dan berorientasi pada pelayanan. Sebab pada akhirnya, keberhasilan pengelolaan keuangan daerah bukan hanya tercermin dalam laporan yang baik, tetapi pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat Kota Semarang.

**Wali kota Agustina Bawa Inovasi Semarang ke Panggung Nasional, Tawarkan Solusi
Ketahanan Pangan Kota Masa Depan**



JAKARTA – Isu kedaulatan pangan dinilai menjadi persoalan paling krusial di wilayah perkotaan yang selama ini justru paling sering luput dari pembahasan para perencana kota besar. Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng, menyoroti perihal kedaulatan pangan tersebut saat didapuk menjadi salah satu narasumber dalam diskusi panel Urban Talks pada ajang Jakarta Future Festival (JFF) 2026 di Taman Ismail Marzuki (TIM) Jakarta, Jumat (5/6).

Agustina menjelaskan bahwa pemerintah daerah sering kali tidak memiliki kewenangan intervensi langsung atas stabilitas harga karena tata niaga pangan sepenuhnya bergantung pada mekanisme pasar bebas. Padahal, pemenuhan pangan harian warga merupakan tanggung jawab pemerintah.

"Lahan sawah di Kota Semarang saat ini tercatat sekitar 2.000 hektare. Jumlah

produksi beras lokal tersebut baru mampu mencukupi sekitar 11 sekian persen dari total kebutuhan konsumsi masyarakat, belum termasuk komoditas daging dan ayam. Kami di pemerintahan tidak memiliki sistem pengendalian maupun penentuan harga karena kendali sepenuhnya berada di pasar," ujarnya.

Menyiasati tantangan itu, Pemerintah Kota atau Pemkot Semarang melahirkan inovasi program "Pak Rahman" (Pasar Pangan Rakyat Murah dan Aman) sebagai bentuk intervensi taktis pemerintah daerah. Mobil pangan keliling ini digerakkan secara gotong royong bersama para pedagang untuk menjangkau ratusan titik hingga tingkat kelurahan di Kota Semarang setiap bulannya sebagai upaya menstabilkan harga sekaligus menjaga daya beli warga.

Inovasi tersebut terbukti memberikan dampak makro yang signifikan terhadap stabilitas ekonomi daerah. Langkah intervensi ini sukses menempatkan Kota Semarang sebagai daerah dengan pengendalian inflasi terbaik di Jawa Tengah, mengingat aktivitas ekonomi di Ibu Kota Jawa Tengah ini memberikan andil sebesar

30 persen terhadap pembentukan angka inflasi tingkat regional.

"Efektivitas sistem gotong royong dalam pengendalian pangan tersebut sebenarnya berakar kuat dari modal sosial toleransi masyarakat Kota Semarang yang sudah terjaga ratusan tahun. Karakter kebersamaan itu tercermin dari filosofi makhluk imajiner Warak Ngendog ciptaan para budayawan 142 tahun lalu, dimana pertemuan lintas budaya harus menghasilkan 'telur' atau jalan keluar yang saling menguntungkan secara ekonomi," katanya.

Akar budaya toleransi dan kemandirian ekonomi itu pula yang kemudian memicu lonjakan sektor pariwisata lainnya melalui revitalisasi kawasan Kota Lama secara berkelanjutan sejak tahun 2020. Transformasi kawasan ini sukses membawa Kota Semarang mencatatkan angka kunjungan wisatawan tertinggi di Jawa Tengah selama empat tahun berturut-turut.

Kehadiran Wali Kota Semarang dalam forum nasional tersebut bertujuan untuk membagikan praktik kolaboratif Ibu Kota Jawa Tengah yang berpotensi memperluas referensi dalam membangun kota berketahanan. Agenda Urban Talks ini merupakan bagian dari rangkaian Jakarta Future Festival (JFF) 2026 yang dibuka oleh

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, di Graha Bhakti Budaya TIM.

Memasuki penyelenggaraan tahun ke-3, festival perencanaan kota garapan Bappeda Provinsi DKI Jakarta tersebut mengusung tema "Navigating Resilience" sebagai ruang kolaborasi lintas sektor dalam merencanakan masa depan kota melalui pendekatan budaya, seni, infrastruktur, hingga kebijakan teknokrasi.

"Kunci membangun kota masa depan yang tangguh ada pada ruang dialog, kolaborasi antar-daerah, dan keberanian untuk turun langsung membuat gerakan bersama di lapangan demi kesejahteraan warga," pungkas Agustina.

Wali kota Agustina Apresiasi Karang Taruna Lestarkan Tradisi Budaya Jaranan



SEMARANG – Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng menegaskan komitmennya untuk terus mendukung tumbuhnya kehidupan budaya sebagai bagian dari upaya membangun Kota Semarang yang berakar kuat pada identitas dan kebersamaan warganya.

Komitmen tersebut disampaikan saat menghadiri Pentas Seni Budaya Jaranan yang digelar Karang Taruna Kelurahan Banyumanik di Lapangan Parikesit, Banyumanik, Minggu (14/6). Dalam kesempatan itu, Agustina mengapresiasi peran generasi muda yang tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga pelaku utama dalam menjaga dan melestarikan warisan budaya daerah.

“Kota yang maju bukan hanya kota yang membangun fisiknya, tetapi juga kota yang mampu menjaga akar budayanya. Saya bangga melihat anak-anak muda Banyumanik mau terlibat langsung untuk uri-

uri budaya dan meneruskannya kepada generasi berikutnya,” ujar Agustina.

Kegiatan yang digelar dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam 1448 Hijriah tersebut menghadirkan kelompok seni lokal Banyumanik, yakni Kridho Restu Bawono, Siswa Teguh Mbangun Budoyo, dan Langen Mudo Budoyo. Bagi Agustina, keterlibatan kelompok seni lokal menunjukkan bahwa budaya tumbuh dari masyarakat dan tetap hidup karena dirawat bersama oleh warga.

Menurutnya, ruang-ruang kebudayaan di kampung harus terus diperkuat karena menjadi tempat lahirnya nilai gotong royong, kebersamaan, dan kecintaan terhadap daerah. Kehadiran anak-anak dan generasi muda dalam kegiatan budaya juga menjadi investasi sosial yang penting bagi masa depan Kota Semarang.

“Anak-anak yang hari ini melihat, belajar, dan ikut terlibat dalam kegiatan budaya nantinya akan menjadi generasi yang melanjutkan tradisi ini. Karena itu ruang-ruang budaya seperti ini harus terus kita jaga,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Agustina juga menyampaikan kabar baik bagi warga bahwa Bantuan Operasional Penyelenggaraan

(BOP) sebesar Rp25 juta per RT per tahun mulai dapat dicairkan pada Juni 2026. Ia menegaskan bahwa kebijakan tersebut merupakan bentuk kepercayaan pemerintah kepada masyarakat untuk menentukan kebutuhan lingkungannya secara mandiri melalui musyawarah.

Menurut Agustina, BOP tidak hanya dapat dimanfaatkan untuk mendukung program ketahanan pangan dan lingkungan hidup, tetapi juga untuk memperkuat kegiatan sosial, budaya, dan kebersamaan warga di tingkat kampung.

“Kalau warga sepakat untuk kegiatan budaya, pentas seni, atau kegiatan kemasyarakatan lainnya, silakan. Yang penting direncanakan bersama dan manfaatnya dirasakan bersama. Pemerintah hadir memberi ruang, sementara keputusan terbaik tetap lahir dari warga,” tegasnya.

Ia menambahkan bahwa pembangunan Kota Semarang tidak hanya dilakukan melalui program pemerintah, tetapi juga melalui partisipasi aktif masyarakat yang menjaga lingkungan, memperkuat solidaritas sosial, serta merawat kebudayaan yang menjadi identitas kota.

Selain menghadiri pentas budaya, Agustina juga mengajak masyarakat menjaga

Lapangan Parikesit sebagai ruang publik bersama yang dapat dimanfaatkan untuk aktivitas olahraga, sosial, maupun kebudayaan. Menurutnya, ruang publik yang hidup dan terawat akan menjadi tempat bertemunya warga, tumbuhnya kreativitas, serta semakin kuatnya ikatan sosial di tengah masyarakat.

“Semarang akan menjadi kota yang semakin hebat jika ruang-ruang publiknya hidup, budayanya tumbuh, dan warganya terus bergerak bersama membangun lingkungan masing-masing,” pungkasnya.

**Hebat! Kota Semarang Raih Penghargaan Nasional Creative Financing, Bukti Inovasi
Pemkot Hadirkan Pembangunan yang Berdampak**



SEMARANG - Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng menegaskan bahwa Pancasila harus menjadi kompas yang mengarahkan pembangunan dan kehidupan bermasyarakat di Kota Semarang. Pesan tersebut disampaikan wali kota saat memimpin Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2026 di halaman Balai Kota Semarang, Senin (1/6).

“Bagi kita warga Kota Semarang, bagi kita pemerintah Kota Semarang, bagi kita insan yang mengabdikan sebagai ASN di Kota Semarang, Pancasila adalah kompas yang mengarahkan setiap langkah pembangunan dan kehidupan bermasyarakat,” ujar Agustina di hadapan jajaran Forkopimda, ASN, TNI-Polri, tokoh agama, organisasi kemasyarakatan, dan peserta upacara lainnya.

Menurut Agustina, Kota Semarang telah lama menjadi ruang pertemuan berbagai

suku, agama, budaya, dan tradisi yang hidup berdampingan dalam harmoni. Karena itu, peringatan Hari Lahir Pancasila harus dimaknai sebagai momentum memperbarui komitmen untuk menghadirkan pelayanan publik dan pembangunan yang berlandaskan nilai-nilai kebangsaan.

“Kota kita sejak dahulu telah menjadi ruang pertemuan berbagai suku, agama, budaya, dan tradisi, dan nilai-nilai Pancasila hidup dalam keseharian warga. Karena itu, memperingati Hari Pancasila juga memperbaharui komitmen kita untuk menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman dalam bekerja, melayani, dan mengabdikan kepada masyarakat,” katanya.

Pada upacara tersebut, Agustina juga membacakan sambutan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Republik Indonesia. Dalam sambutan tersebut disampaikan bahwa tema Hari Lahir Pancasila Tahun 2026, “Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia”, menegaskan peran strategis Pancasila dalam menjaga keutuhan bangsa sekaligus berkontribusi terhadap terciptanya perdamaian dunia.

Pancasila disebut sebagai jangkar moral bangsa di tengah berbagai tantangan global, mulai dari perkembangan teknologi hingga dinamika geopolitik. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya juga menjadi fondasi bagi Indonesia untuk terus menjalankan peran aktif dalam menciptakan ketertiban dan perdamaian dunia.

Melalui peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2026, Pemerintah Kota Semarang mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menghidupkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, memperkuat toleransi, menjaga persatuan, serta memastikan pembangunan berjalan selaras dengan prinsip keadilan sosial bagi seluruh warga.

Upacara peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2026 di Balaikota Semarang berlangsung khidmat dan diikuti unsur Forkopimda, pimpinan perangkat daerah, organisasi masyarakat, tokoh agama, serta berbagai elemen masyarakat Kota Semarang.

Wali Kota Agustina Dorong Layanan Pajak Makin Mudah dan Transparan Lewat Pemutakhiran Data Berbasis QR Code IQRO



SEMARANG – Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng, terus mendorong transformasi pelayanan publik yang semakin mudah, cepat, dan transparan bagi masyarakat. Salah satu langkah nyata yang dilakukan Pemerintah Kota Semarang adalah memperkuat tata kelola perpajakan daerah melalui program pemutakhiran data pajak berbasis digital menggunakan stiker **IQRO (Informasi Data Pajak melalui QR Code Online)**.

Melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Semarang yang didukung Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah, kegiatan pendataan dan pemutakhiran data pajak mulai dilaksanakan sejak Senin, 29 Juni 2026, secara serentak di seluruh wilayah Kota Semarang.

Program ini merupakan bagian dari komitmen Wali Kota Agustina untuk menghadirkan pelayanan yang semakin dekat dengan masyarakat sekaligus memastikan

data perpajakan daerah lebih akurat sehingga pembangunan Kota Semarang dapat berjalan secara adil, tepat sasaran, dan berkelanjutan.

Pendataan mencakup tiga jenis pajak daerah, yakni Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Tenaga Listrik, serta Pajak Kendaraan Bermotor yang dilakukan Bapenda Provinsi.

Dalam pelaksanaannya, petugas akan mendatangi objek pajak dan memasang stiker IQRO. Melalui QR Code yang tertera pada stiker tersebut, masyarakat dapat dengan mudah melakukan pembayaran pajak secara daring sekaligus mengajukan pembaruan data apabila terdapat perubahan informasi kepemilikan maupun kondisi objek pajak.

Pemanfaatan teknologi ini diharapkan mampu memangkas proses administrasi sehingga layanan perpajakan menjadi lebih praktis, efisien, dan mudah diakses oleh masyarakat.

Agar proses pendataan berjalan lancar, warga diminta menyiapkan dokumen berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), ID pelanggan PLN beserta informasi daya listrik, serta dokumen legalitas kepemilikan

seperti sertifikat tanah atau bangunan. Untuk PBJT Tenaga Listrik, pendataan dilakukan kepada seluruh pelanggan, baik prabayar maupun pascabayar.

Pemerintah Kota Semarang juga mengedepankan aspek keamanan dan transparansi selama proses pendataan. Seluruh petugas lapangan dibekali surat tugas dan tanda pengenal resmi dari Pemerintah Kota Semarang maupun Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Masyarakat diimbau memastikan identitas petugas sebelum memberikan data.

Sebagai langkah antisipasi terhadap potensi penipuan, Agustina mengingatkan masyarakat agar tidak memberikan uang, barang, maupun imbalan dalam bentuk apa pun kepada petugas karena seluruh layanan IQRO tidak dipungut biaya. Warga juga diminta tidak mengunduh aplikasi maupun mengklik tautan yang dikirim pihak yang mengatasnamakan petugas pajak melalui WhatsApp.

Apabila masyarakat membutuhkan informasi lebih lanjut atau ingin memastikan identitas petugas, dapat menghubungi kanal resmi HALO BAPENDA di 0800-1616-162 atau WhatsApp 0811-2889-809 dan 0822-1221-400.

Melalui program ini, Wali Kota Agustina mengajak seluruh masyarakat untuk berpartisipasi aktif memberikan data yang benar dan akurat. Menurutnya, administrasi perpajakan yang tertib bukan hanya meningkatkan kualitas pelayanan publik, tetapi juga menjadi fondasi penting bagi pembangunan Kota Semarang yang semakin maju, transparan, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.

"Pajak daerah yang dikelola secara baik akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan dan pelayanan publik yang semakin berkualitas. Karena itu, partisipasi warga dalam pemutakhiran data ini menjadi bagian penting dari ikhtiar bersama membangun Kota Semarang," tandas Agustina.

Program IQRO ini merupakan program unggulan Pemerintah Kota Semarang dalam upaya Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD).

Wali Kota Agustina Antisipasi Genangan di Simpang Lima, DPU Intensifkan Pembersihan Drainase



SEMARANG— Komitmen Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng untuk menjaga kawasan Simpang Lima tetap nyaman dan bebas genangan terus diwujudkan melalui langkah-langkah nyata di lapangan. Sebagai bagian dari upaya antisipasi menghadapi musim hujan, Pemerintah Kota atau Pemkot Semarang melalui Dinas Pekerjaan Umum (DPU) terus mengintensifkan pembersihan saluran drainase di kawasan Simpang Lima.

Pembersihan dilakukan dengan mengeruk sedimen dan mengangkat sampah yang menghambat aliran air sehingga kapasitas saluran kembali optimal. Langkah ini merupakan bagian dari pemeliharaan rutin yang menjadi perhatian Wali Kota Agustina untuk memastikan sistem drainase kota berfungsi maksimal, terutama di kawasan strategis yang menjadi ikon Kota Semarang.

Agustina mengatakan pekerjaan difokuskan pada saluran drainase di sekitar Simpang Lima yang selama ini menjadi salah satu titik prioritas pemeliharaan.

"Pembersihan sedimen saluran di seputar Simpang Lima terus dilakukan oleh kawan-kawan Dinas Pekerjaan Umum agar air bisa lancar mengalir," ujar wali kota belum lama ini.

Dari hasil pengerukan, petugas mengangkat endapan tanah serta berbagai jenis sampah seperti gelas plastik dan plastik-plastik kecil yang menghambat aliran air di dalam saluran.

Selain membersihkan sedimen, DPU juga melakukan perbaikan grill atau penutup saluran drainase sebagai bagian dari pemeliharaan infrastruktur pengendali air.

Menurut Kepala DPU Kota Semarang, Suwarto, setiap pintu masuk gorong-gorong sebenarnya telah dilengkapi grill penyaring sampah, namun sampah berukuran kecil masih sering terbawa aliran air dan mengendap bersama sedimen.

"Grill di setiap pintu masuk gorong-gorong yang tertutup sudah ada. Namun memang masih ada sampah-sampah kecil yang lolos," jelasnya.

Ia menambahkan, pembersihan saluran dan pemeliharaan grill akan terus dilakukan secara berkala agar fungsi drainase tetap optimal. Dengan demikian, aliran air hujan dapat mengalir lebih lancar sehingga potensi genangan di kawasan Simpang Lima dapat ditekan.

Langkah ini menjadi bagian dari komitmen Wali Kota Semarang dalam menghadirkan ruang publik yang aman, nyaman, dan tertata. Tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, Pemerintah Kota Semarang juga memastikan infrastruktur yang telah tersedia terus dipelihara secara berkelanjutan agar mampu memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat dan menjaga wajah Simpang Lima sebagai salah satu kawasan kebanggaan Kota Semarang.

Wali Kota Agustina Perluas Perhatian bagi Penggerak Keagamaan, Penerima Bisyaroh di Kota Semarang Hampir Tembus 10.000 Orang



SEMARANG – Kepemimpinan Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng terus diwujudkan melalui kebijakan yang berpihak kepada masyarakat yang selama ini mengabdikan dengan tulus di bidang keagamaan dan layanan sosial. Di bawah kepemimpinannya, Pemerintah Kota Semarang memperluas cakupan penerima bisyaroh bagi modin, guru mengaji, guru Madrasah Diniyah, guru Raudhatul Athfal, hingga petugas kemakmuran masjid sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi mereka dalam menjaga kehidupan sosial dan spiritual masyarakat.

Kebijakan tersebut tercermin dari meningkatnya jumlah penerima bisyaroh dari 6.572 orang pada 2025 menjadi 9.992 orang pada 2026. Penambahan ini menjadi bukti komitmen Pemerintah Kota Semarang untuk memastikan semakin banyak penggerak keagamaan memperoleh perhatian dan dukungan dari pemerintah.

"Kami ingin negara hadir melalui Pemerintah Kota Semarang untuk memberikan penghargaan kepada mereka yang selama ini mengabdikan diri melayani masyarakat dengan penuh keikhlasan. Peran modin, guru mengaji, guru madrasah, marbot, dan seluruh penggerak keagamaan sangat besar dalam menjaga harmoni sosial dan membangun karakter masyarakat. Sudah selayaknya mereka mendapatkan perhatian," ujar Agustina pada Selasa (7/7).

Sejumlah kelompok penerima mengalami peningkatan signifikan. Guru Lembaga Pendidikan Al-Qur'an (LPQ) bertambah dari 3.000 menjadi 4.000 orang, guru Madrasah Diniyah (Madin) meningkat dari 1.000 menjadi 1.390 orang, sementara petugas kemakmuran masjid (marbot) naik dari 531 menjadi 885 orang, dengan target mencapai 1.000 penerima pada 2027.

Selain itu, guru Raudhatul Athfal (RA) yang tergabung dalam Ikatan Guru Raudhatul Athfal (IGRA), yang sebelumnya belum pernah menerima bisyaroh, kini untuk pertama kalinya memperoleh dukungan bagi 320 orang guru.

Khusus bagi modin, Pemerintah Kota Semarang memberikan bisyaroh sebesar

Rp1.000.000 setiap bulan yang disalurkan secara triwulanan.

Komitmen tersebut disampaikan Agustina saat menghadiri Pengukuhan Pengurus Paguyuban Pengurus Jenazah Semarang (P2JS)/Modin Kota Semarang periode 2026–2031 sekaligus membuka Pelatihan Pemulasaraan Jenazah bagi modin se-Kota Semarang di Rumah Dinas Wali Kota Semarang.

Sebanyak 18 pengurus P2JS periode 2026–2031 yang diketuai Widodo Lestari, S.Ag. resmi dikukuhkan. Sementara itu, pelatihan pemulasaraan jenazah dilaksanakan secara bertahap selama dua hari agar dapat diikuti seluruh 1.000 modin di Kota Semarang.

Dalam kesempatan tersebut, Agustina kembali menegaskan komitmennya untuk memastikan seluruh modin di Kota Semarang mendapatkan bisyaroh sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian mereka.

"Saya berkomitmen bahwa semua modin harus dapat bisyaroh ini. Mereka menjalankan tugas kemanusiaan yang sangat mulia, hadir mendampingi warga di saat-saat paling sulit. Pemerintah Kota harus memberikan dukungan dan penghargaan yang layak atas pengabdian tersebut," tegasnya.

Agustina juga menyampaikan apresiasi kepada para modin yang tidak hanya bertugas mengurus pemulasaraan jenazah, tetapi juga menjadi penguat bagi keluarga yang sedang berduka.

Menurutnya, peran tersebut merupakan bagian penting dari pelayanan sosial yang selama ini menjadi kekuatan masyarakat Kota Semarang.

Ke depan, Pemerintah Kota Semarang akan terus mengevaluasi dan memperluas cakupan penerima bisyaroh seiring pertumbuhan jumlah penduduk dan kebutuhan pelayanan di tingkat kelurahan.

Kebijakan ini menjadi bagian dari komitmen kepemimpinan Wali Kota Agustina untuk memastikan pembangunan tidak hanya berfokus pada infrastruktur, tetapi juga memberikan penghargaan kepada mereka yang menjaga nilai-nilai sosial, keagamaan, dan kemanusiaan di tengah masyarakat.

Percepat Pelayanan Publik, Wali Kota Agustina Rotasi 47 Pejabat Pemkot Semarang



SEMARANG – Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng kembali menegaskan komitmennya membangun birokrasi yang profesional, adaptif, dan berorientasi pada hasil melalui penataan sumber daya manusia (SDM) aparatur.

Komitmen tersebut diwujudkan dengan melantik dan mengambil sumpah jabatan 47 pejabat administrator, pengawas, dan pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Kota Semarang, Rabu (8/7), di Ruang Loka Krida, Balai Kota Semarang.

Rotasi dan promosi jabatan ini merupakan bagian dari strategi penguatan organisasi agar setiap perangkat daerah dipimpin oleh aparatur yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan, sekaligus memastikan roda pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat berjalan semakin efektif.

"Rotasi ini bukan sekadar memindahkan orang dari satu jabatan ke jabatan lain, tetapi

bagian dari pengelolaan SDM yang sehat agar organisasi terus bergerak dinamis, produktif, dan mampu menjawab tantangan pembangunan. Tidak ada yang turun pangkat, sebagian besar justru mendapat promosi dan sebagian bergeser dalam jenjang yang sama untuk memperkuat organisasi," ujar Agustina.

Menurutnya, penataan SDM akan terus dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan organisasi. Seluruh proses dilaksanakan berdasarkan mekanisme merit system dengan mengedepankan kompetensi, rekam jejak, serta persetujuan teknis dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).

"Semua proses dilakukan sesuai aturan. Setiap rotasi harus memperoleh persetujuan BKN. Ini menjadi bentuk komitmen kami bahwa pengelolaan ASN di Kota Semarang berlangsung secara profesional, objektif, dan akuntabel," tegasnya.

Agustina juga menyiapkan kebijakan penguatan budaya kerja berbasis kinerja. Pemerintah Kota Semarang tengah menyusun skema pemberian tambahan penghasilan yang lebih terukur berdasarkan pencapaian target kerja masing-masing perangkat daerah.

"Kami ingin membangun budaya kerja yang memberikan penghargaan kepada mereka yang mampu mencapai target. Ke depan, setiap capaian kinerja akan mendapatkan apresiasi melalui tambahan tunjangan. Harapannya, birokrasi semakin produktif dan pelayanan kepada masyarakat semakin berkualitas," jelasnya.

Ia menegaskan bahwa kualitas SDM menjadi salah satu kunci keberhasilan berbagai agenda strategis Kota Semarang, termasuk persiapan sebagai tuan rumah MTQ Nasional XXXI pada September 2026.

"Kita akan menjadi tuan rumah MTQ Nasional. Ini membutuhkan kerja sama lintas perangkat daerah, kesiapan infrastruktur, pelayanan yang prima, hingga SDM yang responsif dan inklusif. Bahkan akan ada penampilan penyandang disabilitas dalam rangkaian kegiatan, sehingga seluruh jajaran harus mampu memberikan pelayanan terbaik kepada semua pihak," katanya.

Sementara itu, Kepala BKPP Kota Semarang Joko Hartono menjelaskan bahwa rotasi dilakukan untuk mengisi sejumlah jabatan yang kosong akibat pensiun sekaligus memenuhi kebutuhan organisasi.

Dari total 47 pejabat yang dilantik, terdiri atas tiga pejabat pimpinan tinggi pratama

yang dimutasi, dua pejabat administrator yang dipromosikan menjadi pimpinan tinggi pratama, 20 pejabat administrator yang menjalani promosi maupun mutasi, serta 22 pejabat pengawas yang dimutasi.

Menurut Joko, seluruh pejabat yang dilantik telah melalui tahapan administrasi, penilaian kompetensi, serta memperoleh persetujuan teknis dari BKN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Kami terus menyiapkan kaderisasi kepemimpinan secara berkelanjutan. Jabatan tidak bisa diisi secara instan, tetapi melalui proses pembinaan dan uji kompetensi sehingga yang terpilih benar-benar sesuai dengan kebutuhan organisasi," ujarnya.

Melalui penataan SDM yang berkelanjutan tersebut, Pemerintah Kota Semarang di bawah kepemimpinan Wali Kota Agustina berharap birokrasi semakin lincah, profesional, dan mampu memberikan pelayanan publik yang semakin cepat, tepat, serta berdampak langsung bagi masyarakat.

Pemkot Semarang Perkuat Sistem Pengamanan Berlapis di TPA Jatibarang, Antisipasi Kebakaran Selama Musim Kemarau



SEMARANG – Pemerintah Kota Semarang memperkuat langkah antisipasi menghadapi potensi kebakaran di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Jatibarang seiring datangnya musim kemarau yang diprediksi berlangsung lebih panjang pada tahun ini.

Melalui sistem pengamanan berlapis yang melibatkan lintas perangkat daerah, Pemkot Semarang memastikan upaya pencegahan dilakukan sejak dini agar operasional pelayanan persampahan tetap berjalan aman dan masyarakat terlindungi.

Komitmen tersebut ditegaskan Sekretaris Daerah Kota Semarang Handi Priyanto saat memimpin Apel Kesiapsiagaan Antisipasi Kebakaran TPA Jatibarang, Kamis (9/7).

Menurutnya, Pemerintah Kota Semarang terus mengedepankan pendekatan mitigasi sebagai bagian dari tata kelola

penanggulangan bencana yang adaptif terhadap perubahan iklim.

"Kita tidak boleh menunggu api muncul baru bergerak. Pencegahan harus menjadi prioritas. Pengalaman kebakaran di TPA Jatibarang menjadi pelajaran bahwa mitigasi jauh lebih penting daripada pemadaman. Karena itu seluruh perangkat daerah harus bekerja secara terpadu agar potensi kebakaran bisa dicegah sejak awal," tegas Handi.

Sebagai bentuk kesiapsiagaan, Pemkot Semarang membentuk Satgas Terpadu yang melibatkan Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pemadam Kebakaran, BPBD, Satpol PP, Dinas Kesehatan, pemerintah kecamatan dan kelurahan, serta mendapat dukungan TNI dan Polri.

Satgas ini bertugas melakukan patroli rutin, memetakan titik-titik rawan, memastikan kesiapan personel dan peralatan, hingga mempercepat respons apabila ditemukan potensi kebakaran.

Selain itu, langkah preventif juga diperkuat melalui pendinginan berkala di area-area rawan menggunakan armada Dinas Pemadam Kebakaran. Posko siaga dan

layanan *_on call_* dari unit pemadam terdekat turut disiapkan agar penanganan dapat dilakukan secara cepat apabila terjadi kondisi darurat.

Pemkot Semarang juga memperketat pengawasan terhadap aktivitas di kawasan TPA. Seluruh petugas, pemulung, maupun pihak yang beraktivitas di area TPA dilarang membawa rokok, korek api, ataupun melakukan pembakaran terbuka sebagai upaya menghilangkan sumber-sumber pemicu kebakaran.

"Faktor manusia masih menjadi salah satu penyebab utama kebakaran. Karena itu pengawasan harus diperketat. Tidak boleh ada toleransi terhadap potensi yang dapat memicu api di kawasan TPA," ujar Handi.

Ia menegaskan bahwa menjaga keamanan TPA Jatibarang merupakan tanggung jawab bersama seluruh perangkat daerah, bukan hanya Dinas Lingkungan Hidup. Sinergi lintas sektor menjadi kunci agar sistem pengawasan berjalan setiap hari secara konsisten.

"Pengamanan TPA merupakan tanggung jawab bersama. Melalui kolaborasi seluruh OPD, kita ingin memastikan pengawasan berlangsung secara berkelanjutan sehingga pelayanan persampahan kepada masyarakat tetap terjaga," katanya.

Berdasarkan prakiraan BMKG, musim kemarau 2026 diperkirakan berlangsung hingga periode Juli–Oktober dengan meningkatnya risiko kebakaran. Kondisi tersebut menjadi perhatian serius Pemerintah Kota Semarang mengingat TPA Jatibarang memiliki tingkat kerawanan tinggi akibat akumulasi gas metana dari timbunan sampah.

Penguatan sistem pengamanan ini menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kota Semarang dalam membangun kota yang tangguh terhadap bencana dan perubahan iklim.

Melalui langkah mitigasi yang cepat, terintegrasi, dan berkelanjutan, Pemkot Semarang berupaya menjaga keberlangsungan layanan pengelolaan sampah sekaligus memberikan perlindungan maksimal bagi masyarakat dan lingkungan.

Temui Warga Mangkang, Wali Kota Agustina Intervensi Sektor Kesehatan, Hunian, hingga Pengairan



SEMARANG – Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng, melakukan kunjungan lapangan dan menemui warga di Kelurahan Mangkang Kulon dan Kelurahan Mangkang Wetan, Kecamatan Tugu, Jumat (10/7). Dalam dialog langsung tersebut, Agustina mengurai berbagai persoalan wilayah sekaligus menyiapkan langkah intervensi komprehensif mulai dari sektor jaminan sosial, kesehatan masyarakat, hingga pembenahan infrastruktur pengairan sawah.

Salah satu fokus utama dalam kunjungan ini adalah percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem melalui program pembenahan hunian. Agustina menetapkan target capaian untuk menyelesaikan perbaikan ribuan unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kota Semarang sepanjang tahun ini.

"Prioritas utama di tahun ini, kami menargetkan penyelesaian 2.500 unit RTLH

untuk kita bereskan bersama. Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang mengalokasikan 1.500 unit, dan kami mendapatkan dukungan tambahan dari pemerintah pusat sebanyak 1.000 unit, serta stimulan dari pemerintah provinsi," ujarnya di sela-sela dialog bersama warga.

Agustina menambahkan, jika kuota anggaran reguler tersebut masih belum mencukupi kebutuhan di lapangan, Pemkot Semarang akan bergerak taktis merangkul berbagai mitra swasta melalui skema tanggung jawab sosial perusahaan atau _Corporate Social Responsibility_ (CSR).

Selain melakukan penataan fisik hunian, Wali Kota menaruh perhatian serius pada aspek kesehatan masyarakat di kawasan pemukiman padat tersebut. Dia meminta jajaran Puskesmas setempat untuk bergerak lebih proaktif melalui skema jemput bola setelah menerima laporan adanya warga yang membutuhkan penanganan medis.

"Saat meninjau lingkungan tadi, saya melihat ada beberapa hal yang harus segera diintervensi. Masyarakatnya juga secara kesehatan saya minta dicek. Saya berharap jajaran Puskesmas untuk lebih rajin turun ke lapangan, tadi ada laporan warga yang terkena stroke dan saya minta itu segera ditangani dengan cepat," jelasnya.

Tidak berhenti pada urusan sosial dan kesehatan, kunjungan lapangan ini juga dimanfaatkan Agustina untuk mengurai problematika pengairan lahan pertanian warga. Dia menemukan adanya penyempitan saluran air (_bottleneck_) serta dimensi pintu air yang terlalu kecil, sehingga debit air sungai kerap melimpas ke rumah warga sebelum sampai ke area persawahan.

Menyikapi kendala teknis tersebut, Agustina mengoordinasikan langkah penanganan bersama Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Semarang untuk melakukan normalisasi, memperlebar saluran, serta melakukan peremajaan sistem pintu air di kawasan Mangkang.

"Ada kendala saluran yang menyempit dari sungai ke pintu menuju sawah, dimensinya agak kecil sehingga memicu limpasan ke pemukiman. Saya sudah meminta Dinas PU untuk mengecek dan memperlebar saluran tersebut. Pola penanganannya adalah dengan mengganti pintu air yang lama dengan dimensi yang jauh lebih besar agar pengairan sawah lancar tanpa merendam rumah warga," katanya.

Melalui rangkaian temu warga lokal ini, Agustina menegaskan bahwa peninjauan langsung menjadi instrumen penting bagi Pemkot Semarang untuk menyerap aspirasi

riil dari akar rumput. Langkah ini memastikan setiap kebijakan intervensi yang diambil pemerintah daerah benar-benar akurat, adaptif, dan menyentuh langsung kebutuhan mendasar masyarakat.

Tinjau Tambak Lorok, Agustina Siapkan Penanganan untuk Kurangi Dampak Rob



SEMARANG – Rob yang datang hampir setiap bulan masih menjadi persoalan bagi warga Tambak Lorok, Kelurahan Tanjung Mas, Kecamatan Semarang Utara. Menyikapi kondisi tersebut, Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng, turun langsung meninjau lokasi pada Kamis (9/7) malam untuk memastikan langkah penanganan dapat segera dilakukan sebelum siklus pasang berikutnya.

"Kami ingin menyelesaikan keresahan warga akibat rob yang terjadi hampir setiap bulan. Setelah melihat langsung di lapangan, memang ada beberapa pekerjaan yang harus segera dilakukan. Salah satunya membutuhkan persetujuan warga agar saluran yang selama ini tertutup bisa kami tangani," ujarnya di sela-sela peninjauan.

Salah satu langkah penting yang harus ditempuh adalah normalisasi saluran air di sekitar permukiman warga. Wali Kota Semarang menginstruksikan pihak

kecamatan dan kelurahan untuk segera menggelar rembuk warga guna mendapatkan persetujuan terkait pembukaan saluran air yang saat ini posisinya tertutup oleh aktivitas atau bangunan masyarakat.

Persetujuan tersebut dinilai krusial agar pelaksanaan intervensi infrastruktur oleh Dinas Pekerjaan Umum (DPU) serta Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kota Semarang dapat berjalan dengan aman, lancar, dan tanpa kendala sosial di lapangan.

"Nanti akan dirembuk antara Bu Camat, Pak Lurah dengan warga, supaya nanti teman-teman dari DPU dan Disperkim kalau melakukan intervensi tetap aman," katanya.

Selain penataan saluran air permukiman, Wali Kota bergerak cepat mengoordinasikan perbaikan infrastruktur utama penahan laut dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana. Langkah kedaruratan juga disiapkan oleh DPU dengan merencanakan pemasangan tanggul darurat di titik-titik limpasan air.

Agustina berharap seluruh rangkaian upaya mitigasi ini dapat berjalan simultan sehingga mampu meminimalkan dampak luapan air laut pada siklus rob di bulan berikutnya.

"Kami sudah berkoordinasi dengan teman-teman BBWS agar struktur tembok _sheet pile_ yang retak bisa segera ditangani. Selain itu, DPU juga segera memasang tanggul kantong pasir (_sandbag_) sebagai langkah darurat untuk menahan limpasan air ke permukiman warga. Mudah-mudahan seluruh upaya ini bisa mengurangi dampak rob pada bulan berikutnya," pungkasnya.

Pemkot Semarang Permudah Warga Akses Obat Lewat Pharma City



Semarang – Pemerintah Kota Semarang terus menghadirkan inovasi yang menjawab kebutuhan masyarakat. Kini, warga tidak perlu lagi berpindah dari satu apotek ke apotek lain hanya untuk mencari obat yang dibutuhkan. Melalui Pharma City (Pelayanan Farmasi Apotek Terintegrasi Kota Semarang), masyarakat dapat mengetahui lokasi apotek, mengecek ketersediaan obat secara real time, hingga berkonsultasi dengan apoteker melalui satu platform digital. Inovasi tersebut resmi diluncurkan Sekretaris Daerah Kota Semarang, Handi Priyanto, dalam kegiatan Bimbingan Teknis Pelayanan Kefarmasian di Hotel MG Setos, Rabu (15/7).

Sekretaris Daerah Kota Semarang Handi Priyanto mengatakan, digitalisasi pelayanan kefarmasian merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Kota Semarang untuk menghadirkan pelayanan publik yang

semakin cepat, mudah, dan berpihak kepada masyarakat.

"Pelayanan kesehatan harus semakin dekat dengan masyarakat. Melalui Pharma City, warga tidak lagi mengandalkan informasi dari mulut ke mulut atau harus mendatangi beberapa apotek untuk mencari obat. Informasi yang dibutuhkan kini dapat diakses lebih cepat sehingga masyarakat bisa memperoleh layanan kesehatan secara lebih efektif," kata Handi.

Ia menjelaskan, selama ini data pelayanan kefarmasian masih tersebar di berbagai fasilitas sehingga belum terintegrasi secara optimal. Kondisi tersebut tidak hanya menyulitkan proses pengawasan, tetapi juga membatasi akses masyarakat terhadap informasi mengenai layanan apotek dan ketersediaan obat.

Melalui Pharma City, 445 apotek di Kota Semarang kini terhubung dalam satu sistem digital yang menjadi pusat data pelayanan kefarmasian. Integrasi tersebut memungkinkan masyarakat memperoleh informasi secara lebih mudah, sekaligus memperkuat pengawasan pemerintah terhadap mutu pelayanan dan keamanan peredaran obat.

Selain memberikan kemudahan bagi masyarakat, digitalisasi ini juga meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan. Proses pendataan, pelaporan, hingga pengawasan pelayanan kefarmasian dilakukan secara lebih cepat dan akurat, sehingga pemerintah dapat mengambil kebijakan berdasarkan data yang terintegrasi. Sistem ini juga mendukung transparansi pelayanan perizinan serta memberikan kepastian bagi pelaku usaha apotek dalam menjalankan usahanya.

Menurut Handi, transformasi pelayanan kesehatan tidak cukup hanya dengan membangun fasilitas, tetapi juga memastikan masyarakat memperoleh akses informasi yang mudah dan pelayanan yang berkualitas. Karena itu, Pemerintah Kota Semarang terus memperkuat kapasitas tenaga kefarmasian melalui bimbingan teknis sekaligus membangun kolaborasi dengan Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, Balai Besar POM di Semarang, organisasi profesi, dan seluruh pelaku usaha apotek.

"Transformasi digital bukan tujuan akhir, tetapi sarana untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Ketika warga lebih mudah mendapatkan informasi obat, memperoleh pelayanan yang aman, dan dilayani secara

cepat, maka di situlah manfaat pembangunan benar-benar dirasakan," tegasnya.

Ke depan, Pemerintah Kota Semarang akan terus mengembangkan Pharma City dan mengintegrasikannya dengan ekosistem digital kesehatan nasional, termasuk platform SatuSehat. Langkah tersebut diharapkan semakin memperkuat pelayanan kefarmasian yang modern, transparan, dan responsif, sehingga setiap warga Kota Semarang memperoleh akses layanan kesehatan yang aman, berkualitas, dan mudah dijangkau.

Komitmen Hapus Bullying, Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Instruksikan Ekosistem Sekolah Ramah Anak



SEMARANG – Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng, menegaskan komitmennya untuk memastikan setiap sudut Kota Semarang aman dan ramah bagi tumbuh kembang anak. Hal tersebut disampaikan saat membuka secara resmi acara Konferensi Anak Kota Semarang Tahun 2026 yang dihadiri 300 anak dari berbagai latar belakang di Balai Kota Semarang, Rabu (22/7).

Dalam sesi dialog bersama para peserta, Agustina menekankan bahwa meraih predikat Kota Layak Anak (KLA) bukanlah tujuan satu-satunya, melainkan bagaimana memastikan anak-anak benar-benar merasa nyaman di lapangan. Aspirasi yang disampaikan anak-anak dalam forum ini ditegaskannya akan menjadi pijakan penting bagi jajaran dinas dalam merencanakan pembangunan daerah.

"Yang kita lakukan mati-matian adalah berpikir bagaimana anak-anak itu dapat nyaman. Stick on yang kecil-kecil tadi membantu para kepala dinas untuk mengambil keputusan menjadi referensi yang penting," ujar Agustina.

Sejalan dengan dinamika era digital, ia juga menyatakan kesiapan daerahnya menjadi pionir dalam mempromosikan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Pelindungan Anak dalam Sistem Elektronik (PP Tunas). Langkah strategis yang didorong Pemkot Semarang mencakup edukasi cyber-parenting, literasi digital di sekolah, hingga pengawasan terhadap platform digital.

"Kota Semarang sudah mencanangkan berbagai macam hal berkaitan dengan bagaimana anak-anak dapat tumbuh dengan aman, baik, dan mendapat support. Namun, kita tidak akan ada di dalam pikiran bagaimana menciptakan handphone ini aman bagi anak-anak tanpa bertanya langsung kepada mereka," tuturnya.

Selain persoalan digital, Agustina menaruh perhatian mendalam pada upaya pencegahan kasus perundungan (bullying) di lingkungan sekolah. Beliau menegaskan bahwa tindakan

bullying memberikan dampak trauma psikologis yang panjang bagi korban, sehingga gerakan pencegahan harus dibangun bersama oleh anak-anak.

"Bagi saya sebagai Wali Kota, saya berkomitmen bahwa bullying tidak boleh ada di mana pun karena dampaknya sangat membekas. Jika anak-anak setuju, mari kita buat forum anti-bullying di sekolah masing-masing," tegasnya.

Komitmen penuh Agustina tersebut mendapat apresiasi dari Kepala Perwakilan UNICEF Wilayah Jawa-Bali, Arie Rukmantara, yang hadir sebagai keynote speaker. Dalam kesempatan ini, UNICEF secara resmi mengumumkan penunjukan Kota Semarang sebagai tuan rumah penyelenggaraan program penguatan keterampilan Science, Technology, Engineering, and Math (STEM) bagi remaja putri.

"Kota Semarang akan jadi tuan rumah program transisi pembahasan science, technology, engineering, and math dari UNICEF. Kami mengapresiasi komitmen Kota Semarang untuk membuat konferensi ini karena benar-benar menunjukkan Kota Layak Anak utama yang membangun kotanya bersama anak-anak," puji Arie.

Guna memastikan suara anak masuk ke dalam Musrenbang Perempuan dan Anak, Konferensi Anak 2026 diisi dengan diskusi kelompok 5 klaster hingga perumusan Suara Anak Kota Semarang 2026. Pada kesempatan tersebut Agustina juga menyemangati agar generasi muda Kota Semarang berani mengejar cita-cita dan menjaga sesama.

"Anak-anak hebat Kota Semarang, teruslah belajar, berani bermimpi besar, dan jangan pernah takut gagal. Gantungkan cita-citamu setinggi langit, karena Pemerintah Kota Semarang akan selalu mendukung dan melindungi kalian," pungkasnya.

Antisipasi Kekeringan, Pemkot Semarang Siagakan 900 Ribu Liter Air Bersih dan Amankan Saluran Irigasi



SEMARANG – Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng, memperketat kesiapsiagaan seluruh jajaran instansi Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang guna mengantisipasi bahaya kekeringan dan krisis air bersih selama musim kemarau. Langkah ini mencakup pengamanan pasokan air irigasi, pengelolaan sumber air warga, hingga skema percepatan distribusi air bersih ke pemukiman rawan.

Berdasarkan pemetaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Semarang, terdapat empat kecamatan utama yang dipetakan sebagai wilayah paling rawan kekeringan. Wilayah tersebut meliputi Kecamatan Tembalang (Kelurahan Rowosari dan Mangunharjo), Kecamatan Banyumanik (Kelurahan Jabungan), Kecamatan Gunungpati (Kelurahan Cepoko), serta Kecamatan Ngaliyan (Kelurahan Wonosari),

ditambah Kecamatan Genuk yang masuk dalam pantauan khusus.

"Mayoritas wilayah rawan ini berada di area perbukitan yang minim sumber mata air serta belum sepenuhnya terjangkau jaringan PDAM. Pemkot Semarang melalui BPBD telah menyiagakan cadangan logistik air bersih sebanyak 900.000 liter yang diproyeksikan aman hingga akhir tahun," ujar Agustina pada Sabtu (25/7).

Guna memastikan penanganan yang terukur, Pemkot Semarang menyiagakan armada truk tangki berkapasitas 5.000 liter untuk penyaluran air secara berkala. Hingga saat ini, sebanyak 48.000 liter air bersih (8 truk tangki) telah didistribusikan ke sejumlah lokasi, meliputi Kelurahan Kalipancur, Perumahan Permata Tembalang, Griya Permata Permai, Perumahan Lestari Indah, Kelurahan Bulusan, dan Kantor BPBD.

"Kami memastikan sinergi lintas sektor antara BPBD, PDAM, hingga jajaran kewilayahan berjalan responsif. Jika ada wilayah yang mulai mengalami keterbatasan air, warga dapat melapor melalui pengurus RT/RW agar pengiriman bantuan armada tangki bisa segera kami jadwalkan," tegasnya.

Sementara itu, untuk sektor pertanian dan irigasi, Agustina memastikan bahwa jajaran Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Semarang terus bekerja menjaga ketersediaan pasokan air di lapangan. Sumber pasokan air irigasi berasal dari bendung-bendung sungai dan sendang-sendang yang ada.

"Menghadapi musim kemarau ini pasokan air irigasi masih aman. Saat ini yang dilakukan DPU Kota Semarang untuk menjamin amannya pasokan adalah menjaga bendung dan saluran irigasi dari kebocoran, sampah, serta endapan tanah sehingga aliran berjalan lancar," jelas Agustina.

Ia memaparkan bahwa pemenuhan irigasi di Kota Semarang lebih banyak mengandalkan bendung ketimbang embung. Keberadaan puluhan sendang di kawasan perbukitan juga dipastikan masih mengalir normal dan dapat dimanfaatkan warga sekitarnya selama kemarau.

“Karena ada potensi Hari Tanpa Hujan (HTH) dari perkiraan BMKG, saya harap seluruh masyarakat Kota Semarang untuk tetap menggunakan air secara bijak dan efisien,” pungkasnya.

Semarakkan Jalan Sehat Muktiharjo Kidul, Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Cek Realisasi Bantuan Rp25 Juta per RT



SEMARANG – Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng menyapa ratusan warga Kelurahan Muktiharjo Kidul dalam kegiatan jalan sehat memperingati HUT ke-81 RI pada Minggu (2/8) pagi. Kehadiran tersebut menjadi kesempatan bagi Agustina untuk melihat langsung keguyuban warga sekaligus memastikan pemanfaatan bantuan operasional Rp25 juta per RT berjalan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Di hadapan warga yang memadati lokasi, Agustina menyampaikan rasa bahagianya dapat hadir dan menyaksikan langsung semangat kebersamaan masyarakat dalam menyambut bulan kemerdekaan.

"Saya bersyukur bisa hadir di tengah warga Muktiharjo Kidul yang begitu guyub dan antusias. Peringatan kemerdekaan ini menjadi momen berharga untuk mempererat

silaturahmi sekaligus memastikan program-program pemerintah benar-benar dirasakan manfaatnya," ujarnya.

Pemanfaatan bantuan Rp25 juta per RT terlihat dalam mendukung berbagai kegiatan kemasyarakatan di wilayah tersebut. Menurut Agustina, hingga saat ini penyaluran anggaran telah mencapai lebih dari 10.000 RT dari total sekitar 10.500 RT di Kota Semarang. Warga mengalokasikan dana tersebut sesuai kebutuhan lingkungannya, mulai dari penguatan keamanan pemukiman melalui perbaikan CCTV, penyelenggaraan lomba 17-an, hingga kegiatan syukuran warga.

Agustina menegaskan, keterbukaan dan kepastian pencairan anggaran ini menjadi komitmen pemerintah daerah dalam merawat kebersamaan warga.

"Anggaran tersebut sudah cair dan digunakan warga untuk memperbaiki CCTV, menggelar lomba, hingga tumpengan. Sementara untuk wilayah yang tidak mengajukan, anggarannya dikembalikan ke kas daerah agar dapat dimanfaatkan bagi warga lain yang lebih membutuhkan," katanya.

Selain memastikan keterlibatan warga dalam dalam pemanfaatan anggaran RT, Wali Kota juga mendorong keberlanjutan gerakan lingkungan melalui penguatan peran kader PKK. Pihaknya tengah menyiapkan Lomba Taman Obat Keluarga (TOGA) secara berjenjang di 16 kecamatan pada akhir tahun 2026. Penilaian lomba nantinya tidak hanya berfokus pada kelengkapan tanaman, melainkan juga pada kreativitas warga dalam mengolah hasil panen TOGA menjadi produk bernilai tambah.

Pada kesempatan tersebut, Agustina mengapresiasi konsistensi warga dalam menjaga kebersihan lingkungan serta menggerakkan tiga pilar program kemasyarakatan.

"Terima kasih kepada ibu-ibu dan seluruh warga yang terus konsisten memantau jentik nyamuk, memilah sampah, serta merawat Taman TOGA. Mari kita terus jaga lingkungan agar tetap sehat, hijau, dan rukun," pungkasnya.

Antisipasi Kebutuhan Lahan Makam, Pemkot Semarang Tata TPU dan Dorong Pengembang Serahkan PSU



Pemerintah Kota Semarang melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) terus memperkuat penataan layanan pemakaman untuk mengantisipasi meningkatnya kebutuhan lahan makam seiring pertumbuhan penduduk. Upaya tersebut dilakukan melalui optimalisasi pengelolaan 15 Tempat Pemakaman Umum (TPU) milik pemerintah daerah sekaligus mendorong pengembang perumahan agar segera menyerahkan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU), termasuk lahan pemakaman umum, kepada Pemerintah Kota Semarang.

Kepala Disperkim Kota Semarang, Murni Edianti, menegaskan penyediaan layanan pemakaman merupakan salah satu pelayanan dasar yang harus dijamin keberlanjutannya.

"Pelayanan pemakaman adalah kebutuhan dasar masyarakat yang harus dijamin pemerintah. Karena itu kami tidak hanya menata pengelolaan TPU yang ada, tetapi juga menyiapkan keberlanjutan penyediaan

lahan makam agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi, baik hari ini maupun di masa mendatang," ujar Murni.

Saat ini, Pemkot Semarang mengelola 15 TPU yang tersebar di berbagai wilayah. Empat TPU, yakni TPU Kesambi Sompok, TPU Kembangarum, TPU Trunojoyo, dan TPU Dadapan telah mencapai kapasitas penuh sehingga hanya melayani pemakaman sistem tumpang bagi keluarga yang telah memiliki makam di lokasi tersebut. Sementara itu, layanan pemakaman baru dialihkan ke TPU lain yang masih memiliki ketersediaan lahan.

Untuk menjamin ketersediaan lahan makam dalam jangka panjang, Disperkim juga terus mendorong percepatan penyerahan PSU oleh pengembang perumahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2015. Setiap pengembang wajib menyediakan lahan pemakaman umum paling sedikit dua persen dari luas lahan sesuai rencana perumahan, baik di dalam maupun di luar kawasan yang dikembangkan.

"Kami mengajak seluruh pengembang perumahan yang belum menyerahkan PSU, khususnya lahan pemakaman umum, untuk

segera memenuhi kewajibannya. Penyerahan tersebut bukan sekadar memenuhi regulasi, tetapi juga merupakan kontribusi nyata dalam menyediakan fasilitas publik yang akan dimanfaatkan masyarakat Kota Semarang," kata Murni.

Ia menjelaskan, lahan yang diserahkan harus memenuhi persyaratan teknis, antara lain sesuai rencana tata ruang, tidak berada di kawasan rawan banjir maupun longsor, memiliki struktur tanah yang layak, serta didukung akses jalan sehingga dapat difungsikan sebagai TPU yang aman dan nyaman.

Selain memperluas ketersediaan lahan, Pemkot Semarang juga terus meningkatkan kualitas pelayanan melalui penataan lingkungan TPU yang lebih asri, pengembangan layanan berbasis digital, pelayanan mobil jenazah dengan tarif resmi sesuai Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2023, serta peningkatan profesionalitas petugas lapangan.

"Komitmen kami adalah menghadirkan layanan pemakaman yang tertib, transparan, dan humanis. Melalui penataan TPU, peningkatan kualitas layanan, serta dukungan penyediaan lahan baru, kami ingin memastikan setiap warga memperoleh

pelayanan yang layak ketika menghadapi masa duka," pungkas Murni.

Wali Kota Agustina Dorong Anak Semarang Tumbuhkan Budaya Ilmiah



SEMARANG — Menumbuhkan budaya ilmiah sejak dini menjadi kunci menyiapkan generasi Kota Semarang yang siap menghadapi tantangan masa depan. Hal tersebut disampaikan Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng, saat memberikan sambutan sekaligus membuka secara resmi Babak Penyisihan Lomba SiNARAN (Sains Anak Kota Semarang) Tahun 2026 di Ballroom Balairung Astina, UTC Hotel, Selasa (4/8).

Sebanyak 550 peserta jenjang SD dan SMP mengikuti babak ini, hasil penyaringan dari 6.292 pendaftar se-Kota Semarang. Para peserta berasal dari sekolah negeri, swasta, madrasah, hingga jalur Paket A dan Paket B. Keberagaman peserta menurut Agustina menunjukkan bahwa kesempatan belajar sains terbuka bagi seluruh anak di Kota Semarang.

"Hari ini kita tidak sekadar memulai perlombaan, tapi sedang menumbuhkan budaya ilmiah di Kota Semarang," ujarnya.

Agustina menegaskan, budaya ilmiah yang dimaksud adalah kebiasaan bertanya, mencari tahu, menguji gagasan, dan mengambil kesimpulan berdasarkan bukti, budaya yang menurutnya akan membawa Kota Semarang terus berkembang. "Kemampuan berpikir kritis itu, menjadi bekal penting generasi muda menghadapi perkembangan teknologi yang serba cepat, termasuk kehadiran kecerdasan buatan (AI), dalam kehidupan sehari-hari," imbuhnya.

Sebagai motivasi, Agustina turut menyinggung prestasi Albert Eng, siswa Singapore Intercultural School Semarang yang meraih medali emas pada final World Mathematics Invitation 2026 di Jepang. Baginya, capaian tersebut membuktikan bahwa anak-anak Kota Semarang mampu bersaing di tingkat dunia ketika mendapat ruang untuk belajar dan tumbuh dalam lingkungan yang membudayakan sains.

Lomba SiNARAN 2026 merupakan program pengembangan talenta sains yang diselenggarakan Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kota Semarang, mengangkat tema penguatan kemampuan

berpikir kritis (_critical thinking_) bagi peserta didik jenjang SD/MI dan SMP/MTs sederajat. Babak Penyisihan hari ini akan menyaring 60 finalis, terdiri dari 30 peserta jenjang SD dan 30 peserta jenjang SMP, yang akan melaju ke Babak Final pada 13 Agustus 2026 mendatang.

Agustina berharap ajang ini terus berlanjut dan berkembang menjadi program unggulan berkelanjutan. "Semoga dari ruangan hari ini lahir generasi yang membawa Kota Semarang semakin cerdas, semakin inovatif, dan semakin hebat," pungkasnya.

Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng Dorong Penguatan Inovasi Digital AI yang Bertanggung Jawab dan Berbasis Kebutuhan Publik



SEMARANG — Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng mendorong efisiensi operasional tata kelola perkotaan dan penyelesaian kendala riil di lapangan melalui penerapan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI). Langkah strategis ini ditegaskannya dalam ajang Semarang Marketing Festival (SMF) 2026 hari kedua (_Corporate Day_) yang bertajuk “Winning the Competition in the Age of AI” di Hotel Santika Premiere Semarang, Selasa (4/8).

Salah satu wujud nyata dari strategi digital berbasis kebutuhan publik tersebut diimplementasikan melalui sistem kecerdasan buatan bertajuk AISSA (AI Solusi Sampah). Inovasi ini dirancang sebagai sistem pemantauan kebersihan lingkungan yang terintegrasi langsung dengan kamera pengawas (CCTV) di 35 Titik Pembuangan Sampah (TPS). Agustina

menyatakan bahwa keberhasilan adopsi kecerdasan buatan sangat bergantung pada arah pembentukan sistem serta pengawasan dari kualitas sumber daya manusia yang mengendalikannya.

"AI yang kita pakai ini merupakan sarana dan alat. Pada akhirnya, _nothing and no one, but the man behind the gun_. Jika kita ingin memenangkan teknologi untuk kemajuan, maka AI harus diisi sesuai kebutuhan dan nilai-nilai yang ingin kita bangun," ujarnya.

Wali Kota mengungkapkan bahwa penerapan sistem kecerdasan buatan pada sektor publik menjadi tantangan tersendiri bagi jajaran pemerintah daerah karena memerlukan keakuratan input data internal agar alur kerja berjalan presisi. Menurutnya, penetapan kecerdasan buatan harus senantiasa dievaluasi agar sistem terisi oleh parameter operasional yang tepat dan objektif.

"Penghargaan ini menakutkan buat kami. Kenapa? Karena kami baru saja melakukan proses untuk 35 TPS dengan menggunakan CCTV. Ya, AI ini diisi. Jadi, AI itu adalah sebuah sistem yang diisi menurut kehendak kita. Kalau kita menggunakan AI informasi dari Google, ya pasti apa yang ada di Google

itu dirangkul. Benar, salah, enggak ada yang koreksi," ungkapnya.

Semarang Marketing Festival 2026 sendiri merupakan bagian dari rangkaian The 14th Indonesia Marketing Festival 2026 yang diinisiasi oleh MCorp. Forum bisnis tahunan ini digelar sebagai wadah kolaborasi untuk mempertemukan pimpinan industri, praktisi pemasaran, serta jajaran birokrat Jawa Tengah guna merumuskan strategi adaptasi dan efisiensi di tengah pesatnya perkembangan teknologi kecerdasan buatan.

Dalam kesempatan tersebut, Agustina berkesempatan menyerahkan penghargaan dari MCorp kepada sejumlah pimpinan perguruan tinggi dan institusi bisnis terkemuka. Untuk kategori Kampus, penghargaan diserahkan kepada Universitas Stikubank (UNISBANK), Universitas Wahid Hasyim (Unwahas), Universitas Diponegoro (Undip), dan Universitas Katolik (Unika) Soegijapranata. Sementara untuk kategori _Corporate_, penghargaan dianugerahkan kepada RSUP Dr. Kariadi, SMC RS Telogorejo, AWANN Group, serta PT Siba Surya.

Rangkaian ajang tahunan ini juga diisi dengan penyerahan penghargaan Public Service Award Central Java 2026 dan Industry Marketing Champion Semarang

2026, serta sesi diskusi strategis mengenai pentingnya sentuhan nilai kemanusiaan di era serba digital.

“Kota Semarang akan terus menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi dan berkomitmen menuju jajaran _Smart City_ melalui berbagai inovasi pelayanan publik,” pungkasnya.

Wali Kota Agustina Buka Skrining Kanker Payudara Gratis, Sasar Perempuan Rentan di Kota Semarang



Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng, membuka kegiatan deteksi dini kanker payudara bagi perempuan di Hall dan Aula Balai Kota Semarang, Selasa (11/8). Kegiatan ini digelar tiga hari berturut-turut, 10 sampai 12 Agustus 2026, dalam rangkaian Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia yang mengusung tema "Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur".

Pada kesempatan tersebut, Agustina berkeliling memantau langsung jalannya skrining kanker payudara, deteksi kanker leher rahim, skrining TB dengan X-ray portable, pemeriksaan mata dan gigi, hingga donor darah.

Dalam sambutannya, Agustina menegaskan skrining kanker payudara gratis ini menyasar kelompok perempuan rentan yang selama ini kesulitan mengakses pemeriksaan karena biaya.

"Paling banyak kelompok rentan ada ibu-ibu dari ojek online, ada ibu-ibu yang sepuh, sudah tidak punya pendapatan," ujar Agustina.

Manfaat itu dirasakan langsung oleh Ana, warga Kelurahan Sekayu, yang mengikuti skrining untuk pertama kalinya hari ini. Ia mendapat informasi kegiatan ini dari komunitasnya.

"Sangat membantu, karena memang terutama untuk perempuan usia di atas 50 tahun itu penting banget pemeriksaan payudara. Selama ini belum pernah periksa karena biayanya memang besar," ujar Ana.

Lebih lanjut Agustina menambahkan, tanpa skrining, banyak kasus kanker baru terdeteksi setelah masuk stadium lanjut. Karena itu ia meminta Dinas Kesehatan menindaklanjuti setiap temuan hasil skrining dan menjamin penanganannya tetap gratis melalui skema Universal Health Coverage (UHC).

"Kepada Dinas Kesehatan, saya perintahkan jika ada temuan gejala dalam proses deteksi ini, saya minta ada tindak lanjut. Dan itu harus ditutup dengan UHC, supaya tidak perlu mengeluarkan pembiayaan," kata Agustina.

Kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi Pemerintah Kota Semarang dengan sejumlah rumah sakit, yakni RS Siloam Hospitals Semarang, RS Samsoe H, RS William Booth, dan RSWN, bersama Rotary Club Semarang Tugu Muda dan Rotary Club Semarang Kunti. Kuota peserta screening 300 orang per hari.

Selain layanan kesehatan, kegiatan turut dimeriahkan bazar UMKM binaan Dinas Koperasi dan UKM yang berkolaborasi dengan Rotary, serta hiburan solo organ dan penampilan band lokal. Sebelum meninggalkan lokasi, Agustina turut berbaur bersama peserta mengikuti sesi line dance yang dipandu Rotary.

Agustina berharap skrining ini dapat terus berlanjut secara rutin sehingga makin banyak perempuan Kota Semarang yang terlindungi dari risiko kanker payudara sejak dini.

Hadiah Mak Jagagik Padel Dikonversi Jadi Bantuan Sosial, Wali Kota Agustina Apresiasi Aksi Kolaboratif Insan Pers



SEMARANG – Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng mengapresiasi aksi sosial yang lahir dari ajang ‘Mak Jagagik Padel’ melalui penyaluran 250 paket sembako serta bantuan medis kepada Panti Asuhan Cacat Ganda Bhakti Asih, Selasa (11/8). Bantuan tersebut merupakan hasil konversi hadiah turnamen yang diserahkan sebagai bagian dari rangkaian kepedulian sosial menyambut HUT Kemerdekaan Republik Indonesia.

Paket bantuan yang diserahkan meliputi bahan pangan pokok, obat-obatan, serta perlengkapan harian. Penyalurannya melibatkan sejumlah pihak, termasuk Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan PDAM Tirta Moedal.

“Saya mengapresiasi kolaborasi ini. Kegiatan olahraga yang mempertemukan teman-teman dari berbagai sektor kemudian menghasilkan

manfaat yang langsung dirasakan anak-anak di Panti Bhakti Asih. Semangat seperti ini perlu terus kita jaga,” ujarnya saat menyerahkan bantuan di lokasi panti.

Agustina menegaskan perhatian terhadap lembaga sosial yang mendampingi warga rentan dan anak-anak penyandang disabilitas ganda perlu dilakukan secara berkelanjutan. Menurutnya, dukungan dari berbagai unsur masyarakat dapat memperkuat kepedulian sosial sekaligus memperluas manfaat bagi warga yang membutuhkan.

“Pemerintah tentu membutuhkan dukungan banyak pihak. Kepedulian dari teman-teman jurnalis, BUMD, dunia usaha, dan berbagai komunitas menjadi kekuatan untuk memperluas jaring kepedulian sosial di Kota Semarang,” tegasnya.

Ketua Unit Panti Asuhan Cacat Ganda Bhakti Asih, Suster Magdalena, mengatakan bantuan tersebut sangat berarti bagi panti yang memberikan pendampingan selama 24 jam kepada para penghuninya. Saat ini terdapat 41 anak dan pengasuh yang tinggal dan beraktivitas di panti tersebut.

Sebagian bantuan selanjutnya akan dikelola bersama Yayasan Sosial Soegijapranata

untuk mendukung kebutuhan harian anak-anak serta para pengasuh.

Inisiatif penyaluran bantuan ini berawal dari ajang _Mak Jegagik Padel_ yang digagas Jurnalis FC bersama Forum Wartawan Kota Semarang (Forwakot) di Gets Court Semarang, Selasa (4/8). Turnamen tersebut mengusung konsep olahraga santai dan kebersamaan lintas sektor dengan melibatkan Pemkot Semarang, DPRD, PHRI, Bank Jateng, BPR/BKK Kota Semarang, serta insan pers.

Ketua Panitia _Mak Jegagik Padel_, Gus Wahid, mengatakan hasil kegiatan tersebut diarahkan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Dukungan berbagai pihak kemudian memungkinkan bantuan tersebut disalurkan secara langsung kepada penghuni Panti Asuhan Cacat Ganda Bhakti Asih.

Melalui kegiatan ini, Wali Kota berharap semangat kebersamaan yang tumbuh dari kegiatan olahraga dapat terus berkembang menjadi aksi sosial yang memberi manfaat bagi masyarakat.

“Saya berharap kegiatan seperti ini terus tumbuh. Olahraga menjaga kebugaran, sementara kepedulian membuat manfaatnya bisa dirasakan lebih luas. Semangat kebersamaan seperti inilah yang ingin terus kita bangun di Kota Semarang,” pungkasnya.

Antisipasi Risiko Gagal Bayar, Pemkot Semarang Lakukan Rasionalisasi Belanja APBD 2026



SEMARANG — Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang mengambil langkah penyesuaian belanja dalam proses Perubahan APBD 2026. Langkah ini ditempuh sebagai bentuk kehati-hatian atas realisasi pendapatan daerah yang belum mencapai target, di tengah perlambatan ekonomi nasional dan berkurangnya dana transfer pusat.

Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Semarang, Handi Priyanto, menjelaskan bahwa penyesuaian anggaran dilakukan melalui rasionalisasi postur belanja untuk menjaga ketahanan kas daerah hingga akhir tahun.

"Saat penyusunan APBD pertengahan tahun lalu, optimisme terhadap target pendapatan memang tinggi karena tren ekonomi mendukung. Namun kondisi lapangan tahun ini berbeda sehingga butuh penyesuaian yang realistis," ujar Handi, Jumat (14/8).

Penyebab utama rasionalisasi ini bertumpu pada realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak dan retribusi yang hingga triwulan III 2026 belum menyentuh angka 50 persen. Bahkan beberapa jenis retribusi daerah tercatat masih di bawah 30 persen.

Kondisi tersebut turut dipengaruhi perlambatan pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan data BPS, pertumbuhan ekonomi turun dari 5,61 persen pada kuartal I menjadi 5,29 persen pada kuartal II 2026.

Sebagai kota berbasis jasa dan perdagangan tanpa potensi sumber daya tambang, pajak dan retribusi daerah menjadi tumpuan utama penerimaan Kota Semarang.

"Jika kegiatan fisik maupun nonfisik tetap dipaksakan sementara kas tidak mencukupi, ada risiko pekerjaan selesai tetapi tidak bisa dibayar. Risiko gagal bayar ini yang ingin kami cegah sejak awal melalui rasionalisasi," tegasnya.

Langkah rasionalisasi difokuskan pada pemangkasan perjalanan dinas ASN, pengetatan operasional ATK dan makan-minum, serta penundaan belanja barang non-mendesak seperti pengadaan kendaraan dinas dan alat elektronik. Selain itu, proyek fisik

yang belum masuk tahap lelang dan diprediksi tidak selesai hingga akhir tahun turut ditunda.

Kebijakan penyesuaian anggaran ini dipastikan tidak mengganggu pelayanan publik mendasar. Prioritas tetap diberikan pada pemenuhan hak belanja pegawai serta kegiatan pembangunan yang telah berkontrak dan sedang berjalan.

"Dengan langkah ini, struktur APBD 2026 tetap sehat dan seluruh kewajiban keuangan Pemkot Semarang dapat dipenuhi secara tuntas hingga akhir tahun," pungkas Handi.

Wali Kota Agustina Luncurkan Kota Semarang Peduli, Donasi untuk korban gempa NTT



SEMARANG – Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng meluncurkan gerakan Kota Semarang Peduli untuk membantu warga terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT) di Halaman Balai Kota, Selasa (18/8) malam. Tidak butuh waktu lama, donasi warga yang terkumpul via QRIS langsung menyentuh angka Rp91 juta.

Agustina mengapresiasi antusiasme warga yang ikut mengambil bagian, termasuk para pengemudi ojek daring yang menyisihkan sebagian penghasilannya. “Ternyata untuk membantu sesama yang sedang kesusahan tidak perlu menunggu punya banyak uang. Berapa pun diterima, tidak ada minimal. Ini adalah bentuk rasa cinta kita kepada tanah air, bangsa, dan negara,” ujar Agustina.

Melalui gerakan *_Kota Semarang Peduli_*, Agustina membuka ruang penggalangan dana secara terbuka selama tujuh hari, mulai Selasa (18/8) hingga Senin (24/8) mendatang

pukul 23.59 WIB. Ia mengajak jajaran Pemerintah Kota Semarang serta seluruh elemen masyarakat untuk mengambil bagian dalam aksi kemanusiaan tersebut.

“Kita sebagai warga Kota Semarang menginisiasi adanya donasi terbuka bagi warga Kota Semarang yang belum sempat menyampaikan dukungan dan sumbangannya,” katanya.

Seluruh penggalangan dana dilakukan melalui QRIS “Kota Semarang Peduli”. Setelah masa penggalangan berakhir, rekening khusus tersebut akan ditutup dan seluruh dana yang terkumpul disalurkan langsung ke rekening resmi penanggulangan bencana di NTT melalui Bank Jateng.

"Rekening ini dibuka khusus untuk bantuan bencana di NTT dan hanya berlaku sampai tanggal 24. Kami sudah meminta Bank Jateng langsung mentransfer seluruh dana terkumpul ke rekening resmi bencana NTT, setelah itu rekening donasi ini resmi ditutup," jelas Agustina.

Aksi solidaritas ini digelar sebagai bentuk kepedulian warga Kota Semarang atas musibah gempa bumi bermagnitudo 7,7 yang mengguncang Flores dan sekitarnya pada Sabtu (15/8) lalu. Berdasarkan data Badan

Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per Selasa (18/8), bencana tersebut telah menyebabkan 70 orang meninggal dunia, 1.182 orang luka-luka, dan 40.040 warga mengungsi.

Agustina menyampaikan duka cita kepada para korban dan berharap gerakan ini dapat membantu meringankan beban masyarakat terdampak.

“Semoga apa yang kita lakukan bersama ini dapat membantu saudara-saudara kita di NTT. Ini juga menjadi bentuk bahwa di tengah momentum kemerdekaan, rasa persatuan dan kepedulian kita tetap kuat,” pungkasnya.

Aksi kemanusiaan tersebut berlangsung hangat di puncak peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI yang di hadiri ribuan warga dan Forkompinda Kota Semarang. Penyanyi Judika, tampil menghibur di acara tersebut, karena kehadiran penyanyi ibu kota itu sudah teragenda beberapa bulan silam sebelum adanya berbagai kebijakan dan peristiwa terbaru.

Wali Kota Agustina Wilujeng Dorong UCC Terboyo Jadi Ekosistem Baru Ekonomi Kota Semarang



SEMARANG – Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng mendorong Urban Consolidation Center (UCC) Terboyo menjadi simpul baru ekosistem ekonomi Kota Semarang. Keberadaan kawasan ini berfokus pada konsolidasi dan distribusi barang, sekaligus menghubungkan aktivitas logistik dengan UMKM, koperasi, jaringan transportasi, tenaga kerja, serta berbagai sektor pendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Gagasan tersebut disampaikan Agustina saat memaparkan proposal Semarang Logistic Hub UCC Terboyo dalam Investment Challenge 2026 di Gumaya Hotel Tower Semarang, Senin (10/8). Forum ini dihadiri jajaran panelis dari Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah, Pemprov Jateng, Bappeda Jateng, Universitas Diponegoro, PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia, serta jajaran konsultan ahli.

“Proyek ini lebih dari sekadar bisnis sewa lahan fisik. Banyak peluang yang bisa kita eksplorasi untuk menjadi pendapatan pemerintah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.

Menurut Agustina, salah satu keunggulan UCC Terboyo terletak pada lokasinya yang strategis. Kawasan ini berdekatan dengan Pelabuhan Tanjung Emas, akses tol, bandara, stasiun kereta, serta kawasan industri di sekitar Kota Semarang. Posisi tersebut menjadi nilai tawar untuk memperkuat daya saing investasi sekaligus mendukung efisiensi distribusi barang.

Selain menjadi simpul logistik, UCC Terboyo juga diproyeksikan sebagai bagian dari solusi transportasi perkotaan. Konsolidasi dan distribusi barang dalam satu kawasan terpadu diharapkan mampu mengurangi aktivitas bongkar muat kendaraan besar di berbagai titik kota.

“Secara ekonomi, kemacetan sangat berkorelasi terhadap laju pertumbuhan ekonomi. Hal ini menjadi perhatian serius Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang,” katanya.

Pengembangan UCC, lanjut Agustina, akan ditopang oleh ekosistem bisnis yang terukur. Setiap tenant yang masuk nantinya diharapkan memiliki fungsi dan keterkaitan yang saling mendukung. Karena itu, Pemkot Semarang membuka ruang kolaborasi fleksibel bersama investor dan pengelola untuk menyesuaikan skala bisnis dengan kebutuhan pasar.

Skema ini nantinya diintegrasikan dengan rencana pengembangan 16 gudang di tiap kecamatan. Jaringan gudang tersebut dapat berfungsi sebagai titik pengumpulan dan distribusi barang dari dan menuju UCC Terboyo. Langkah integrasi ini berpotensi memperkuat daya saing sekitar 33.000 UMKM di 177 kelurahan melalui sistem klasterisasi produk dan distribusi yang lebih terarah.

Semarang Logistic Hub UCC Terboyo dirancang sebagai pusat konsolidasi dan distribusi barang yang menghubungkan pelabuhan, kawasan industri, pusat perdagangan, dan pasar perkotaan. Proyek ini memanfaatkan aset Pemkot Semarang sekitar 5,1 hektare dengan area penawaran 4,4 hektare dan kebutuhan investasi awal sekitar Rp71,17 miliar. Pemkot Semarang menyiapkan dukungan berupa penyediaan

lahan, fasilitasi perizinan, infrastruktur, serta penguatan ekosistem investasi.

Melalui pendekatan tersebut, Agustina ingin UCC Terboyo menjadi bagian dari solusi berbagai persoalan kota sekaligus membuka sumber pertumbuhan ekonomi baru yang memberikan manfaat bagi pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.

Roadshow Tirakatan, Wali Kota Semarang Agustina Tegaskan BOP 25 Juta Per RT Harus Hidupkan Guyub Warga



Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti menegaskan bantuan Rp25 juta per RT harus menjadi penggerak keguyuban warga melalui rembug bersama. Pesan tersebut disampaikan Agustina saat melakukan Roadshow Malam Tirakatan dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Minggu (16/8/2026).

Dalam rangkaian roadshow tersebut, Agustina mengunjungi sejumlah titik tirakatan warga, yakni Kampung Kulitan, Kecamatan Semarang Tengah, RW 03 Kelurahan Sampangan, Kecamatan Gajahmungkur, kawasan Gedawang, Kecamatan Banyumanik; serta Pondok Hasanudin RW 06 di Semarang Utara,

Di hadapan warga Sampangan, Agustina menjelaskan bahwa bantuan Rp25 juta per RT yang diberikan Pemerintah Kota Semarang memiliki makna lebih luas dari dukungan pembiayaan kegiatan masyarakat.

Menurutnya, mekanisme penggunaan dana melalui rembug warga menjadi ruang untuk memastikan seluruh masyarakat terlibat dalam menentukan kebutuhan bersama.

“Uang R5 juta per RT ini harus digunakan dengan cara rembuk warga. Nah, itu titiknya,” kata Agustina.

Ia menilai proses rembug warga penting untuk menjaga ruang pertemuan masyarakat di tengah kehidupan yang semakin banyak berlangsung melalui perangkat digital. Dana tersebut, lanjutnya, diharapkan mendorong warga kembali bertemu, menyampaikan gagasan, dan mengambil keputusan bersama.

Agustina juga mengaitkan keguyuban warga dengan kehidupan kampung yang menjadi salah satu kekuatan Kota Semarang. Menurutnya, suasana saling menjaga, keramahan dan ketenteraman merupakan kekayaan sosial yang perlu dipertahankan.

“Terima kasih. Hari ini saya sudah membuktikan bahwa ternyata BOP 25 Juta itu sangat bermanfaat ya. Matur nuwun,” ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, Agustina juga mengajak warga mempersiapkan diri menyambut kedatangan ribuan tamu dalam di

berbagai kampung akan menjadi bagian penyelenggaraan MTQ Nasional XXXI 2026 di Kota Semarang. Masyarakat dari wajah keramahan kota ketika para tamu beraktivitas di luar lokasi utama kegiatan.

Ia menyebut karakter kampung yang guyub, ramah dan tenteram justru menjadi daya tarik yang dapat memperkaya pengalaman para pendatang. Kampung-kampung di Semarang juga berpeluang menjadi ruang yang memperkenalkan kehidupan masyarakat Indonesia kepada tamu dari berbagai daerah dan negara.

Rangkaian Roadshow Malam Tirakatan menjadi bagian dari kehadiran Agustina bersama warga dalam memperingati 81 tahun Kemerdekaan Republik Indonesia. Ia mengajak masyarakat mempertahankan kekompakan sebagai modal sosial untuk terus merawat Kota Semarang.

“Sekali lagi matur nuwun jaga kekompakan, jaga keguyuban. Sebentar lagi kita akan kedatangan banyak tamu menyambut MTQ Nasional,” tutur Agustina.